

**KALIMANTAN BARAT
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
TAHUN 1942 - 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

KORNELIUS TONY

NIM : 90214065

NIRM : 900052010604210058

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

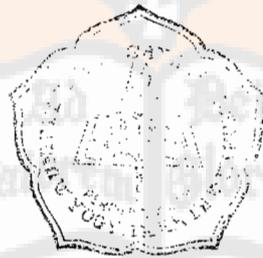
1996

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KALIMANTAN BARAT
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
TAHUN 1942 - 1945**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

KORNELIUS TONY

NIM : 90214065

NIRM : 900052010604210058

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1996

SKRIPSI
KALIMANTAN BARAT
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
TAHUN 1942 - 1945

Oleh :

KORNELIUS TONY

NIM : 90214065

NIRM : 900052010604210058

Telah disetujui oleh :

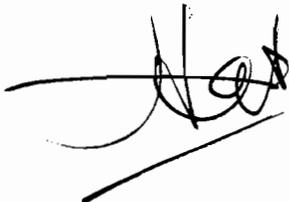
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

tanggal, 24 Agustus 1996

Pembimbing II



Drs. A.K. Wiharyanto

tanggal, 24 Agustus 1996

**KALIMANTAN BARAT
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
TAHUN 1942 - 1945**

SKRIPSI

yang telah dipersiapkan dan disusun oleh

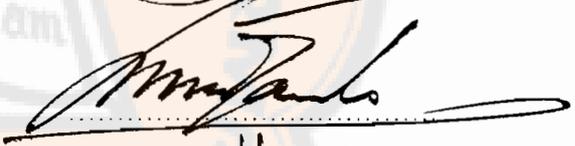
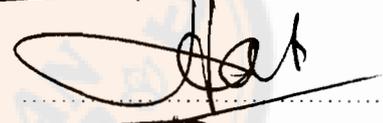
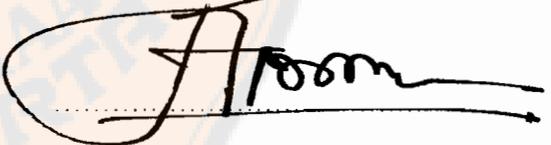
KORNELIUS TONY

NIM : 90214065

NIRM : 900052010604210058

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 7 September 1996
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

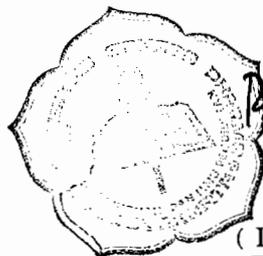
	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. J. Markiswo	
Sekretaris	: Drs. A.K. Wiharyanto	
Anggota	: Drs. G. Moedjanto, M.A.	
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto	
Anggota	: Drs. J.B.M. Mudjihardjo	

Yogyakarta, 21 September 1996

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan





(Dr. A. Priyono Marwan, S.J.)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

* Jika engkau rela mendengarkan, maka engkau akan belajar,
dan kalau kau condongkan telinga pasti menjadi bijaksana
(*Sir 6:33*)

* Pikiran merupakan permulaan segala pekerjaan dan
pertimbangan mesti mendahului setiap perbuatan
(*Sir 37:16*)

* Jangan membiarkan hatimu dimakan kesedihan, enyahkanlah
dan ingatlah akan hari depan (*Sir 38:20*)



*Skripsi ini kupersembahkan kepada
yang tercinta ayahnda Pius
Anselmus Tudjuh, ibunda Yosepha,
Kak Eka Sofyana, Bang Romuldus,
Dik Alex, Dik Inus, dan Ade Santa
yang tersayang.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah Bapa Tuhan Langit dan Bumi. Hanya itulah kata yang dapat penulis ungkapkan karena akhirnya sebuah skripsi dengan judul : *Kalimantan Barat Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942 - 1945* dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi tuntutan Akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Sebagai putera asli daerah Kalimantan Barat, penulis merasa mempunyai kewajiban untuk menelusuri dan mengungkapkan keadaan sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan, politik, serta perjuangan rakyat Kalimantan Barat menentang pendudukan militer Jepang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman pendidikan formal di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah pada Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Di samping itu, skripsi ini disusun sebagai sumbangan penulis terhadap perkembangan sejarah daerah Kalimantan Barat terutama pada masa pendudukan Jepang.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam mencari dan mengolah data untuk skripsi ini, melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan tulus hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun, yang telah diberikan kepada penulis sejak proses awal penulisan sampai selesainya skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. J. Markiswo sebagai Ketua Jurusan PIPS Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A. sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah berkenan memberikan bimbingan, referensi, bahan serta koreksi dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto sebagai Pembimbing II, yang telah mendampingi, mengarahkan, dan membimbing sampai penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Silverio R.L. Aji Sampurno, yang telah membantu penulis memberikan bahan, referensi serta sarana dalam mengumpulkan data dan memberikan dorongan.
6. Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak Kalimantan Barat, yang telah membantu dalam memberikan izin penelitian bagi penulis.
7. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Rehabilitasi Dan Perluasan Museum Kalimantan Barat, yang memberikan bahan serta dokumentasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Kalimantan Barat, yang memberikan referensi, bahan serta dokumentasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Perpustakaan Daerah Pontianak Kalimantan Barat, yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

telah memberikan bahan, referensi dalam penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi penghargaan kepada mereka.

Seperti pepatah mengatakan "tidak ada gading yang tak retak", akhirnya penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan penulis dalam mengolah data, sehingga skripsi ini dipandang dari segi manapun masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik, saran atau apa saja untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini berguna bagi peminat perkembangan sejarah daerah Kalimantan Barat khususnya dan perkembangan sejarah Indonesia pada umumnya. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan siap dipertahankan di depan penguji maupun masyarakat pembaca.

Yogyakarta,..... Agustus 1996

Kornelius Tony

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
MOTTO.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	16
C. Metode Penelitian.....	17
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM KALIMANTAN BARAT PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA TAHUN 1930an.....	23
A. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Kalimantan Barat.....	23
B. Keadaan Ekonomi Kalimantan Barat.....	30
C. Keadaan Pemerintahan Kalimantan Barat.	36
D. Keadaan Partai/Organisasi.....	45
BAB III USAHA JEPANG MEREBut KALIMANTAN BARAT DARI BELANDA.....	53
A. Kegiatan mata-mata Jepang Di Kalimantan	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Barat.....	53
	B. Masuknya Jepang Di Kalimantan Barat....	58
BAB IV	KEADAAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG.....	66
	A. Bidang Pemerintahan.....	66
	B. Bidang Sosial Budaya.....	72
	C. Bidang Ekonomi.....	81
	D. Bidang Politik.....	84
BAB V	USAHA RAKYAT KALIMANTAN BARAT MENENTANG PEN- DUDUKAN JEPANG.....	87
	A. Peristiwa Mandor merupakan perwujudan perlawanan rakyat Kalimantan Barat terhadap Jepang	87
	B. Perlawanan Rakyat Dayak Kalimantan Barat Terhadap Jepang.....	99
BAB VI	KESIMPULAN.....	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN.....	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Propinsi Kalimantan Barat.....	124
Gambar 2. Peta wilayah pemerintahan tradisional....	125
Gambar 3. Peta masuknya Jepang ke Kalimantan Barat.	126
Gambar 4. Lokasi Makam Mandor.....	127
Gambar 5. Monumen Makam Juang Mandor.....	128
Gambar 6. Kuburan Korban Kekejaman Penjajahan Jepang Tahun 1942-1945.....	129
Gambar 7. Tempat pembantaian massal yang dilakukan Jepang terhadap tokoh pergerakan Kalimantan Barat.....	130
Gambar 8. Salah satu makam massal korban pembantaian Jepang.....	131
Gambar 9. Makam massal No. 10 korban pembantaian Jepang.....	132
Gambar 10. Relief yang menggambarkan kekejaman Jepang terhadap rakyat, termasuk wanita di Kalimantan Barat.....	133
Gambar 11. Relief yang menggambarkan tokoh-tokoh pergerakan Kalimantan Barat sedang merencanakan perlawanan terhadap Jepang.....	134
Gambar 12. Relief yang menggambarkan penangkapan secara besar-besaran oleh Jepang terhadap tokoh-tokoh pergerakan Kalimantan Barat.....	135

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Gambar 13.**Relief yang menggambarkan penyiksaan dan pembantaian yang dilakukan Jepang terhadap tokoh-tokoh pergerakan Kalimantan Barat... 136
- Gambar 14.**Relief yang menggambarkan perlawanan rakyat Kalimantan Barat terhadap Jepang..... 137



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Kalimantan Barat Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945* ini penulis mendeskripsikan keadaan Kalimantan Barat, terutama: Gambaran Umum Kalimantan Barat Pada Masa Penjajahan Belanda Sekitar Tahun 1930: Usaha Jepang Merebut Kalimantan Dari Belanda: Keadaan Rakyat Kalimantan Barat Pada Masa Pendudukan Jepang, serta Usaha Rakyat Kalimantan Barat Menentang Pendudukan Jepang.

Sesuai dengan bidang yang ditekuni penulis, tulisan ini juga akan menekankan aspek historis dan berpijak pada sumber-sumber primer maupun sekunder yang ada.

Sebagai akibat dari Restorasi Meiji, Jepang telah menjadi negara yang kuat dan modern, yang sejajar dengan negara-negara Barat. Oleh karena itu, Jepang ingin melakukan ekspansi ke daerah-daerah tetangganya, kemudian mendirikan imperium baru dengan nama "Persemakmuran Bersama Asia Timur". Karena, ekspansi ke daerah seberang lautan dan mempunyai daerah jajahan menjadi suatu ukuran bagi kemampuan dan kekuatan suatu negara. Terutama dalam usahanya untuk menanggulangi kelebihan penduduk dan kekurangan bahan baku bagi industrinya.

Indonesia pada umumnya dan khususnya Kalimantan Barat Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 merupakan korban dari ekspansi Jepang. Kalimantan Barat merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat tinggal orang-orang Jepang jauh sebelum pecahnya Perang Asia Timur Raya. Kehadiran orang-orang Jepang di Kalimantan Barat, telah membuka beberapa perusahaan di bidang pengolahan kayu, pengolahan karet, pertambangan dan sebagainya.

Kegiatan perusahaan Jepang tersebut tidak semata-mata menyangkut hal perdagangan dan ekonomi, namun juga bergerak dalam berbagai kegiatan mata-mata. Bahkan Jepang menjalin hubungan yang baik dengan segala lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Dengan demikian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jepang berhasil menghilangkan rasa curiga dari semua golongan yang ada di Kalimantan Barat. Hal yang demikian membuat orang Jepang dengan leluasa keluar masuk pedalaman Kalimantan Barat.

Sebelas hari setelah Jepang mengumumkan perang Asia Timur Raya, pesawat-pesawat terbang Jepang membom kota Pontianak yang terkenal dengan "bom sembilan". Tanpa perlawanan yang berarti dari tentara Hindia Belanda, tanggal 2 Pebruari 1942 Kalimantan Barat jatuh ke tangan Angkatan Darat Jepang. Namun sesudah 15 Juli 1942 Kalimantan Barat berada di bawah pemerintahan Angkatan Laut Jepang.

Pemerintah pendudukan militer Jepang mengontrol semua kegiatan masyarakat Kalimantan Barat. Pendidikan yang diberikan bertujuan untuk menjepangkan masyarakat Kalimantan Barat. Lalu lintas perdagangan macet karena Jepang melarang terjadinya transaksi perdagangan. Hal tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Perekonomian ditujukan untuk kepentingan perang Jepang.

Penindasan dan kekejaman Jepang telah menimbulkan reaksi dari kalangan elite istana, tokoh pergerakan serta masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Tetapi sebelum perlawanan tersebut dilaksanakan, para tokoh pergerakan ditangkap dan dibunuh secara kejam di Mandor. Korban pembantaian tersebut diperkirakan berjumlah 21.037 orang. Sedangkan perlawanan masyarakat Dayak Kalimantan Barat berlangsung sampai 25 September 1945, ketika tentara Sekutu yang diwakili tentara Australia tiba di Pontianak.

ABSTRACT

WEST BORNEO IN THE JAPANESE OCCUPATION PERIOD OF 1942-1945
KORNELIUS TONY
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA

This research will describe the circumstance of West Borneo in the Japanese occupation period of 1942-1945. The description covers 1) general view of West Borneo in the Dutch colony in 1930s, 2) Japanese effort to take over West Borneo from the Dutch, 3) the condition of West Bornean society in the period of Japanese occupation, and 4) the effort of West Bornean society to oppose the Japanese occupation.

The method, emphasizing on the historical aspect, uses both the existing primary and secondary resources.

Japanese occupation in West Borneo brought the people to misery. This case rose some reactions from the figures of resistance movement and of Dayanese tribe. Yet the Japanese knew the plan of the opposition and murdered almost all of them. The massacre was executed in Mandor to 21.037 people.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai akibat dari Restorasi Meiji 1868, Jepang telah menjadi negara kuat dan modern, yang sejajar dengan negara-negara Barat. Sekitar tahun 1900-an negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda sudah menjadi negara imperialis. Jepang sebagai negara kuat dan modern juga ingin mengikuti jejak dan tingkah laku negara-negara besar tersebut, untuk menjadi negara imperialis yang tangguh. Ekspansi ke daerah-daerah di seberang lautan dan mempunyai daerah jajahan menjadi suatu ukuran bagi kemampuan dan kekuatan suatu negara.

Namun kemajuan industri Jepang yang pesat tidak didukung fasilitas bahan baku, karena negara Jepang yang tidak begitu luas itu kurang menghasilkan bahan-bahan baku yang dibutuhkan bagi perindustrian. Hal tersebut menyebabkan industri Jepang mengandalkan pada bahan-bahan impor. Untuk menanggulangi masalah bahan baku tersebut Jepang bermaksud mengadakan ekspansi ke daerah-daerah tetangganya. Selain bahan baku, Jepang juga ingin mendapatkan tempat pemasaran bagi industrinya. Di samping itu kondisi sosial Jepang juga ikut mendorong Jepang melakukan ekspansi ke luar, yaitu meledaknya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, sehingga faktor demografi

ini merupakan masalah besar bagi Jepang. Untuk mengatasi masalah demografi tersebut, Jepang menggunakan jalan memperluas industrinya dan emigrasi. Namun kedua jalan yang ditempuh tersebut nantinya akan mengarahkan Jepang terlibat dalam dunia imperialisme guna mewujudkan cita-citanya.¹

Politik luar negeri Jepang sebelum Perang Dunia II menunjukkan keinginan untuk melakukan ekspansi dan kemudian menduduki wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkannya. Korban pertama dari nafsu Jepang adalah Cina (1895). Dalam Perang Dunia I, Cina jatuh di bawah pengaruh Jepang dengan dengan 21 tuntutannya.² Kemudian pada tahun 1931 militer Jepang mengadakan provokasi yang dikenal dengan Insiden Manchuria, suatu pertempuran militer antara pasukan Jepang dan Cina yang dimulai dengan suatu ledakan bom pada jalan kereta api Manchuria selatan di dekat Mukden. Pada tahun 1937 Cina berhasil diduduki.³

Istilah pendudukan sendiri dalam Hukum Perang diartikan sebagai penempatan kesatuan angkatan perang di

1.A. Dasuki, *Sedjarah Djepang Djilid II* (Bandung: Sumber Jaya, tanpa tahun), hlm. 13.

2.G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 1* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 69. Lihat juga Taro Sakamoto, *Jepang Dulu Dan Sekarang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 53.

3.Ryosuke Ishii, *Sejarah Institusi Politik Jepang* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 121. Lihat juga Nio Joe Lan, *Djepang Sepanjang Masa* (Djakarta: PT Kinta, 1962), hlm. 250-253.

suatu tempat atau daerah yang direbut untuk keperluan pertahanan, atau untuk menjaga tata tertib dan keamanan di masa perang. Pada umumnya pemerintahan beralih ke tangan panglima-panglima tentara musuh.⁴

Ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara dalam rangka penaklukan dan penguasaan ekonomi dunia oleh Jepang, secara samar-samar ada hubungannya dengan dengan Rencana Tanaka atau lebih dikenal dengan "Tanaka Memorial". Dalam

memori tersebut diterangkan secara jelas, antara lain :
 "Demi perlindungan atas diri kita sendiri disamping atas pihak lainnya, Jepang tidak akan dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan di Asia Timur kecuali jika ia melaksanakan kebijakan "Darah dan Besi" (*Blood and Iron*). Tetapi, dalam melaksanakan kebijakan ini kita harus menghadapi Amerika, yang berkat kebijakan memerangi racun dengan racun dari Cina, ia kini berbalik memusuhi kita. Di masa depan, jika ingin menguasai Cina, kita terlebih dahulu harus mengkrems Amerika sebagaimana halnya di masa lalu kita bertempur dalam perang Jepang-Rusia. Tapi, untuk dapat menaklukan Cina, pertama-tama kita harus menaklukan Manchuria dan Mongolia.

Untuk dapat menaklukan dunia, pertama-tama kita harus menaklukan Cina. Jika kita sukses dalam menaklukan Cina, maka sisa dari negara-negara Asia serta negara-negara di Laut Selatan akan merasa takut dan takluk kepada kita. Setelah itu dunia akan sadar bahwa Asia Timur adalah milik kita dan tidak akan ikut campur mengganggu hak-hak kita. Inilah rencana yang ditinggalkan kepada kita oleh Kaisar Meiji. Sukses dari pelaksanaan rencana ini adalah essensil buat eksistensi kita."⁵

Dengan demikian, dalam menaklukan seluruh Asia dan Dunia, Jepang akan melaksanakan dan menempuh politik Darah

4. Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ihtiar Baru, 1984), hlm. 2654-2656.

5. *Harian Nusantara* tanggal 13 Oktober 1972, "Memoir Jenderal Tanaka Kepada Kaisar Jepang".

dan Besi, untuk melebarkan sayapnya. Mereka akan menjalankan politik ekspansi, dan kalau perlu mengorbankan jiwa-raga.

Ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara ini nantinya akan mendapat rintangan dari negara-negara Barat, karena negara Barat pun mempunyai kepentingan yang tidak jauh berbeda dengan Jepang. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat membutuhkan karet, timah, dan minyak serta sebagian modalnya tertanam di wilayah itu, sehingga setiap percobaan untuk menguasai wilayah tersebut akan dipandang sebagai permusuhan dengan Amerika maupun negara Barat lainnya. Namun pada saat itu, negara-negara Barat sedang menghadapi Jerman dalam Perang Dunia II di Eropa, sehingga mereka kurang memusatkan perhatiannya ke Timur Jauh. Kesempatan itu dipakai oleh Jepang untuk bergerak lebih agresif ke Selatan, guna merealisasikan cita-cita lingkungan Persemakmuran Asia Timur Raya.

Pada tanggal 3 Nopember 1938 Pangeran Konoye Fumimaro sebagai Perdana Menteri telah mengumumkan konsep Tata Tertib Baru Di Asia Timur. Selanjutnya akan dibentuk "susunan perdamaian" baru atas dasar keadilan yang sejati, tetapi sebenarnya Jepang secara unilateral tidak mau mengakui lagi adanya semua persetujuan yang berlaku di Asia Timur. Dalam Tata Tertib Baru di Asia Timur itu, Jepang ingin mengintegrasikan Korea, Manchukuo, Mongolia, dan Cina. Kesatuan tersebut merupakan satu keutuhan politik, militer, dan ekonomi. Daerah-daerah lain di Asia

Timur akan dimasukkan sebagai jajahan dari kesatuan itu.⁶ Dengan gambaran demikian, Jepang membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang tidak termasuk satu ras dengannya, dianggap inferior dan tidak patut diintegrasikan dengan Jepang. Semua negara yang termasuk di dalam Asia Timur raya tersebut merupakan negara yang kaya akan bahan mentah, maka Jepang harus menguasai daerah tersebut. Ajaran Orde baru itu dipropagandakan dengan giat. Dalam propaganda diterangkan bahwa negara-negara yang dimasukkan dalam lingkungan Asia Timur raya adalah negara-negara terbelakang yang akan mendapat bantuan dari Jepang.⁷

Lingkungan Persemakmuran diumumkan oleh Perdana Menteri Jepang dengan dasar pemikiran bahwa negara di Asia Timur dan Pasifik Selatan, menurut sejarah, antropologi, dan juga ekonomi mempunyai hubungan erat antara satu dengan lainnya. Sudah sewajarnya jika negeri-negeri itu bekerjasama dengan rapat, dan Jepang mempunyai tanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memimpin Lingkungan Persemakmuran di Asia timur Raya.⁸ Hal tersebut dimaksudkan agar Jepang dapat merebut hati bangsa-bangsa yang akan diduduki. Jepang juga menpropagandakan slogan

6.A. Dasuki, *op. cit.*, hlm. 54. Lihat juga Sayidiman Suryohadiprojo, *Belajar Dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjoangan Hidup* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 278.

7.G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 68.

8.A. Dasuki, *op., cit.*, hlm. 56.

"Asia untuk bangsa Asia", untuk itu rakyat jajahan dianjurkan melawan bangsa Barat.

Peristiwa di Eropa Barat, juga meyakinkan para pemimpin Jepang agar Tokyo menggabungkan diri dengan poros Roma-Berlin untuk suatu perjanjian militer. Diharapkan jika Jepang bersekutu dengan Jerman, maka Jerman akan membiarkan Asia dikuasai Jepang. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1940 dilaksanakan penandatanganan perserikatan tiga negara antara Jerman, Italia, dan Jepang.⁹ Dengan perserikatan itu kedudukan Jepang bertambah kuat, di Eropa mendapat dukungan dari Jerman dan Italia, dan dapat mengendalikan Inggris. Sedangkan di Asia berkat persetujuan netralitet dengan Rusia, Jepang juga memperoleh dukungan terutama dengan mengendalikan Amerika.

Dalam usahanya untuk menguasai bahan-bahan mentah guna kebutuhan ekspansi politiknya, Jepang pada tanggal 2 Pebruari 1940 mengajukan permintaan kepada pemerintah Belanda untuk membuka perundingan, imigrasi tak terbatas bagi orang-orang Jepang serta penanaman modal antar kedua negara. Dalam suasana yang demikian, Belanda berhasil diduduki Jerman sehingga hubungan Belanda dan Indonesia terputus. Karena itu Jepang perlu menyakinkan diri bahwa persediaan minyak tanah untuknya terjamin. Bulan september 1940 Ichizo Kobayashi, Menteri Perdagangan dan Industri Jepang menemui H. J. van Mook sebagai wakil pemerintah

9.Nio Joe Lan, *op. cit.*, hlm. 279-280.

Belanda guna mendapatkan kerja sama penuh dengan Belanda dalam rencana kemakmuran bersama itu. Harapannya adalah Inggris akan dipaksa menyerah pada Jerman, dan bahwa ia kemudian akan mampu menghimbau Belanda untuk menerima "protektorat" Jepang atas Indonesia.¹⁰

Tetapi Inggris tidak jatuh. Karena itu Kobayashi tidak dapat menyampaikan ultimatumnya, dan perundingan mengalami jalan buntu. Ketika pengganti Kobayashi, Kenkichi Yoshizawa, tiba dalam bulan Januari 1941 segera menjadi jelas bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak mau bekerja sama. Tujuan utama Jepang adalah untuk mencegah kehancuran industri minyak Indonesia dan pelaksanaan praktek-praktek buni hangus, yang akan menolak suplai bahan mentah yang sangat banyak dibutuhkan. Permintaan yang terus menerus diajukan oleh Yoshizawa dalam perundingan-perundingannya dengan van Mook memperlihatkan keroposnya usul kemakmuran bersama itu. Ia minta imigrasi orang-orang Jepang secara tak terbatas ke semua pulau-pulau di luar Jawa, dan bebas sama sekali bergerak dalam perdagangan dan pembangunan industri Indonesia.¹¹

Sepanjang tahun 1940 kalangan militer Jepang mendesak

10.D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara* (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 764. Lihat juga Rosihan Anwar, *Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 56.

11.D.G.E. Hall, *loc. cit.* Lihat juga Djajusman, *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda* (Bandung: Angkasa, 1978), hlm. 22-23.

kepada pemerintahnya untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk segera menduduki Malaya dan Indonesia, akan tetapi pemerintah Jepang belum yakin akan analisa para jenderal Jepang. Hal tersebut disebabkan kekalahan Angkatan Laut Jepang terhadap Inggris. Selain itu Jepang tidak memiliki lapangan udara guna pendaratan pasukannya. Tetapi kelemahan lapangan udara tersebut dapat diatasi, ketika pemerintah kolonial Perancis Indocina mengizinkan Jepang menggunakan fasilitas lapangan terbangnya, guna dipakai basis menyerang Tiongkok, Philipina, Kalimantan, Malaya dan Birma. Di samping itu Jepang juga mendapatkan hasil padi, karet, batu bara dan timah.¹² Dengan segera Jepang memasuki wilayah Indocina dan dalam beberapa bulan saja, Jepang telah berhasil menguasai Indocina termasuk jaringan komunikasinya. Semua pelayaran dari Indocina dilarang oleh Jepang, kecuali yang akan berlayar ke Jepang. Amerika memperingatkan duta besar Jepang di Washington, yaitu Laksaman Nomura, bahwa tindakan politik Jepang untuk menancapkan kekuasaannya di Asia akan di balas Amerika dengan tindakan militer yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Amerika.¹³ Peringatan yang diharapkan dapat menjembati ke arah perundingan kedua

12. *Ibid.*, hlm. 21. Lihat juga R.N. Current, *The Essential of American History* (New York: Alfred A. Knof, 1970), hlm. 299-301.

13. J. Mark Gayu, *The Flight for the Pacific* (New York: William Morrow, 1941), hlm. 408.

belah pihak itu, mengalami kegagalan.

Pada tanggal 17 Nopember 1941, Duta Besar Amerika di Tokyo mengirimkan telegram ke Washington yang intinya mengingatkan mengenai kemungkinan penyerangan yang tiba-tiba. Untuk itu di Washington diadakan perundingan lagi agar hubungan Jepang-Amerika dibuka kembali. Kemudian Amerika melalui menteri luar negerinya, Cordell Hull, mengirimkan sebuah nota kepada pemerintah Jepang bahwa sebagai dasar persetujuan pasukan Jepang harus ditarik mundur dari Tiongkok dan Indocina.¹⁴ Namun Soburo Korusu, utusan Jepang berpendapat bahwa usulan Amerika itu membawa perundingan ke jalan buntu, dan reaksi pemerintah Jepang terhadap nota tersebut adalah mengangkat senjata. Akan tetapi Jepang saat itu menginstruksikan kepada semua duta besarnya, seakan-akan Jepang masih bisa berunding terus. Sedangkan di Jepang, Perdana Menteri Tojo telah memutuskan untuk menyerang Amerika terlebih dahulu, dan keputusan itu mendapat pengesahan dari Kaisar pada tanggal 1 Desember 1941. Pada hari itu juga Presiden Roosevelt mengirimkan pesan pribadinya kepada Kaisar Jepang, supaya memberikan pengaruhnya untuk mencegah perang.¹⁵

Belanda melakukan dua langkah penting dalam bersiap-siap menghadapi perang. Langkah yang pertama,

14.R.N. Current, *op. cit.*, hlm. 303.

15.J.B.A.F. Mayor Polak, *Sejarah Dunia Modern: Suatu Pembahasan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 1975), hlm. 328.

adalah menyingkirkan kaum pengacau yang potensial. Pada bulan Januari 1941 pihak kepolisian menangkap Thamrin, yang sedang sakit karena menjalin hubungan dengan pihak Jepang bersama-sama dengan Douwes Dekker yang menjabat sebagai Sekretaris Kamar Dagang Jepang. Lima hari kemudian Thamrin wafat di dalam tahanan. Memang tidak ada kesan pihak Belanda telah menganiayanya, tetapi kejadian tersebut berarti hilangnya seorang pemimpin yang terkemuka dan juga semakin mendalamnya perasaan curiga terhadap Belanda. Haji Rasul, yang sudah berusia 62 tahun namun masih tetap merupakan seorang pemimpin Islam modern yang sangat aktif dan sumber gangguan yang tidak habis-habisnya bagi pemerintah, ditangkap dan dibuang dari Minangkabau pada waktu yang sama.¹⁶ Banyak organisasi Indonesia yang mengajukan protes tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya masalah pertahanan yang telah mengilhami pembentukan *Volksraad* pada tahun 1914-1918 mengakhiri sejarah *Volksraad*. Pemerintah sedang memperbesar kekuatan militernya. Belanda juga ingin membentuk suatu milisi yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang jumlahnya sampai 6000 orang. Kaum nasionalis Indonesia di dalam *Volksraad* berpendapat bahwa seharusnya tidak akan milisi tanpa adanya parlemen penuh.¹⁷ Selain itu kaum

16.M.C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 293.

17.*Ibid.*, hlm. 293-294.

nasionalis menolak anggaran belanja untuk angkatan laut dan *landstorm* (Angin Puyuh, nama satuan milisi Hindia Belanda) dan *stadswacht* (Pengawal Kota, nama satuan milisi Hindia Belanda), karena tidak memberi jaminan bahwa orang-orang Indonesia tidak diberi cukup partisipasi dalam pertahanan tanah airnya. Hal tersebut merupakan hinaan bagi bangsa Indonesia bila mereka tidak boleh ikut serta dalam pertahanan negerinya. Belanda mengatakan bahwa orang-orang Indonesia tidak layak atau patriotik.¹⁸ Meskipun demikian, usulan tentang milisi tersebut disahkan Volksraad pada bulan Juli 1941 karena mendapat dukungan dari anggota-anggota yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang berkebangsaan Eropa.

Akan tetapi, kini kekuasaan Belanda berada pada saat-saat terakhirnya. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour, Hongkong dan Malaya. Serangan ke Pearl Harbour merupakan serangan yang tiba-tiba, sehingga Amerika menderita kerugian yang tidak sedikit: 2 buah kapal tempur ditenggelamkan, 3 buah dihancurkan, dan 3 buah di rusak. Pesawat udara yang di rusak 247 buah dan yang berhasil naik ke udara 38 buah. Dari 475 pesawat udara hanya 50 buah saja yang masih dapat dipakai. Kerugian personil 3300 orang tewas dan hilang, yang luka-luka ada 1300 orang. Pihak Jepang sendiri mengklaim

18. Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 212-213.

hanya kehilangan 20 pesawat terbang.¹⁹ Negeri Belanda segera mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang terhadap Jepang.

Setelah Pearl Harbour jatuh, Jepang mendirikan pangkalan operasi di kepulauan Palau, yang terletak di sebelah timur Mindanau. Kecuali dilancarkan serangan ke Philipina, dari Palau dilancarkan serangan untuk menduduki Tarakan dan Balikpapan (Januari 1942). Jepang berhasil menduduki Philipina, yang selanjutnya melancarkan serangan ke Selatan, dan menduduki Menado (Januari 1942), Ambon (akhir Januari 1942), Ujung Pandang (Pebruari 1942), Kepulauan Nusa Tenggara (Pebruari 1942), kemudian pada bulan Pebruari Irian juga direbut.

Tinggallah Jawa sekarang yang mengalami kepungan dari berbagai penjuru. angkatan laut Sekutu dibawah Helfrich dan dengan Komando *Striking Force* dibawah Doorman dibagi menjadi dua. Satu kesatuan di Barat dan satu di Timur untuk menghadapi pendaratan-pendaratan dan datangnya kapal-kapal invasi Jepang. Yang di Timur (Surabaya) kemudian diperkuat lagi dengan pengiriman kapal-kapal dari Tanjung Priok (bagian barat) untuk mengadakan konsentrasi yang efektif dari kekuatan angkatan laut. Kekuatan laut ini terdiri dari: kira-kira 10 kapal selam Belanda dan beberapa dari Sekutu. Kapal-kapal selam dikonsentrasikan

19. Awjong Peng Koen, *Perang Pasifik 1941-1945* (Djakarta: PT Kinta, 1962), hlm. 242. Djajusman, *op. cit.*, hlm. 73.

di Barat. *Western Striking Force* (WSF) dengan basis Tanjung Priok terdiri dari kapal perusak berat *Exeter*, kapal perusak ringan *Hobart*, *Perth* dari Australia, 2 kapal torpedo, dan 4 kapal pemburu (*Jagers* dari Inggris). *Eastern Striking Force* (ESF) terdiri dari *de Ruyter* (*Flagship*), *Java*, 3 kapal pemburu Belanda (*Witte de With*, *Kortenaer*, *Banckert*), dan kapal-kapal pemburu Amerika Serikat ditambah dengan kapal perusak *Houston*.²⁰

Tanggal 25 Februari diterima kabar tentang gerakan kapal-kapal transpor dan invasi dari Jepang yang diperkirakan akan menuju Jawa. Pada tanggal 27 Februari 1942 pukul 16.00 Doorman dengan eskadernya melihat kesatuan Jepang dengan kekuatan: 2 kapal perusak berat, 2 kapal perusak ringan, 14 kapal pemburu. Doorman sendiri memiliki 2 kapal perusak berat, 3 kapal perusak ringan dan 8 kapal pemburu. Pukul 16.16 kapal-kapal Jepang membuka tembakan yang pertama dan pertempuran di Laut Jawa dimulai. Suatu pertempuran yang merupakan pertempuran laut yang paling lama, tanda kegigihan kedua belah pihak dengan kekalahan pada Sekutu.

Pertempuran berlangsung dalam 5 (lima) fase. Fase pertama, kapal-kapal perusak Jepang diikuti oleh pemburu-pemburu mendekati kapal Sekutu untuk mempersempit jarak, guna memakai kekuatan meriam sepenuhnya. Maka terjadi tembak menembak, dimana *de Ruyter* mengalami

20. Onghokham, *op. cit.*, hlm. 243.

kerugian, tetapi Pert berhasil menembak kapal Jepang Asagumo. Fase kedua dimulai pukul 16.35, kapal perang Jepang, *Haguro*, kena pada ruangan mesinnya (*Katelrium*). Kapal-kapal Jepang mendapat serangan dari pesawat-pesawat dari Jawa Timur, namun tidak berhasil. Pada pukul 17.00, fase ketiga di mulai, ketika kapal pemburu *Kortenaer* diterpedo dan tenggelam. Pukul 17.08 kapal perusak Inggris, *Exeter* berhasil ditembak oleh kapal perusak Jepang, *Naichi*, sehingga kecepatannya berkurang, dan terpaksa dikawal kembali ke Surabaya oleh kapal pemburu *Witte de With*. Ketika *Exeter* memutar haluannya, kapal-kapal di belakangnya mengikuti dan menimbulkan kekacauan, sedangkan kapal-kapal tersebut seharusnya mengikuti Doorman diatas kapal *de Ruyter*. Ketika formasi kapal-kapal Sekutu dikembalikan lagi, terdengar kata-kata Doorman "*All Ships follow me*", tanpa kata-kata yang terkenal "*Ik val aan*" (saya akan menyerang). Dalam fase ini, *Electra* (kapal pemburu Inggris) berhasil ditenggelamkan.²¹

Pada pukul 19.27 Doorman melihat 4 kapal Jepang yang terdiri dari: kapal perusak *Jintzu* dan 3 kapal pemburu, sedangkan kapal *Yupiter* melihat 3 kapal lainnya. Pada fase keempat ini, *Yupiter* tenggelam karena kemungkinan kena ranjau Belanda yang dipersiapkan untuk menghadapi armada invasi Jepang. Pada pukul 23.15, kapal *de Ruyter* berhasil

21. *Ibid.*, hlm. 245-246. Djajusman, *op.cit.*, hlm. 78-79.

ditembak, begitu juga dengan kapal *Hr. Ms. Java*. Sebenarnya kapal perusak *Houston* (Amerika Serikat) yang dituju tapi kena yang lain. Pada tanggal 27 Pebruari pukul 23.30, pertempuran di Laut Jawa selesai, di mana *Perth* dan *Houston* meninggalkan pertempuran ke arah Tanjung Periok.²² Pertempuran di laut Jawa menentukan sekali (karena dilihat dalam rangka PD II hampir sama sekali tidak disebut); kapal-kapal Belanda hampir semuanya tenggelam. Memang kapal-kapal Sekutu dari pertempuran di Laut Jawa masih ada yang belum tenggelam dan masih utuh. Namun akhirnya *Houston*, *Perth*, *Hr. Ms. Evertsen*, *Exeter*, *Encounter*, *Pope (AS)*, *Witte de With*, semuanya berhasil ditenggelamkan oleh kapal perang Jepang maupun pesawat pembom Jepang. Jadi nasib hampir semua kesatuan Sekutu dan Belanda dalam pertempuran di Laut Jawa buruk sekali walaupun kapal-kapal tersebut tidak tenggelam pada pertempuran yang sebenarnya.

Sesudah itu tentara Jepang di bawah pimpinan Jenderal Imanura berhasil melakukan pendaratan di tiga tempat pada tanggal 1 Maret 1942, yaitu di pantai Banten, Indramayu, dan Bojonegoro, tempat-tempat yang tidak diduga semula. Tidak mengherankan apabila rakyat Indonesia memberikan sedikit sekali bantuan kepada pasukan kolonial yang terancam, dan kadang-kadang dengan senang hati berbalik melawan orang-orang sipil dan serdadu Belanda. Pada

22. Onghokham, *op.cit.*, hlm. 247.

tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten, Panglima Tentara Belanda di Indonesia menandatangani penyerahan tidak bersyarat (kapitulasi) di Kalijati (Subang) kepada Imamura.

Berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pihak penguasa hanya meninggalkan sedikit sahabat di kalangan rakyat Indonesia. Bahkan kalangan elite yang telah mengharapkan berlangsungnya evolusi melalui kerja sama kini benar-benar menyangsikan kemauan baik pihak Belanda. Dan diantara orang-orang Indonesia yang di tangkap di seluruh kepulauan Indonesia, terdapat generasi pemimpin-pemimpin yang memandang kolonialisme Belanda sebagai suatu beban berat yang tidak dapat dibiarkan lagi.

B. Perumusan Permasalahan

Untuk mengetahui Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, maka permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Kalimantan Barat pada masa penjajahan Belanda tahun 1930an?
2. Bagaimana usaha Jepang merebut Kalimantan Barat dari Belanda?
3. Bagaimana keadaan rakyat Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang?
4. Bagaimana usaha rakyat Kalimantan Barat menentang pendudukan Jepang?

C. Metode Penelitian

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja, yakni masalah kerja untuk mendalami sasaran ilmu yang bersangkutan.

Untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, penulis menggunakan langkah-langkah seperti yang ditulis Louis Gottchalk dalam bukunya *Mengerti Sejarah*. Langkah-langkah yang diusulkan antara lain :

1. Pemilihan subyek untuk diteliti.
2. Menemukan sumber selengkap-lengkapya.
3. Mengkritik sumber dengan tujuan menguji otentisitas dengan kritik ekstern dan intern.
4. Menganalisa sumber keterangan.
5. Sintesa sumber keterangan dari berbagai sumber untuk diperbandingkan.
6. Membandingkan sumber lain yang otentik.
7. Interpretasi sejarah berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh.
8. Penulisan laporan sejarah.²³

Penulisan laporan sejarah (baca:skripsi) ini akan ditulis dalam bentuk uraian yang deskriptif analitis. Metode deskripif analitis mempunyai pengertian sebagai suatu penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan

23.Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (Terjemahan)* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 34.

yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah,²⁴ atau dengan menguraikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan kausalitas, faktor kondisional, determinan serta dimensi ruang dan waktu.²⁵ Dengan demikian dapat menentukan generalisasi yang berguna di dalam usaha untuk memahami situasi sekarang, dan meramalkan perkembangan yang akan datang.

Sesuai dengan metode penulisan yang digunakan, tentunya akan banyak buku dan karangan yang harus dibaca untuk mempelajari generalisasi. Hal ini perlu karena sejarah merupakan deskriptif yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.²⁶ Analisa penulis gunakan untuk maramu data-data yang di dapat, untuk mencari kesimpulan akhir sebagai jawaban atas semua pertanyaan dan masalah yang timbul.

Di samping menggunakan metode deskriptif analitis, penulis juga menggunakan pendekatan multidimensional. Hal ini dimaksudkan agar penulisan peristiwa sejarah lebih lengkap, dalam mempelajari fenomena historis yang

24. Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 132.

25. Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 70.

26. M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 55.

kompleks. Pertimbangan penulis menggunakan pendekatan multidimensional karena:

- a. Faktor atau unsur ekonomi, sosial, politik, dan religius digunakan dalam mengungkapkan kehidupan historis yang bersegi banyak.
- b. Pendekatan menurut satu garis penelitian akan selalu sepihak dan keterangannya terlalu sederhana.²⁷

D. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan gambaran umum Kalimantan Barat pada masa penjajahan Belanda tahun 1930an.
2. Menguraikan usaha Jepang merebut Kalimantan Barat dari Belanda.
3. Menguraikan keadaan rakyat Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang.
4. Menguraikan usaha rakyat Kalimantan Barat menentang pendudukan Jepang.

E. Manfaat Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu sejarah terutama dalam menyediakan informasi tentang Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Selain itu, untuk menambah buku sumber sejarah kepada guru sejarah maupun peminat sejarah Kalimantan Barat pada masa pendudukan

27. Sartono Kartodirdjo, "Lembaran Sejarah No.6" (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, 1970), hlm. 32.

Jepang tahun 1942-1945.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai skripsi ini, penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran umum Kalimantan Barat pada masa penjajahan Belanda tahun 1930an.
- Bab III : Usaha Jepang Merebut Kalimantan Barat dari Belanda.
- Bab IV : Keadaan rakyat Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang.
- Bab V : Usaha rakyat Kalimantan Barat menentang pendudukan Jepang.
- Bab VI : Kesimpulan.

Bab I memuat pendahuluan, latar belakang permasalahan dan perumusan permasalahan. Selain itu dikemukakan juga mengenai tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II menguraikan gambaran umum Kalimantan Barat pada masa penjajahan Belanda tahun 1930an. Dalam bab ini akan diuraikan keadaan sosial budaya, keadaan pemerintahan keadaan ekonomi, dan keadaan politik masyarakat Kalimantan Barat.

Bab III menguraikan bagaimana usaha Jepang merebut Kalimantan Barat dari Belanda. Dengan demikian bab ini

akan berisi tentang kegiatan mata-mata Jepang di Kalimantan Barat, serta penyerbuan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap kota-kota yang ada di Kalimantan Barat. Semua usaha tersebut dilakukan Jepang dimaksudkan untuk mengusir Belanda dari Kalimantan Barat.

Bab IV menguraikan bagaimana keadaan rakyat Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang. Dalam bab ini akan dibahas keadaan rakyat Kalimantan Barat terutama dalam bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi serta politik. Pemerintah militer Jepang ikut serta mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat Kalimantan Barat.

Bab V menguraikan bagaimana usaha rakyat Kalimantan Barat menentang pendudukan Jepang. Dalam bab ini akan dibahas sifat dan gerakan rakyat Kalimantan Barat menentang Jepang, yaitu dengan berkumpulnya seluruh tokoh pergerakan yang ada di Kalimantan Barat. Serta perlawanan masyarakat pedalaman terutama dari suku Dayak menentang pemerintah militer Jepang di Kalimantan Barat.

Bab VI berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan diatas. Kesimpulan yang penulis maksud adalah menjawab permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Dengan terjawabnya semua permasalahan yang penulis ajukan berarti selesai sudah penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan uraian di atas dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Untuk selanjutnya marilah kita masuk pada bab II yang akan menguraikan

gambaran umum Kalimantan Barat pada masa penjajahan Belanda tahun 1930an.



BAB II

GAMBARAN UMUM KALIMANTAN BARAT

PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA TAHUN 1930an

A. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Kalimantan Barat

Keadaan masyarakat daerah Kalimantan Barat menjelang Perang Dunia II sebenarnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Memang setelah tahun 1930-an telah tampak berbagai kemajuan dan perubahan, baik di bidang pendidikan, perekonomian, kerohanian atau penyebaran agama maupun politik, tetapi perubahan dan kemajuan tersebut hanya bisa dilihat dan dinikmati oleh penghuni kota maupun masyarakat yang hidup dalam jangkauan jaringan komunikasi. Malaise pada tahun 1930-an, sekali lagi telah menjatuhkan harga dan menyengsarakan rakyat. Pemerintah kolonial Belanda dengan menggunakan lembaga yang bernama *Rubberfonds* atau kemudian yang lebih dikenal dengan nama *Nirub* berusaha keras untuk menolong keadaan rakyat. Sistem kuota yang lebih dikenal dengan nama "sistem kupon" dijalankan untuk mencegah jatuhnya harga karet.²⁸

Kedudukan golongan Cina tidak banyak berubah oleh malaise. Sebagai pedagang umumnya mereka berdomisili di

28. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat* (Pontianak: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Budaya Daerah, 1978/1979), hlm. 61.

kota-kota besar seperti Pontianak, Singkawang dan lain-lain. Sedangkan sebagai penghasil pertanian mereka berdomisili di daerah pedesaan. Kehidupan orang Cina kaya bersifat mengelompok di pusat-pusat perdagangan kota, sehingga nampak lebih menonjol. Cina-cina kaya itu disebut "tauke" dan isteri mereka disebut "nyonyah".²⁹ Banyak orang Cina yang bermukim di Pontianak dan Singkawang, mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur mereka, agar lebih mudah mengawasinya. Di Pontianak, kepala dari kelompok penduduk Cina diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda dengan pangkat *majoor der chineezen*. Ia membawahi *kapitein der chineezen* dan *luitenant der chineezen*. Di Singkawang, pangkat tertinggi dari kepala penduduk Cina adalah *luitenant der chineezen*. Di kampung di mana bermukim banyak orang Cina, terdapat kepala kampung yang bertanggungjawab akan keadaan mereka.³⁰ Di kota-kota di mana masyarakat sangat majemuk, orang Eropa dan orang Cina tinggal di tempat-tempat pemukiman mereka yang merupakan perkampungan khusus (*wijk*). Dengan demikian, bentuk lahiriah kota-kota Indonesia pada waktu itu masih menjadi

29.Syarif Ibrahim Alqadrie dan Pandil Sastrowardoyo, *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hlm. 75.

30.Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm. 61-62.



bukti adanya pemisahan-pemisahan pada jaman itu. Anggota-anggota golongan sosial yang dominan, mempunyai tempat tinggal khusus dan ditempatkan dibagian kota yang baik. Dilihat dari segi itu, maka masyarakat kolonial itu sungguh-sungguh menyerupai masyarakat yang berkasta.³¹

Kota-kota baru bermunculan sejak awal abad ke-20, terutama di daerah-daerah pantai, yang disebabkan berkembangnya jalan-jalan raya yang melaluinya. Perdagangan merupakan mata pencaharian bagi penghuni kota, khususnya orang Cina. Mereka dulunya merupakan petani di pedesaan yang meninggalkan tempat tinggal sebagai akibat hancur dan bubarnya kongsi-kongsi Cina. Mereka tetap mempertahankan kebudayaannya. Rumah-rumah ibadat kepercayaan Konghucu (toapekong) bertebaran di kota-kota, di mana terdapat banyak penduduk Cina. Orang-orang Cina sering diminta bantuan dan dipergunakan untuk bertindak membantu para pengumpul pajak maupun sebagai "agen" dari perusahaan dagang Belanda untuk menyalurkan barang dagangan ke daerah pedalaman dan pedesaan serta menjadi pengumpul hasil kebun dari rakyat untuk kemudian dikirinkan ke perusahaan-perusahaan dagang Belanda di kota besar khususnya Pontianak, yang bertindak sebagai pengekspor barang hasil kebun dan hasil bumi.

31. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2* (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm. 211-212.

Hubungan yang erat dengan pemerintah kolonial Belanda membuat orang-orang Cina juga melakukan usaha pengkreditan. Usaha ini biasanya mereka lakukan dengan cara memberikan hutang barang (tetapi kadang-kadang uang) kepada para petani maupun pengumpul hasil hutan, dengan jaminan bahwa nanti pihak yang berhutang akan menyetorkan hasil kebun atau hasil hutan yang mereka dapatkan kepada orang-orang Cina. Usaha pengkreditan yang terselubung seperti inilah yang menyebabkan pengkreditan yang dilancarkan pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan rakyat, yang lebih dikenal dengan nama *volkscredietwezen*, terbatas sekali dan tidak memperoleh ruang gerak.³² Kegiatan terakhir ini memberi julukan kepada mereka sebagai *cina mindring*.³³ Keberhasilan golongan ini dalam perdagangan menempatkan mereka pada umumnya sebagai pengusaha kelas menengah yang menguasai baik perdagangan maupun pemborong hasil bumi pedesaan.

Dengan demikian, kegiatan perdagangan yang dahulu banyak ditangani dan diusahakan oleh para pedagang pribumi, secara berangsur-angsur diambil alih dan dikuasai oleh pedagang Cina. Dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat golongan menengah dalam arti kata yang sebenarnya terdapat di negara Barat. Golongan menengah ini hanya

32. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm. 34.

33. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 111.

dipakai untuk menyebut golongan yang berpenghasilan cukup dalam masyarakat, seperti; pedagang, pegawai pemerintah, dokter, guru dan juga petani. Dengan tidak adanya golongan yang disebut golongan menengah dalam arti kata yang sebenarnya, menyebabkan mudahnya penguasaan ekonomi oleh golongan masyarakat yang bukan pribumi terutama oleh orang-orang Cina dan Arab.

Sebagian dari masyarakat Cina di kota-kota, diusahakan agar dapat menerima kebudayaan Barat. Bagi mereka, terutama bagi anak-anak mereka dibuka sekolah-sekolah khusus dengan sistem pendidikan Barat di Pontianak yaitu HCS (*Hollandsch Chineesche School= Sekolah Cina Berbahasa Belanda*) pada tahun 1924 oleh Bruder dari Ordo Kapusin. HCS tidak hanya didirikan di Pontianak tetapi juga di Singkawang dan Sambas.³⁴

Orang-orang Cina merupakan kelompok penduduk yang pertama-tama menerima dan memasuki agama Kristen. Perkembangan gereja Katolik sendiri cukup pesat. Pada tanggal 21 Mei 1938 telah dibentuk Vikariat Apostolik Pontianak. Sebagian besar umatnya terdiri dari orang Cina yang berpendidikan Barat dan suku Dayak. Sekolah Menengah Pertama (*MULO= Meer Uitgebreid Leger Onderwijs*) merupakan satu-satunya sekolah lanjutan yang ada di daerah ini, yang

34.M. Soenyata Kartadarmadja dan Sutrisno Kutoyo (Penyunting), *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Barat* (Pontianak: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1980/1981), hlm. 48.

didirikan oleh misi Katolik menjelang pecahnya Perang Dunia II. Sekolah Guru (*Normaal School*) tidak ada di daerah ini, mereka yang ingin menjadi guru harus pergi ke Jawa atau ke Sumatera (Bukittinggi). Di Kalimantan Barat hanya terdapat tiga buah CVO (*Cursus tot Opleiding Voor Vokschoollandarijers*) yang menyiapkan guru-guru untuk Sekolah Desa. Walaupun Sekolah Desa dibuka hingga ke desa-desa pada tingkat *onderdistrict*, namun sebagian besar rakyat tetap tidak dapat menikmati pendidikan.

Selain itu pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan ELS (*Europesche Lagere School*= Sekolah Rendah Belanda) yang dikhususkan untuk anak-anak dari golongan Eropa di Pontianak pada tahun 1920. Sekolah ELS ini meskipun resminya diperuntukkan bagi anak-anak golongan Eropa, tetapi dengan syarat-syarat tertentu antara lain; anak bangsawan/sultan maupun anak-anak orang yang berpangkat dalam pemerintahan dapat memasukinya. Adapun lamanya pendidikan sekolah-sekolah kelas I (HIS, HCS) adalah 6 tahun, baru pada tahun 1934 diubah menjadi 7 tahun. Sekolah dasar lain berada di Sambas sebagai kelanjutan *Assultaniah* yang pada tahun 1936 diubah menjadi *Tarbiatul Islam*. Dengan perubahan ini dimaksudkan untuk mensejajarkan pendidikan Islam yang semula hanya setingkat Sekolah Desa (*Volksschool*) lalu dijadikan sejajar dengan dengan sekolah kelas I seperti HIS atau HCS yang sudah

mulai bermunculan di Kalimantan Barat.³⁵

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, maka Perguruan Tarbiatul Islam mendatangkan guru-guru Sumatera yang berpendidikan HIK (*Hollands Inlandsche Kweekschool*) di samping guru-guru agama yang sudah ada. Mata pelajaran maupun bahasa pengantarnya juga sudah mengalami perubahan disesuaikan dengan HIS atau HCS, demikian juga dengan kelasnya. Juga di Sambas didirikan *Standard School* sama dengan *Schakelschool* (sekolah antara sistem pribumi dan sistem Belanda) pada tahun 1940, sebagai kelanjutan dari *vervolgsschool* (sekolah sambungan) kepunyaan misi. Selain di kota Sambas, maka di kota Pontianak juga didirikan Perguruan Islamiyah yang berdiri sejak tahun 1926. Pada tahun 1927 didirikanlah Sekolah Desa 3 tahun. Kemudian pada tahun 1932 ditingkatkan menjadi 5 tahun dengan mata pelajaran 70 % umum dan 30 % pelajaran agama.³⁶

Dalam mendirikan sekolah dasar ini, ternyata GKKB (Gereja Kristen Kalimantan Barat) juga tidak mau ketinggalan, meskipun sekolah dasar itu diperuntukkan bagi anak-anak golongan Cina. Sekolah ini namanya *Sekolah Lak Yue* yang artinya senang atas pendidikan, didirikan pada tahun 1938. Adapun tujuan didirikannya sekolah ini membantu bagi anak-anak Cina yang kesulitan untuk

35. *Ibid.*

36. *Ibid.*, hlm 49.

menperoleh pendidikan.³⁷

Khusus mengenai pendidikan yang setingkat dengan HIS, HCS ataupun ELS yang persyaratan untuk memasukinya sangat ketat seperti halnya di Jawa, maka di Kalimantan Barat persyaratan itu agak lebih longgar. Hal ini disebabkan karena keadaan sosial ekonomi maupun adat istiadat di Kalimantan Barat berbeda dengan di Jawa, seperti halnya susunan masyarakatnya yang terdiri dari bermacam-macam suku. Maka tidaklah mengherankan apabila anak Indonesia suku Melayu yang mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah HCS, sehingga memberi kesan sekolah-sekolah di Kalimantan Barat sistem sekolahnya tidak disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat.

B. Keadaan Ekonomi Kalimantan Barat

Keadaan perekonomian yang buruk sebagai akibat jatuhnya harga dari hasil pertanian dan perkebunan karena terhentinya ekspor ke Eropa semasa berlangsungnya Perang Dunia I di Eropa, telah berangsur menjadi baik setelah Perang Dunia I berakhir. Permintaan dalam jumlah besar akan hasil bumi dan tambang Indonesia meningkat, mendorong naiknya harga hasil perkebunan dan pertanian serta pertambangan. Dengan demikian, mendorong ekspor serta menarik modal dari pelbagai negara, antara lain Amerika

37. *Ibid.*

dan Jepang. Tepatlah apabila dikatakan bahwa Indonesia terbuka lebar bagi lalu lintas dunia. Perkembangan itu membawa berbagai akibat dalam bidang politik dan sosial.

Kalimantan Barat yang secara tradisional telah menjadi salah satu daerah penghasil kopra dan karet (sejak karet diperkenalkan menjadi salah satu komoditi yang laku di pasars dunia), ikut menikmati kenaikan harga tersebut. Membaiknya harga hasil dari perkebunan, terutama karet untuk daerah ini telah menyebabkan banyak orang bergairah untuk menanamkan modalnya dan membuka kebun-kebun karet dan perkebunan lainnya. Baik petani biasa, pedagang yang menanamkan modalnya pada usaha perkebunan, maupun pengusaha perkebunan, berharap agar situasi harga yang membaik itu tidak akan berubah (merosot kembali). Akan tetapi ketergantungan kehidupan rakyat pada hasil perkebunan (khususnya karet) inilah yang merupakan salah satu faktor pokok penyebab labilnya kehidupan rakyat di daerah ini.

Hampir seluruh daerah kerajaan Sambas, Mempawah, Landak, Tayan, Simpang, Matan, dipenuhi oleh kebun-kebun yang luas, baik milik raja-raja dan kaum kerabatnya maupun milik pengusaha dan rakyat. Perkebunan milik Belanda baru ada menjelang tahun 1925, dan terdapat di daerah pedalaman. Pada awalnya, perkebunan milik Belanda mengalami kendala terutama masalah tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka mendatangkan tenaga kerja dari pulau Jawa, seperti di daerah

kerajaan Sintang. Perkebunan Belanda itu mengolah sendiri hasil sadapan karetnya. Cara pengolahan hasil karet yang lebih baik, menyebabkan mutu karet baik dan harga yang diperoleh tinggi. Kenyataan ini mengakibatkan mendorong adanya perbaikan pada usaha-usaha pengolahan karet, termasuk pembangunan rumah-rumah pengasapan yang banyak bertebaran di daerah ini.

Pada masa harga karet cukup tinggi, para pemilik perkebunan karet menikmati kehidupan yang lebih baik. Pembangunan rumah baru, pembelian emas dalam jumlah yang banyak, menjadi ciri-ciri pokok dari kemakmuran penduduk. Namun kemakmuran itu tidak merata. Para pemilik perkebunan biasanya orang-orang yang mempunyai, seperti; pedagang, raja-raja dan kaum kerabatnya, dan orang-orang Cina. Merekalah yang menikmati porsi yang jauh lebih besar daripada apa yang dinikmati oleh rakyat kecil, yang bekerja sebagai buruh penyadap atau pemungut hasil karet. Orang-orang Cina mengerjakan tanah-tanah milik para bangsawan ataupun menyewa kebun milik para bangsawan itu dengan sistem *pacht*.³⁸ Mereka juga menampung hasil sadapan karet dari rakyat, dan dalam banyak hal mereka sebagai kreditor dan pemasok bagi rakyat untuk barang keperluan

38. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm. 50-51.

hidup sehari-hari yang dibutuhkan.

Usaha pertambangan, khususnya pertambangan emas dan intan masih tetap dijalankan terutama di kerajaan Sambas dan Mempawah, tetapi hasil yang diperoleh tidaklah begitu banyak. Konsesi atas daerah pertambangan inipun pada umumnya berada di tangan orang Cina maupun orang Belanda, yang memperoleh kepercayaan dari raja-raja yang menguasai pertambangan tersebut. Pemerintah kolonial Belanda menarik keuntungan yang besar dari usaha pertambangan tersebut, terutama berupa pajak yang dipungut dari usaha tersebut.

Peningkatan kegiatan perdagangan dan ekspor ditunjukkan oleh peningkatan masuknya kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Barat. Di samping pelabuhan Pontianak, yang merupakan pelabuhan utama di Kalimantan Barat, terdapat dua pelabuhan yang mempunyai "daerah belakang" (hinterland) yang kaya. Kedua pelabuhan tersebut yaitu pelabuhan Singkawang dan Sambas, keduanya terletak dalam Kesultanan Sambas.³⁹ Melihat keuntungan yang bisa diperoleh dari hasil pemasukan dua pelabuhan yang dulunya tidak penting bagi Belanda, maka pemerintah kolonial segera memperbaiki kedua pelabuhan tersebut. Cara yang ditempuh dengan memberikan fasilitas sehingga baik kapal KPM (kongsi pelayaran Belanda) maupun kapal-kapal dari

39. *Ibid.*

kongsi pelayaran lainnya dapat berlabuh. Hubungan Kalimantan Barat dengan Singapura, yang merupakan daerah ekspor tradisional semakin meningkat. Sebaliknya kapal-kapal dagang datang membawa barang-barang konsumsi, pakaian, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Alat-alat pembayaran tidak mengikat, baik menggunakan uang Inggris, uang Belanda, uang Singapura semua dapat dan boleh beredar di Kalimantan Barat sehingga memudahkan bagi perdagangan internasional.⁴⁰

Tetapi kemakmuran yang nampak sekitar tahun 1920-an itu rupanya sementara sifatnya. Menurut Pluvier, depresi ekonomi itu sudah menampakkan tanda-tandanya menjelang tahun 1926, pada sektor perdagangan hasil perkebunan dan hasil pertambangan.⁴¹ Akibat permintaan yang semakin meningkat akan hasil perkebunan, maka orang bergairah untuk melakukan investasi besar-besaran pada sektor perkebunan. Hal ini berarti diperlukannya barang modal dalam jumlah besar, yang semuanya harus diimpor dalam jumlah besar. Dalam keadaan yang demikian, krisis ekonomi dunia pecah.

Bagi Indonesia, datangnya krisis ekonomi itu

40. Syarif Ibrahim Alqadrie dan Pandil Sastrowardoyo, *op. cit.*, hlm. 60-61.

41. J.M. Pluvier, *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Di Indonesia Tahun 1930-1942* (terjemahan), hlm. 40.

membawa bencana ganda bagi perekonomian tanah jajahan. Pertama, hasil ekspor Indonesia yang sebagian besar berupa hasil perkebunan dan hasil ekstraktif lainnya, harganya turun secara drastis. Kedua, harga barang yang diimpor dari luar negeri melonjak tinggi. Dan patut diketahui bahwa sebagian besar bahan modal dan hasil industri yang diperlukan Indonesia berasal dari impor.

Sekali lagi kehidupan rakyat kecil dan rakyat petani mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi. Hasil perkebunan tidak laku dijual, padahal mereka harus membeli kebutuhan hidup sehari-hari yang meningkat harganya. Pengangguran yang disebabkan oleh pengurangan jumlah pegawai dan pekerja pemerintah maupun perusahaan, sulitnya mencari uang dan jatuhnya harga hasil bumi menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Banyak orang membuka usaha lain tetapi tidak memberikan hasil yang memuaskan atau gagal. Pemerintah kolonial Belanda memang berusaha mencari jalan untuk meringankan kehidupan rakyat, diantaranya dengan mengaktifkan pemberian kredit dengan bunga rendah untuk modal usaha, dan membuka pegadaian di Pontianak pada tahun 1931. Selain itu pemerintah juga berusaha mencegah usaha peminjaman uang gelap yang akan lebih mengancam lagi kehidupan rakyat yang sudah menderita.

Untuk memulihkan lagi semangat rakyat dalam usaha membuka kembali kebun-kebun mereka, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang menetapkan jatah

pembelian karet, terhadap hasil karet rakyat. Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah akan membeli karet rakyat dalam jumlah yang ditetapkan pada kartu jatahnya dengan harga yang telah ditetapkan. Apabila hasil karet itu melebihi jatah yang telah ditetapkan, maka rakyat diperbolehkan menjualnya kepada para pedagang atau siapa saja yang akan membelinya.⁴²

C. Keadaan Pemerintahan Kalimantan Barat

Kalimantan Barat boleh dikatakan mempunyai penduduk yang multi etnis sifatnya. Suku-suku Dayak yang banyak jumlahnya dengan perbedaan yang nyata dalam cara hidup, bahasa dan adat istiadat; kelompok penduduk keturunan cina yang sejak lama bermukim di daerah ini namun tetap menelihara dan mempertahankan kultur leluhurnya dengan kuat, disamping kelompok Melayu dan suku lainnya yang datang ke Kalimantan Barat. Sifat multi rasial dan multi kultur dari masyarakat daerah ini, sedikit banyak membantu dan memudahkan Belanda untuk menarik keuntungan politis, dengan tetap dan menghidupkan api pertentangan diantara mereka.

Pemerintah kolonial Belanda juga tetap mengusahakan jarak antara kaum elite pribumi (bangsawan dan kaum kerabat raja) dengan rakyat kecil. Golongan elite ini

42. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm 52-53.

tetap mendapatkan kedudukan yang baik, dan hak-hak istimewa yang tidak dapat dinikmati oleh rakyat biasa, misalnya pendidikan di sekolah khusus yang dibuka dan disediakan oleh pemerintah Belanda untuk mereka, jabatan dalam struktur pemerintahan yang baru (bagi bangsawan dan kerabat raja yang oleh Belanda dipandang dapat diandalkan kesetiaanya, atau bagi anggota masyarakat yang berpendidikan baik), dan berbagai perlakuan lain yang khusus. Termasuk dalam hal ini adalah "persamaan hak" dari golongan elite masyarakat yang menghendaknya, sehingga kedudukan mereka sama dengan kedudukan orang Eropa dalam segi hukum. Dengan demikian, golongan elite ini terpisah dengan rakyat kecil (masyarakat luas).

Dalam dekade ketiga abad ke-20, di Kalimantan Barat terdapat sedikitnya 13 kerajaan yang diakui sebagai "daerah yang berpemerintahan sendiri". Kerajaan tersebut antara lain: Tanjungpura, Sukadana, Simpang, Mempawah, Sambas, Landak, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu dan Pontianak.⁴³ Ke-13 kerajaan itu diperintah oleh sultan ataupun panemban.

Para panembahan dan sultan tersebut pada hakekatnya adalah penguasa-penguasa nominal saja; kekuasaan yang sebenarnya dalam kerajaan-kerajaan berada di

43. Soemargono (ed.), *Profil Propinsi Republik Indonesia: Kalimantan Barat* (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), hlm. 12.

tangan para *gezaghebber* (pejabat) dan aparat pemerintah kolonial yang baru dibentuk dan berfungsi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menempatkan pejabat-pejabatnya di kerajaan-kerajaan, yang telah mengakui kedaulatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Para pejabat pemerintah kolonial Belanda tersebut, yang berpangkat *Controleur* (pengawas) maupun *gezaghebber*(pejabat), membantu sultan atau panembahan dalam melaksanakan perintah menurut ketentuan-ketentuan seperti yang dikendaki oleh pemerintah kolonial Belanda serta mengawasi pelaksanaannya. Di tempat-tempat yang strategis dan dianggap rawan, seperti di Singkawang, Sambas, Sintang dan Ngabang, para *gezaghebber* juga merangkap menjadi komandan pasukan militer yang ditempatkan di mana mereka berada. Pasukan tersebut meskipun kecil, namun cukup aktif untuk dipergunakan untuk menumpas gejolak-gejolak yang ada dalam masyarakat, baik yang timbul karena rasa ketidakpuasan para penguasa pribumi atau kaum kerabatnya, maupun rakyat yang menderita akibat paksaan atau tekanan pajak. Selain itu *gezaghebber* juga berfungsi sebagai hakim untuk mengadili perkara kejahatan di daerah tugasnya, sebelum pengadilan dapat dibentuk dan berfungsi.⁴⁴

44. Frans Hitipeuw dan Sutirno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm. 35.

Upeti yang dahulu biasa diserahkan kepada sultan atau panembahan, sejak berlakunya pemungutan pajak oleh pemerintah kolonial Belanda, tidak lagi diperbolehkan. Sebagai gantinya, para sultan dan panembahan memperoleh tunjangan atau subsidi dari pemerintah yang besarnya berkisar antara F. 11.000,- (untuk kesultanan Pontianak, yang dianggap sebagai swapraja terpenting) sampai F. 2.000,- untuk swapraja-swapraja yang kecil.⁴⁵ Demikian juga pejabat-pejabat dalam kerajaan yang diangkat berdasarkan struktur pemerintah baru yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda, juga menerima gaji dari pemerintah.

Sadar akan arti pentingnya daerah ini jika dipandang dari segi letak maupun dari banyaknya kerajaan atau swapraja, dan terutama juga banyaknya orang Cina yang orientasi hidupnya tetap mengarah pada tanah leluhurnya, maka pada tahun 1936 pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan *Ordonantie Pembentukan Gouvernemen ten Sumatra Borneo en de Grote Oost (stabld. 1938/1939)*. Pemerintahan atas ketiga *Gouvernemen ten* tersebut masing-masing dijalankan oleh seorang Gubernur atas nama Gubernur Jenderal, sehingga pada hakekatnya *Gouvernemen ten* dimaksud bersifat daerah administratif, bukan propinsi otonomi. Kemudian pada tahun 1938 keluarlah *besluit* (keputusan) Gubernur Jenderal (stabld. 1938/264) yang menetapkan

45. *Ibid.*

berlakunya ordonansi pembentukan Sumatra Borneo tersebut, yakni mulai terhitung tanggal 1 Juli 1938. Pada tahun itu juga keluarlah besluit Gubernur Jenderal (*stabl.* 1938/352) yang mengatur lebih lanjut pembentukan *Gouvernementen Sumatra Borneo en de Grote Oost*. Dibentuklah 2 (dua) keresidenan dalam *Gouvernementen Borneo* itu. Salah satu keresidenan yang dibentuk adalah *Residentie Westerafdeling van Borneo* dengan ibukota Pontianak.⁴⁶

Residensi Borneo Barat dibagi menjadi 4 (empat) *afdeling*, yaitu:

1. *Afdeling Pontianak*, dengan ibukota Pontianak. *Afdeling* ini dibagi lagi atas 3 *onderafdeling*, yaitu: *onderafdeling Pontianak* dengan ibukota Pontianak; *onderafdeling Mempawah* dengan ibukota Mempawah; dan *onderafdeling Landak* dengan ibukota Ngabang.
2. *Afdeling Singkawang* dengan ibukota Singkawang. *Afdeling* ini terbagi pula atas 3 (tiga) *onderafdeling*, yaitu: *onderafdeling Singkawang* dengan ibukota Singkawang; *onderafdeling Sambas* dengan ibukota Sambas; dan *onderafdeling Bengkayang* dengan ibukota Bengkayang.
3. *Afdeling Sintang* dengan ibukota Sintang. *Afdeling*

46.J.U. Lantaan, *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat* (Pontianak: Pemda Tk I, 1975), hlm. 259.

ini juga dibagi atas 3 (tiga) *onderafdeling*, yaitu: *onderafdeling Sintang* dengan ibukota Sintang; *onderafdeling Melawi* dengan ibukota Nanga Pinoh; dan *onderafdeling Boven Kapuas (Kapuas Hulu)* dengan ibukota Putussibau.

4. *Afdeling Ketapang* dengan ibukota Ketapang. *Afdeling* ini juga terbagi atas 3 (tiga) *onderafdeling*, yaitu: *onderafdeling Matan Hilir* dengan ibukota Ketapang; *onderafdeling Matan Hulu* dengan ibukota Nanga Tayap; dan *onderafdeling Sekadau* dengan ibukota Sekadau.⁴⁷

Setiap *onderafdeling* kemudian dibagi lagi atas sejumlah distrik yang dikepalai oleh seorang pejabat yang bergelar *Demang*. Perlu diketahui bahwa sesudah tahun 1912, struktur baru dalam pemerintahan kerajaan mulai diintrodusir. Jabatan tradisional seperti mangkubumi, laksamana, patih dan sebagainya dihapuskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sebagai gantinya diadakan jabatan *Demang*, yaitu semacam *districthoofd* (kepala distrik). *Demang* ini secara nominal tunduk kepada panembahan atau sultan, tetapi yang sebenarnya lebih banyak menerima perintah dari *gezaghebber* atau *Assistent Resident*.⁴⁸

Para *Demang* tersebut membawahi kepala-kepala *onderdistrict* yang disebut *petinggi* atau *penggawa*, yang

47. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm. 60.

48. *Ibid.*, hlm. 35.

selanjutnya membawahi kepala-kepala kampung atau *Temenggung* (kepala kelompok suku Dayak). Dengan demikian, seorang *Demang* adalah pejabat pemerintah yang secara otomatis menerima perintah dari asisten residen, walaupun secara nominal ia tunduk tetapi bersifat formalitas. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menurut teori hanyalah menjadi penasihat dan pengawas, tetapi pada kenyataannya tidak terlepas dari cengkeraman politik kolonial.

Sejalan dengan pembentukan *district* dan *onderdistrict* tersebut, maka petugas-petugas kepolisian ditempatkan pula di daerah-daerah untuk membantu memperkokoh kekuasaan dan menegakkan kewibawaan pemerintah kolonial. Mereka itu lebih dikenal dengan nama *veldpolitie* (polisi lapangan), yang melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan satuan-satuan militer Belanda. Pos-pos penting yang dulunya banyak ditempati satuan-satuan militer, kemudian ditempati oleh anggota-anggota polisi tersebut. Sebagian besar dari kesatuan kepolisian di daerah ini, ditempatkan di Pontianak dan Singkawang, yaitu 2 kota penting di daerah ini. Di Singkawang, pemerintah kolonial Belanda merasa perlu menempatkan sejumlah besar anggota kepolisian, mengingat banyaknya penduduk di kota itu dan masih labilnya situasi keamanan. Karena di Singkawang pernah terjadi kerusuhan anti pemerintahan yang digerakkan oleh orang-orang Cina, yang kemudian diikuti oleh suku Dayak dan orang Melayu. Di Singkawang terdapat dua orang komandan pos polisi orang Belanda, yang masing-masing

membawahi sejumlah anggota palisi lapangan dan reserse. Tugas lain dari pejabat kepolisian adalah bertindak sebagai *magistraat*, yaitu melaksanakan peradilan terhadap kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum-hukum dan perundang-undangan.⁴⁹

Pada mulanya perubahan tersebut mendapat tantangan dari pejabat tradisional, namun pemerintah kolonial Belanda tidak kehilangan akal. Mereka yang masih muda dan diyakini kesetiaannya dikirim ke Jawa untuk memperoleh pendidikan pada lembaga pendidikan pejabat pemerintahan. Dengan demikian, beberapa panembahan dan sultan yang masih muda diberi kesempatan melihat-lihat, meninjau dan belajar di Jawa. Anak-anak mereka didorong untuk masuk sekolah yang mulai banyak di buka setelah perang Dunia I berakhir, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Semua usaha tersebut dilakukan untuk mengurangi gejolak atau rasa tidak puas dikalangan pejabat tradisional yang dapat berakibat buruk pada pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya banyak tokoh-tokoh bangsawan yang ikut aktif dalam kegiatan pergerakan kebangsaan, dan golongan elite bangsawan merupakan kelompok golongan terpelajar yang ada di Kalimantan Barat. Di samping itu, pemerintah kolonial Belanda ingin menjadikan mereka sebagai orang-orang yang akan dapat menduduki jabatan dalam struktur pemerintahanh yang baru. Namun tidak semua dari mereka untuk menduduki

49. *Ibid.*, hlm. 17-18.

jabatan dalam pemerintahan. Sebagian diharapkan menjadi guru, anggota kepolisian dan sebagainya. Maka tidaklah mengherankan banyak diantara mereka yang dikirim ke Jawa memasuki *Normaalschool* (sekolah guru), Sekolah Pertanian, KWS (*Koningin Wihelmina School*= senacam sekolah tehnik).⁵⁰

Dewan Daerah pada saat itu memang belum ada. Sampai dengan berlakunya *Bestuurshervormingswet* (sistem baru pemerintahan) yang diundangkan dalam Lembaran Negara (*staasblad*) no. 276 tahun 1922. Dewan Swapraja gaya lama/tradisional masih berfungsi. Dalam Dewan Tradisional seperti itu, pejabat-pejabat senior kerajaan menjadi anggotanya. Dalam Kerajaan Landak misalnya, maka patih, mangkubumi, dan laksamana menjadi anggota tetap dewan kerajaan itu. Tetapi semua dewan swapraja tersebut dihapus setelah Undang-Undang Perubahan Pemerintahan berlaku. Fungsinya sebagai penasehat kepala pemerintahan (raja atau panembahan) digantikan oleh *gezaghebber* atau *Assistent Resident* sebagai wakil dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedang fungsinya sebagai badan pengadilan, digantikan oleh *magistraat* yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda, dan kemudian oleh *Landgerecht* (pengadilan negeri) menjelang pecahnya Perang Dunia II. Dewan Daerah baru ada setelah berlakunya Ordonansi Pembentukan Gubernemen Sumatra, Borneo dan Timur Besar tahun 1936. Sesuai dengan pedomannya, Dewan Daerah

50. *Ibid.*, hlm. 36-37.

tersebut terdiri dari para pemuka masyarakat dalam daerah itu ataupun orang yang dipandang dapat mewakili rakyat, dilihat dari pengalamannya dan keterampilannya. Sedangkan orang-orang Belanda yang tinggal atau berada dalam daerah dimana ada Dewan Daerah, dapat dipilih untuk duduk di dalamnya.⁵¹

Mengenai *Volksraad* (Dewan Rakyat), dapat dikemukakan bahwa sampai tahun 1938 daerah Kalimantan Barat tidak diwakili dalam Dewan Rakyat tersebut. Sesuai dengan *staasblad* no. 216 tahun 1926 maka wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi 12 daerah pemilihan *kieskringen*, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Kerajaan (Yogyakarta dan Surakarta), Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Timur, Minangkabau, Borneo, Celebes, Maluku, dan Sunda Kecil.⁵² Borneo mendapat satu jatah untuk mengirimkan satu wakil, tetapi karena daerah ini terdiri dari Borneo Bagian Barat, Borneo Bagian Selatan, dan Borneo Bagian Timur, maka diadakan penggiliran dalam menggunakan jatah tersebut. Setelah tahun 1938 daerah ini mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat.

51. *Ibid.*, hlm. 37-38.

52. *Ibid.*

D. Keadaan Partai/Organisasi

Mengenai organisasi dan kepartaian yang ada pada dasa warsa terakhir dari masa penjajahan Hindia Belanda, di Kalimantan Barat terdapat beberapa partai atau organisasi yang berkembang, antara lain:

1. Partai Indonesia Raya (PARINDRA);
2. Persatuan Anak Borneo (PAB);
3. Muhammadiyah.

1. Partai Indonesia Raya (PARINDRA)

Partai Indonesia Raya (Parindra) yang didirikan pada tahun 1935 dengan asas politiknya *incidentele* atau *utilistische politiek*, jadi tidak berpegang kepada asas kooperasi atau non-kooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luwes.⁵³ Kelahiran Parindra disambut dimana-mana termasuk di Kalimantan Barat. Komisariat Parindra Daerah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak beranggotakan tokoh-tokoh sebagai berikut:

1. Raden Koempoel, Kepala Kantor Pos Pontianak;
2. Hadjarati, Guru HIS;
3. Mustamir Ajun (Ajun Landbow Consulent);
4. A. Harahap, Kepala Pelabuhan Pontianak.

Keempat tokoh tersebut dibantu pula oleh pemuka-pemuka masyarakat kota Pontianak seperti: Raden Wariban dan

53.G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 59.

Doelhadji.⁵⁴

Pada tahun 1936 cabang pertama dari PARINDRA berdiri di kota Pontianak. Pada tahun 1937 berdiri cabang PARINDRA di Ngabang, dengan tokoh-tokohnya: Gusti Effendy, Pangeran Natakusuma, Mohammad Amir. Pada tahun itu juga berdiri pula cabang PARINDRA di Sambas, yang merupakan cabang PARINDRA terbesar di Kalimantan Barat. Cabang PARINDRA di Sambas mendapat dukungan dari keluarga sultan, dan pegawai-pegawai pemerintahan di Sambas dapat dikatakan banyak yang merupakan anggotanya. Pimpinan cabang PARINDRA Sambas antara lain: Machroes Effendy, Mursid Idris, Uray Amir, Ir. Soetjitro. Sambas pernah menjadi tempat diselenggarakannya konferensi daerah PARINDRA. Sedangkan di Mempawah pimpinan PARINDRA berada di tangan Mas Mohammad. Cabang PARINDRA Sintang dipimpin oleh Gusti Ismail. Di Sintang, seperti halnya dengan di Ngabang dan Sambas, PARINDRA mendapat banyak anggota. Pimpinan PARINDRA Sintang banyak dari kalangan bangsawan, seperti: Gusti Taufik, Gusti Mustafa. Sedangkan di kota Singkawang dan Pemangkat. dipimpin oleh Djenawi Thahir, Raden Jusuf, A.Muin, dan Tarnidji.⁵⁵

Selama berdirinya PARINDRA di Kalimantan Barat sampai datangnya Jepang, PARINDRA daerah Kalimantan Barat sudah 3

54. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm. 54.

55. *Ibid.*, hlm. 55.

kali mengadakan konferensi daerah. Konferensi pertama diadakan di Pontianak, yang kedua di Singkawang, sedangkan yang ketiga dilaksanakan di Sambas. Konferensi PARINDRA di Singkawang, memutuskan R. Mahmud Susilo Suwignjo diangkat sebagai ketua PARINDRA Wilayah Kalimantan Barat. Tokoh lainnya yang duduk dalam Pimpinan Wilayah, antara lain: Dr. R. Agus Djam, Dr. R. Sunarjo, Dr. Rubini, Dr. R.M. Abdurrachman Diponegoro, Dr. Ismail (Singkawang), dan Uray Amir Saffiudin (Mempawah).⁵⁶

Perjuangan PARINDRA semakin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat, bahkan ketika para eks Digulis kembali ke Kalimantan Barat ikut aktif dalam PARINDRA. Mereka antara lain: Gusti Sulung Lelanang, Gusti Mahmud Situt, Achmad Marzuki, Achmad So'od, H.M. Rais bin Abdurrahman, dan Gusti Hanzah. Sedangkan sebagai bagian yang bernaung di bawah PARINDRA, didirikan organisasi penuda, yaitu Surya Wirawan. Organisasi penuda PARINDRA tersebut mirip dengan organisasi kepanduan, yang mana anggotanya cukup banyak dan cabangnya ada di setiap daerah. Di antara pemimpin Surya Wirawan, yaitu: Gusti Ahmad, Subiakto, dan Rasib Abdurrahman.⁵⁷

56. Ansar Rachman, Ahmad Mansjur, Salijo, dan Staf Sendam XII/Tandjungpura, *Tandjungpura Berjuang: Sedjarah KODAM XII/Tandjungpura, Kalimantan Barat* (Pontianak: Sendam XII/Tandjungpura, 1970), hlm. 86-87.

57. *Ibid.*, hlm. 56. Syarif Ibrahim Alqarie dan Pandil Sastrowardoyo, *op. cit.*, hlm. 48.

2. Persatuan Anak Borneo (PAB)

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengetahui benar bahwa pengaruh PARINDRA sangat besar dalam masyarakat, dan merupakan partai terbesar yang pernah ada di daerah ini. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda berpikir untuk mengusahakan terbentuknya organisasi tandingan yang bersifat kedaerahan. Apabila PARINDRA dapat menghimpun semua golongan dan suku yang ada di daerah ini, dan karena itu pula corak nasionalismenya sangat kuat, maka pemerintah kolonial Belanda berharap bahwa organisasi yang akan dibentuk akan cukup kuat dan besar dengan menghimpun penduduk asli daerah ini. Pemerintah kolonial Belanda menghimbau dan membujuk Raden Muslimun Nalaprana seorang lulusan OSVIA, Demang Pontianak, untuk membentuk organisasi yang dikehendaki Belanda tersebut. Maka pada tahun 1936 didirikanlah Persatuan Anak Borneo (PAB).⁵⁸ Lambang Persatuan Anak Borneo (PAB) adalah gambar pulau Borneo, dengan ditengahnya terlukis gambar pohon karet dan kelapa. Anggotanya cukup banyak, berkat bujukan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Belanda terhadap orang-orang pribumi.

Namun Raden Muslimun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan PAB untuk menandingi PARINDRA. Raden Muslimun bahkan menghimbau tokoh-tokoh eks Digulis yang sudah kembali,

58. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *loc. cit.*

seperti: Gusti Sulung Lelanang, H. Rais dan lainnya untuk membantunya. Tujuan dari Persatuan Anak Borneo (PAB) adalah untuk membangkitkan rasa harga diri pada putera daerah, mendorong mereka belajar, agar jangan ketinggalan dengan saudara-saudara sebangsanya yang ada di daerah lain. Dengan PARINDRA, Raden Muslimun mengusahakan hubungan yang baik. Karena itu tidaklah mengherankan, ketika Raden Muslimun dicalonkan pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi anggota *Volksraad* sebagai wakil dari Kalimantan (wakil seluruh Kalimantan hanya satu), PARINDRA mendukungnya. Bahkan Raden Muslimun sempat menduduki jabatan sebagai anggota *Volksraad* selama 2 (dua) tahun (1940-1942) sampai jatuhnya Hindia Belanda.

3. Muhammadiyah

Proses berdirinya Muhammadiyah sebenarnya telah dirintis oleh 2 (dua) orang guru agama yakni: Manab dan Mohamad Akib, dari Sumatera Barat, sejak tahun 1925. Kedua tokoh tersebut merintis jalan "mengajarkan agama Islam menggunakan sistem dan metode Muhammadiyah". Cara kerja yang masih bersifat perseorangan ini, berlangsung dari tahun 1925-1932. Setelah kadernya cukup dewasa untuk bergerak, maka pada tahun 1932 lahirlah gerakan Muhammadiyah sebagai status, antara lain:

- a. Sei Bakau Kecil (Mempawah) dipimpin oleh H.M. Kurdi Dja'far;
- b. Singkawang dipimpin oleh M. Taufik;
- c. Sambas dipimpin oleh H.A. Malik So'od;

d. Pontianak dipimpin oleh Arsjad Annasar.

Setelah 4 tahun berdirinya cabang Muhammadiyah tersebut, tahun 1936 diadakanlah Konferensi Muhammadiyah se-Kalimantan Barat di Singkawang yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu: H. Badaawi dan A. Jatim.⁵⁹

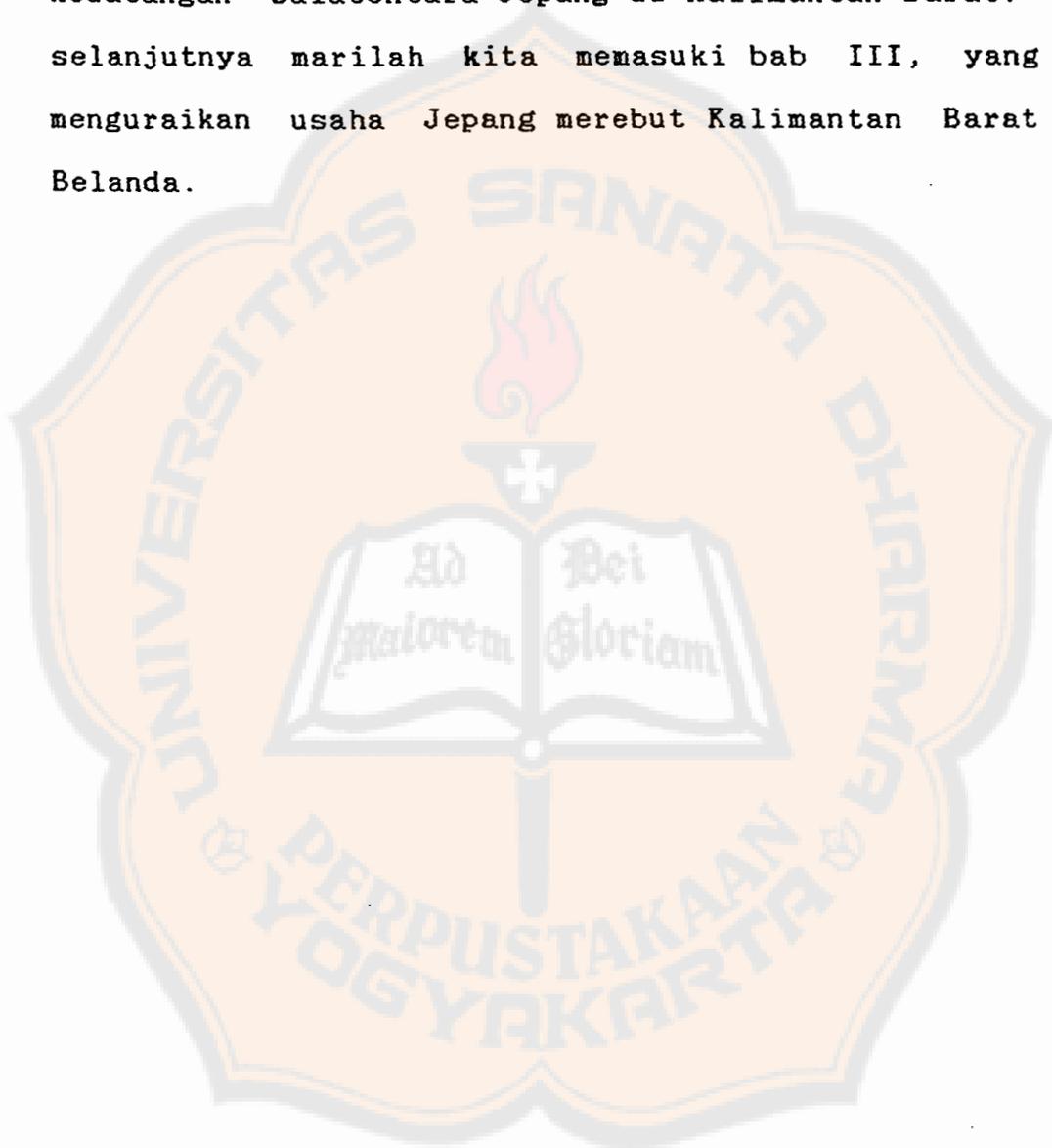
Bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah, berdiri pula organisasi pemudanya yang bersifat kepanduan, yakni *Hizbul Wathan (HW)*. Tujuan dari organisasi tersebut, adalah untuk membina dan mewakili kegiatan para pemuda Islam sambil berdakwah Islamiyah.⁶⁰ Keanggotaan Hizbul Wathan sangat terbatas di tempat yang terdapat Muhammadiyah, karena umat Islam menganggap Muhammadiyah terlalu kebarat-baratan. Muhammadiyah sempat mendirikan sekolah di Pontianak, tetapi pada jaman Jepang sekolah tersebut ditutup.

Setelah matinya Sarekat Islam (SI) di daerah ini, tidak ada lagi organisasi yang bernafaskan Islam yang berorientasi pada politik. Banyak tokoh Islam di daerah ini berpendapat bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda memang mencurigai setiap gerakan Islam, dan akan segera bertindak apabila ada gejala akan timbulnya partai yang bernafaskan Islam di daerah ini. Karena itu tidaklah

59. Ansar Rachman, Ahmad Mansjur, Salijo, dan Sendam XII/Tandjuungpura, *op. cit.*, hlm 86.

60. Syarif Ibrahim Alqadrie dan Pandil Sastrowardoyo, *loc. cit.*

mengherankan, banyak diantara tokoh pergerakan yang aktif dalam Partai Indonesia Raya (PARINDRA) atau Persatuan Anak Borneo (PAB). Keadaan tersebut berlangsung sampai kedatangan balatentara Jepang di Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya marilah kita memasuki bab III, yang akan menguraikan usaha Jepang merebut Kalimantan Barat dari Belanda.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

USAHA JEPANG MEREbut KALIMANTAN BARAT DARI BELANDA

A. Kegiatan mata-mata Jepang di Kalimantan.

Sesudah Perang Dunia I minat Jepang terhadap Indonesia bangkit. Alasan idil bangkitnya minat itu adalah ajaran Shintoisme tentang *Hakko-ichiu* yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia.⁶¹ Jepang sebagai bangsa yang telah maju mempunyai kewajiban untuk "mempersatukan" bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya. Khusus yang menyangkut bangsa Indonesia, ajaran *Hakko-ichiu* diperkuat oleh keterangan para antropolog Jepang sekitar tahun 1930 yang mengatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia itu serumpun. Karena itu tidaklah mengherankan, sekitar tahun 1930 kurang lebih 7000 orang Jepang tinggal di gugusan pulau-pulau di Indonesia. Mereka pada umumnya tinggal dimana perusahaan berkembang pesat, walaupun taraf hidup yang diperoleh lebih rendah menurut ukuran Amerika namun tinggi menurut ukuran Asia.⁶²

Kalimantan merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat tinggal orang-orang Jepang. Kehadiran orang-orang Jepang di Kalimantan Barat sudah diketahui sejak lama, jauh sebelum pecahnya Perang Asia Timur Raya. Sejak Perang

61.G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 66.

62.Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara (Sejarah Indonesia)* (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Dan Bahasa, 1967), hlm. 393.

Dunia I 1914-1918 sejumlah orang Jepang yang datang ke Kalimantan Barat telah membuka beberapa perusahaan di bidang pengolahan kayu, perkaretan, pertambangan dan lain sebagainya. Komoditas tersebut di Kalimantan Barat telah dikenal sebagai sumber alam yang amat potensial disamping sumber alam lainnya. Beberapa perusahaan besar milik orang Jepang seperti: Fukuyama, Kabushiki Kaisya, Nomura Trading Company, Nakahara Fuji Company, Nitisan cukup dikenal di Kalimantan Barat sebelum pecahnya perang.

Kegiatan perusahaan-perusahaan Jepang tersebut tidak semata-mata menyangkut soal perdagangan dan ekonomi saja, akan tetapi mereka juga bergerak dalam berbagai kegiatan mata-mata (spionase). Kegiatan tersebut berupa tukar menukar informasi antar sesama orang Jepang baik yang ada di Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan Barat seperti di Sarawak, Sabah, dan Sandakan di Kalimantan Utara. Dengan demikian penetrasi ekonomi sebagai unsur politik dan militer juga dilakukan perusahaan-perusahaan besar Jepang di bidang pertanian, kehutanan, dan pertambangan yang didukung oleh pemerintah Jepang.

Banyak informasi tentang situasi dan kondisi Kalimantan Barat yang sudah diketahui sebelumnya oleh pemerintah Jepang di Tokyo yang menyangkut pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Barat, baik tempat yang

63. Machroes Effendy, *Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat* (Jakarta, 1982), hlm. 49.

strategis maupun basis-basis kekuatan angkatan perang. Semuanya itu diperoleh melalui kegiatan mata-mata orang Jepang yang ada di Kalimantan Barat yang berkedok pengusaha. Ironis memang, seorang juru potret bernama M. Honda sanggup keluar masuk pedalaman Kalimantan Barat dengan berdalih sebagai seorang tukang potret dan penjual bunga. M. Honda mulai dengan mengambil gambar para bayi dan gadis, gambar para pembesar baik sipil maupun militer, sekaligus mengabadikan obyek-obyek yang dianggap strategis sebagai bahan informasi yang dikirim ke Tokyo.⁶⁴ M. Honda juga membuka cabang di kota Singkawang, Pemangkat, dan Sambas. Informasi dan dokumentasi sangat penting bagi Jepang yang ingin menjadikan kawasan Asia sebagai wilayah kekuasaan dan jajahannya.

Perusahaan kayu yang terbesar pada waktu itu ialah Sumotomo Kabushiki Kaisya yang dipimpin oleh Nagaishi. Ia dengan cukup lihai telah melakukan kontak-kontak pribadi dengan pegawai Belanda, orang-orang Arab maupun Cina bahkan dengan golongan ningrat di Kalimantan Barat. Maksud dari kontak pribadi yang dilakukan Nagaishi, disebabkan rasa cemburu orang Jepang terhadap hubungan yang begitu baik kelihatannya antara beberapa kerajaan dan golongan asing tersebut.

64.M. Yanis, *Kapal Terbang Sembilan: Kisah Pendudukan Jepang Di Kalimantan Barat* (Pontianak: Yayasan Panca Bhakti, 1983), hlm. 10.

Jepang mengetahui bahwa hak-hak atas pemilikan tanah-tanah kerajaan diberikan kepada orang-orang asing tersebut dengan perlindungan hukum, melebihi hak-hak yang pernah diberikan kepada golongan pribumi itu sendiri. Disamping itu Nagaishi ingin pula mengetahui dan mendapat informasi lebih jauh tentang gelar "*Kapitein der Chineezen*" di setiap kota untuk orang-orang Cina, maupun gelar "*Mayor der Arabieren*" bagi golongan Arab yang ada di Kalimantan Barat.⁶⁵

Kecemburuan Jepang terhadap hubungan yang baik antara beberapa kerajaan dengan golongan asing, baik itu Belanda, Cina, maupun Arab tentu dilatarbelakangi suatu kepentingan untuk mengimbang dominasi golongan tersebut dalam bidang pertahanan, perdagangan, serta perekonomian. Hal tersebut sangat penting bagi Jepang dalam usahanya untuk merebut dan menguasai daerah Kalimantan Barat yang kaya akan sumber alamnya.

Selain menjalin hubungan dengan segala lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, Nagaishi juga "menyediakan" gadis-gadis Jepang yang secara sengaja didatangkan dari Sandakan, Sabah, dan Sarawak untuk dijadikan pelacur, terutama di kota Pontianak dan Singkawang. Untuk daerah Pontianak, para pelacur itu berlokasi di Kampung Bali dalam rumah-rumah petak,

65. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950* (Pontianak, 1991), hlm. 77.

sedangkan di Singkawang lokasinya di Pasar Tengah dan Kebun Sayur.⁶⁶ Bahkan tidak sedikit gadis-gadis Jepang yang telah diambil dan dipelihara sebagai gundik oleh golongan ningrat/bangsawan di Sambas, Singkawang, dan Pontianak sebagai taktik mata-mata Jepang. Upaya Nagaishi ternyata memberikan hasil yaitu terjalinnya hubungan yang semakin baik antara orang-orang Jepang dengan para pejabat dan pegawai pemerintahan, pengusaha dari golongan Eropa, Cina, Arab maupun dengan golongan pribumi sendiri terutama kaum bangsawan. Dengan demikian menghilangkan kecurigaan mereka terhadap orang Jepang yang ada di Kalimantan Barat.

Dalam situasi dan kondisi yang menguntungkan tersebut ternyata Jepang memanfaatkan untuk menjaring berbagai informasi lebih jauh. Mereka mulai menjalin komunikasi dengan mendekati tokoh-tokoh pergerakan Kalimantan Barat yang anti kepada pemerintah kolonial Belanda, salah satunya Jeranding. Ia didekati Fukuyama, sebuah perusahaan pengolahan kayu yang tak segan-segan membiayai dan menerbitkan surat kabar "Borneo Barat Bergerak" yang diterbitkan sejak tahun 1922 dan dipimpin oleh Jeranding. Namun nasib media cetak itu tidak berlangsung lama, dilarang terbit oleh pemerintah kolonial Belanda karena pemberitaannya yang selalu menentang pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan, Jeranding ditangkap dan dibuang ke

66. Machroes Effendy, *op. cit.*, hlm. 50.

Boven Digul.⁶⁷

Dari kegiatan mata-mata dan hubungan yang baik Jepang di Kalimantan Barat telah berhasil menghilangkan rasa curiga Belanda terhadap Jepang. Bahkan masyarakat pribumi pun hampir dari semua lapisan tidak mersa curiga terhadap Jepang. Hal itulah yang memudahkan orang-orang Jepang untuk keluar masuk pedalaman Kalimantan Barat.

B. Masuknya Jepang Di Kalimantan Barat

Pada akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda 1941, kekuatan tentara Belanda di Kalimantan Barat terdiri dari kurang lebih 1 batalyon dibawah pimpinan Letnan Kolonel Mars dengan lokasi:

1. Kompi 1 dipimpin oleh Kapten Martin di Pontianak
2. Kompi 2 dipimpin oleh Kapten van Sprio di Sintang
3. Kompi 3 dipimpin oleh Kapten de Houde di Singkawang
4. Kompi 4 dipimpin oleh Kapten Touwen di Ketapang

Setelah pecah perang Asia Timur Raya, kekuatan ditambah dari Jawa dengan pasukan artileri dan pasukan kavaleri. Sedangkan dari Sumatera didatangkan pasukan gerilya istimewa 1 peleton, dan tambahan tenaga yaitu Letnan Kolonel Gortman. Lokasi pasukan pun diperluas yang meliputi Ketapang, Sukadana, Ngabang, Nanga Tayap, Sintang, Bengkayang, Pemangkat, Sambas, Sanggau Ledo, dan

67. Pemerintah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm. 78.

Pontianak. Kekuatan senjata bantuan untuk tentara Belanda di Kalimantan Barat adalah:

1. 1 peleton penangkis serangan udara.
2. 3 kompi bantuan anti tank, mortir dan senapan mesin berat.
3. 1 kelompok kendaraan berlapis baja.⁶⁸

Selain itu Komandan Teritorial Belanda di Kalimantan Barat menguasai 39 regu yang sesudah pecah perang Asia Timur Raya direorganisasikan menjadi 50 regu. Daya tembak dipertinggi dengan memperlengkapi mereka dengan senjata otomatis.

Sebelas hari setelah Jepang mengumumkan perang Asia Timur Raya, pada tanggal 19 Desember, pesawat terbang Jepang telah membombi kota Pontianak yang terkenal dengan "bom Sembilan"⁶⁹ karena bom yang dijatuhkan Jepang pada waktu itu berjumlah sembilan buah. Daerah yang menjadi sasaran pemboman adalah di sekitar Kampung Bali, jajaran Kampung Melayu, jalan Toapekong, dan Parit Besar dimana banyak terdapat orang-orang Cina. Pemboman yang dilakukan Jepang menyebabkan korban berjatuhan dan menimbulkan panik yang luar biasa dalam masyarakat. Bruder Bruno seorang guru dari HCS yang menyaksikan dan mengalami peristiwa tersebut mengatakan bahwa gedung sekolahnya di Kampung

68. Ansar Rachman, Ahmad Mansjur, Salijo, Staf Sendam XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 89.

69. Mawardi Rifai, *Peristiwa Mandor* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 26.

Bali mengalami kehancuran total. Sekitar 20 orang muridnya meninggal dunia dan sebagian besar luka berat dan ringan. Sedangkan Pastur A. Adikardjana yang menyaksikan peristiwa tersebut menyebutkan jumlah korban sekitar 2.500 orang.⁷⁰ Kabar dibomnya kota Pontianak segera menyebar ke seluruh pelosok Kalimantan Barat. Salah satunya kota Sambas, dimana banyak penduduk yang mengungsi ke hutan.

Pada tanggal 22 Desember 1941, Jepang kembali melakukan serangan atas kota Pontianak dan sekitarnya dan disusul dengan serangan berikutnya pada tanggal 27 Desember 1941. Walaupun serangan tersebut tidak sehebat serangan pertama pada tanggal 19 Desember 1941, tetapi rumah-rumah sakit yang ada di kota Pontianak sudah tidak dapat menampung banyaknya korban yang jatuh. Untuk mengatasi hal tersebut beberapa gedung bioskop dan gedung sekolah dijadikan tempat penampungan sementara para korban. Jumlah dokter dan obat-obatan sangat terbatas. Ketika itu di Pontianak hanya terdapat 5 orang tenaga dokter. Untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter, pemerintah Belanda mendatangkan bantuan 5 dokter dari pulau Jawa.

Residen v.d. Zwaal dan Komandan Vasqua mendapat kesulitan dalam menghadapi serangan Jepang tersebut. Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena tentara Hindia Belanda hanyalah tentara polisi yang ditujukan kepada

70. Machroes Effendy, *op. cit.*, hlm. 53.

keamanan dalam negeri yang hanya biasa bertempur terhadap rakyat yang tidak bersenjata, yang hanya biasa berpatroli dalam hubungan regu atau peleton. Dengan sejumlah pasukan dan para pegawai sipil Belanda, mereka berusaha keluar dari kota Pontianak untuk menggabungkan diri dengan serdadu KNIL yang sedang mempertahankan Sanggau Ledo sebagai pusat kekuatan angkatan udara pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan Barat. Di Sanggau Ledo meskipun tersedia penangkis serangan udara dan beberapa buah pesawat tempur, akan tetapi semuanya tidak sanggup menahan serangan udara tentara Jepang pada tanggal 27 Desember 1941. Dalam serangan tersebut Jepang mengerahkan 29 pesawat tempur dan dengan leluasa mengitari dan membon Paloh dan Sambas serta Mempawah.⁷¹ Walaupun 700 tentara Belanda yang ada di Kalimantan Barat sudah dibantu dengan brigade yang didatangkan dari Jawa dibawah pimpinan Letnan Kolonel A.L. Gortman, akhirnya pangkalan udara di Sanggau Ledo jatuh ke tangan tentara Jepang.

Pertempuran lainnya yang cukup sengit terjadi pada tanggal 26 Desember 1941. Ketika pesawat tempur Belanda dari Sanggau Ledo berusaha menyerang beberapa buah kapal perang di pantai Sentebang. Walaupun satu diantara kapal perang Jepang yang penuh dengan amunisi dapat ditenggelamkan, namun pasukan darat Jepang dari pasukan Yokosuka yang menerobos dari Sarawak tidak dapat dibendung

71.Mawardi Rifai, *op. cit.*, hlm. 27.

oleh pasukan Inggris-Belanda. Pasukan Inggris dibawah Komandan Lane kewalahan mendapat serangan Jepang tersebut, yang dengan mudah menguasai medan yang sudah diporakporandakan sebelumnya. Dalam pertempuran itu Jepang menewaskan 10 orang Perwira Menengah dan 230 orang serdadu Belanda. Sedangkan Jepang, mengatakan mereka kehilangan kurang lebih 100 orang prajurit.⁷² Ancaman serangan Jepang bertambah besar ketika Sarawak jatuh.

Pada tanggal 17 Januari 1942 terjadi pertempuran sengit di daerah pertahanan Seluas yang merupakan pintu gerbang ke daerah Kalimantan Barat. Yang mengakibatkan pasukan-pasukan KNIL terpaksa meninggalkan pertahanan mereka dan melarikan diri ke Bengkayang. Setelah diterima kabar bahwa sejumlah besar pasukan Jepang tengah bergerak dari Seluas ke arah barat daya, maka segeralah dilaksanakan bumi hangus terhadap lapangan udara Singkawang II. Setelah itu pasukan-pasukan KNIL mundur ke Sintang, gerak mundur pasukan ini dilindungi oleh pasukan yang ada di Sanggau.⁷³ Tetapi pasukan ini pun harus meninggalkan pertahanan mereka setelah mendapat serangan dari tentara Jepang.

Pendaratan pasukan Jepang pertama kali di Kalimantan Barat terjadi pada bulan Desember 1941, yang dilakukan di

72. Machroes Effendy, *op. cit.*, hlm. 54.

73. Djajusman, *op. cit.*, hlm 136. Lihat juga A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I: Proklamasi* (Bandung: Angkasa, 1977), hlm. 83.

Pemangkat yang terletak di sebelah utara kota Pontianak. Pendaratan itu menggunakan Landing Ship berhaluan dua, seluruhnya berkekuatan 5 kompi dan 12 kapal perang lainnya berada di tengah laut. Pasukan yang mendarat adalah angkatan darat yang bertugas menduduki daerah Kalimantan Barat, kemudian disusul oleh pasukan angkatan laut dalam jumlah yang lebih besar.⁷⁴ Pendaratan pasukan secara besar-besaran di Pemangkat, Singkawang, dan Ketapang terjadi pada 22 Januari 1942. Di Pemangkat mendarat pasukan ke-29 dari Sarawak sebanyak 3.000 serdadu menggunakan kapal perang Jepang melalui Tanjung Kodok, Pemangkat.⁷⁵

Pendaratan pasukan Jepang itu tidak mendapat perlawanan sedikitpun dari pasukan Belanda yang ada di Kalimantan Barat, yang memang sudah lumpuh akibat serangan lebih dahulu dari udara, darat, dan laut. Pasukan ke-29 ini sebagian menuju ke Singkawang, Mempawah, dan Pontianak. Beberapa pasukan KNIL yang masih ada, mencoba untuk bertahan di Gunung Mendereng yang terletak 45 km dari kota Singkawang dapat ditaklukan tentara Jepang. Setelah Pemangkat dan Singkawang direbut, tentara Jepang dibagi dua: sebagian bergerak ke selatan untuk bergabung dengan pasukan yang mendarat di muara sungai Kapuas, yang

74. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm. 74.

75. Machroes Effendy, *loc. cit.*

kemudian merebut kota Pontianak pada tanggal 2 Pebruari 1942, sedangkan sebagian lagi bergerak ke arah Timur dengan tujuan merebut pangkalan udara di Sanggau Ledo.

Di Mempawah, lima orang pejabat Belanda ditangkap, seorang diantaranya *Controleur Appel* langsung dibunuh, sedangkan yang lainnya digiring ke Pontianak. *Controleur Pontianak*, Dr. Knibbe, dimasukkan dalam tahanan, yang selanjutnya dipindahkan ke Miri. Sedangkan ketiga orang Belanda lainnya dipancung secara demonstratif di depan khalayak ramai di penyeberangan "Teng Seng Hie" pelabuhan kecil di Pontianak. Mayat korban di buang ke sungai Kapuas.⁷⁶ Tindakan yang dilakukan Jepang tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti rakyat.

Tentara Belanda yang ada di Pontianak sebagian melarikan diri ke Ngabang yang jaraknya kurang lebih 177 km sebelah timur kota Pontianak. Pada Waktu itu kota Ngabang belum diduduki tentara Jepang. Mereka lalu melarikan diri ke Sanggau Kapuas setelah mendengar kemungkinan tentara Jepang akan menyerang kota Ngabang. Sebelum melarikan diri, mereka menghancurkan jembatan Ngabang yang belum setahun diresnikan oleh pemerintah Belanda, yaitu pada bulan Juli 1941. Dari Pontianak tentara Jepang melanjutkan serangan melalui sungai Kapuas dan merebut kota-kota yang terletak di sepanjang Sungai

76. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm. 75.

Kapuas seperti: Tayan, Sanggau, Meliau, Sekadau, dan Sintang tanpa perlawanan yang berarti dari raja-raja dan panembahan. Mereka segera menyatakan tunduk dan setia kepada balatentara Jepang, dan bendera "Hinomaru" segera berkibar di daerah-daerah di Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya marilah kita memasuki Bab IV yang akan menguraikan keadaan rakyat Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang.



BAB IV
KEADAAN RAKYAT KALIMANTAN BARAT
PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

A. Bidang Pemerintahan

Pemerintahan militer terhadap wilayah-wilayah Indonesia yang diduduki, diatur oleh 2 (dua) dokumen pokok, yaitu: "Asas-asas mengenai pemerintahan di wilayah-wilayah Selatan yang diduduki" yang dirumuskan pada Konferensi Penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan dengan Kabinet pada tanggal 20 Nopember 1941, dan Persetujuan Pokok antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut mengenai pemerintahan militer di wilayah-wilayah yang diduduki", tertanggal 26 Nopember 1941.⁷⁷ Dari tanggal 2 Pebruari 1942 sampai 15 Juli 1942 pemerintahan di Kalimantan Barat di bawah kekuasaan Kepala Pasukan Angkatan Darat. Pada masa ini pemerintahan balatentara Jepang masih tetap mempergunakan orang-orang Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah militer Jepang kekurangan tenaga. Tindakan yang simpatik terhadap pegawai-pegawai bangsa Indonesia yang diangkatnya itu merupakan taktik untuk mempercepat konsolidasi kekuasaannya.

⁷⁷.Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang Di Indonesia* (Jakarta, 1979), hlm. 24. Lihat juga Arniati Prasedyawati Herkusumo, *Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat) Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Rosda Putra Jaya, 1984), hlm. 9.

Pemerintahan Angkatan Darat tidak berlangsung lama. Setelah pertengahan Juli 1942, tentara pendudukan Angkatan Darat diganti oleh Angkatan Laut. Masyarakat Kalimantan Barat menyebut pergantian pemerintahan itu dari Bintang ke Jangkar.⁷⁸ Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) membentuk *Minseifu* (Pemerintahan Sipil) dengan pusat di Makasar. Kantor bawahannya yang disebut *Minseibu* terdapat di tiga tempat, yaitu: Kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Daerah bawahannya meliputi *Syu*, *Ken*, *Bunken*, *Gun*, dan *Son*.⁷⁹ Untuk daerah Kalimantan Barat berada di bawah pemerintahan *Syu* yang sama dengan daerah Keresidenan. Daerah *Bunken* sama dengan Kabupaten, daerah *Gun* sama dengan Kewedanaan dan daerah *Son* sama dengan Kecamatan. Di daerah *syu*, *ken*, *gun*, dan *son* masing-masing diangkat *Syuutizico* (Residen), *Ken Karikan* (Bupati), *Gunco* (Wedana), *Fuku Gunco* (Camat), dan *Sonco* (Kepala Kampung).⁸⁰

Kota Pontianak dikepalai oleh seorang Walikota yang bergelar *Syico* sedangkan pejabat tertinggi *syu* di daerah

78. Wawancara dengan Syarif Yusuf Alkadrie di Pontianak, tanggal 11-7-1995. Wawancara dengan Urai Aliudin Yusfa di Pontianak, tanggal 23-7-1995. Wawancara dengan Machroes Effendy di Pontianak, tanggal 12-7-1995.

79. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 12.

80. Mawardi Rifai, *op. cit.*, hlm. 78.

ini bergelar *Syuutizico* yang bernama Izumi.⁸¹ Sejak Agustus 1942 daerah pemerintahan yang tertinggi adalah *syu*. Luas daerah *syu* sama dengan Keresidenan jaman Belanda tetapi fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residen dahulu merupakan daerah dari pembantu Gubernur (Residen). Sedangkan *syu* merupakan pemerintahan daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah pimpinan *Syuutizico* yang kedudukannya sama dengan seorang Gubernur. Seorang *Syuutizico* memegang kekuasaan tertinggi di daerah *syu* karena ia mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga dapat disebutkan sebagai satu otokrasi yang terdapat dari bawah sampai ke atas. Dengan demikian struktur pemerintahan *syu* berbeda dengan struktur pemerintahan *Residentie* pada jaman Hindia Belanda, karena *syuutizico* kekuasaannya sama dengan gubernur, meskipun daerah kekuasaannya seluas daerah *residentie*.⁸²

Di dalam melaksanakan tugasnya *syuutizico* dibantu oleh *cokankanbo* (Majelis Permusyawaratan *Cokan*) yang mempunyai 3 *bu* (bagian), yakni:

1. *Naiseibu* (bagian pemerintahan umum);
2. *Keizaibu* (bagian umum);

81.Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono (Penyunting), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Barat (1945-1949)* (Pontianak: Proyek Penelitian Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, 1992/1993), hlm. 13.

82.Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm 10-12.

3. *Keisatsubu* (bagian kepolisian).⁸³

Setiap syu dikepalai oleh Perwira yang paling tinggi pangkatnya di daerah itu, yaitu Letnan Kolonel. Daerah syu juga di dukung oleh komandan-komandan setempat, disamping bertugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan mereka juga diberi wewenang untuk memecat para pegawai Belanda serta membentuk pemerintahan setempat. Komandan Teritorial Angkatan Laut di Kalimantan Barat bernama Letnan Kolonel Yanakawa. Sedangkan yang memimpin Jawatan Kepolisian (*Keibitai*) disebut *Keisatsuco*. Kekuasaan Jawatan Kepolisian tidak seluas kekuasaan Kepolisian Militer (*Kempetai*) yang mengendalikan semua kegiatan-kegiatan pengawasan dan tindakan represif apapun yang terjadi di Kalimantan Barat. Perwira *Kempetai* yang paling ditakuti dan berpengaruh di Kalimantan Barat pada waktu itu, ialah: Kapten Yamamoto, Letnan Nagatani, dan Letnan Hayashi.⁸⁴

Setelah bulan Agustus 1942, jabatan-jabatan tertinggi yang diduduki oleh bangsa Indonesia semua diganti oleh orang Jepang. Jabatan yang disediakan untuk bangsa Indonesia hanya meliputi *gunco* dan *sonco* saja. Sedangkan jabatan sebagai Walikota di Makasar, Manado, Banjarmasin,

83. *Ibid.*

84. Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm 81. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono, *op. cit.*, hlm. 14

dan Pontianak diduduki oleh orang Jepang.⁸⁵ Namun tidak lama kemudian Jepang mengangkat kembali bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan tinggi, oleh karena Jepang mengalami kekurangan staf pegawainya. Hal itu disebabkan staf-staf yang dikirim untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan, kapal yang ditumpangi tenggelam kena torpedo Sekutu. Kejadian tersebut (tanpa diketahui oleh pihak Jepang pada waktu itu) menguntungkan bangsa Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam pemerintahan.⁸⁶ Adapun pejabat-pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan di Kalimantan Barat terdiri dari:

1. J.E. Pattisiana bekas *Hoodf Comies* pada kantor Residen Belanda di Pontianak, diangkat oleh Jepang sebagai *Soomu Kakarico* (Kepala Urusan Umum) pada kantor *syuutizico*;
2. Ng Nyap Soen, seorang Cina yang diangkat sebagai *Kakyo Taseikaico* (Kepala Urusan Orang Asing) pada kantor *syuutizico*;
3. Panangian Harahap, diangkat sebagai *Kyoiku Kakarico Singakukan* pada kantor *syuutizico*;
4. Notosoedjono, diangkat sebagai *Suito Kakarico* pada kantor *syuutizico*;

85. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 12-13.

86. *Ibid.*, hlm. 7.

5. C.W. Octavianus Lucas, diangkat sebagai *Sinzin Kakarico* pada kantor *syuutizico*;
6. Sawon Wongso Oetomo, diangkat sebagai *Sika Kakariro* pada kantor *syuutizico*;
7. Loemban Pea, diangkat sebagai *Kaico Politie*.⁸⁷

Selain itu, struktur pemerintahan yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda tetap dipertahankan. Para kepala swapraja yaitu para sultan dan panembahan, tetap diakui sebagai kepala atau pemimpin dari swapraja masing-masing. Namun para sultan dan panembahan berada dibawah pengawasan *Minseibu*, dan merupakan kaki tangan mereka. Dengan demikian, di setiap kerajaan ditempatkan seorang penasihat Jepang. Pengawasan terhadap aparatur pemerintahan diperketat, hal ini disebabkan karena kecurigaan dari pemerintahan pendudukan Jepang terhadap mereka. Karena para sultan dan panembahan adalah pejabat yang dulu mengabdikan kepada pemerintahan Hindia Belanda, maupun pengaruh mereka terhadap rakyatnya. Pertimbangan lain adalah luasnya daerah yang dirasa sulit untuk diawasi secara efektif oleh pemerintah militer Jepang.

87. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm. 81-82. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono (Penyunting), *op. cit.*, hlm. 14-15. Mawardi Rivai, *op. cit.*, hlm. 49-54.

B. Bidang Sosial Budaya

Rakyat Kalimantan Barat merasa gembira mendengar kedatangan balatentara Jepang, karena rakyat Kalimantan Barat masih terkesan oleh budi baik Jepang pada masa malaise akan barang buatan Jepang yang murah dan melimpah.⁸⁸ Pada mulanya sikap tentara pendudukan Jepang baik, apalagi setelah pada hari raya *Kigensetsu* (11 Pebruari) tahun 1942, mereka membebaskan pejabat-pejabat bangsa Indonesia dan kaum cerdik pandai pada saat mereka merebut daerah ini. Bahkan pimpinan balatentara Jepang mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengganggu kedudukan raja dan panembahan serta rakyat biasa. Namun keadaan tersebut berubah, ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Angkatan Darat ke Angkatan Laut.

Gereja Katolik dan Gereja Protestan tidak terlepas dari akibat pendudukan Jepang. Gereja dicurigai karena pada umumnya rohaniwan dan rohaniwatinya orang Belanda. Mereka dianggap sebagai musuh oleh pemerintah militer Jepang. Para rohaniwan maupun orang Belanda biasa atau sipil, harus melaporkan diri. Mereka kemudian ditangkap dan diangkut ke kamp tawanan perang di Sarawak, berjumlah kurang lebih 3000 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya tidak kembali lagi, meninggal dalam tawanan. Hanya dua orang pastor yang masih bebas karena mereka

88.Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm.75.

bukan orang Belanda, yaitu seorang pastor Cina dan seorang pastor Jawa.⁸⁹

Agama Islam tidak diganggu oleh pemerintah militer Jepang. Kaum Muslim tetap bebas menunaikan ibadahnya di mesjid, tetapi tidak berani berkumpul karena takut dicurigai oleh tentara Jepang. Namun demikian, golongan Islam secara relatif lebih leluasa bergerak dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi hal tersebut tidak berarti golongan Islam selalu patuh kepada pemerintah Jepang. Banyak hal-hal yang dipraktekkan oleh pemerintah militer Jepang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Di Pontianak, jikalau ada hari besar Jepang, setiap orang termasuk pemeluk Islam diharuskan menghormati Kaisar.⁹⁰

Golongan penduduk Cina pun merasa tidak senang dengan pemerintahan militer Jepang, namun mereka tidak berani secara terang-terangan mengakuinya. Hal itu tidaklah mengherankan, karena banyak toko dan gudang milik Cina diambil oleh tentara Jepang. Terkenal pada jaman itu dengan sebutan jaman "Cap Kapak", dimana tentara Jepang mendobrak toko dan gudang milik Cina dengan kapak.⁹¹

89.Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono (Penyunting), *op. cit.*, hlm. 34.

90.Wawancara dengan H.Ali Aswat Saleh di Pontianak, tanggal 19-7-1995. Wawancara dengan Mawardi Rifai di Pontianak, tanggal 21-7-1995.

91.Mawardi Rivai, *op. cit.*, hlm. 30. M. Yanis, *op. cit.*, hlm. 32-33.

Selain itu, orang-orang Cina di Kalimantan Barat khususnya yang tinggal di kota-kota, memang bersimpati kepada Kuo Min Tang.

Kehidupan rakyat semakin sulit, pemerintah militer Jepang mengatur segala kegiatan masyarakat. Alat komunikasi massa seperti radio dan film dikuasai oleh pemerintah militer Jepang. Masyarakat tidak diperbolehkan memiliki radio, dan radio hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja yang kesetiannya kepada pemerintah militer Jepang tidak diragukan. Walaupun memiliki radio tetapi rakyat hanya bisa menerima siaran yang disiarkan oleh stasiun radio *Hosokyoku* (stasiun pemancar radio) milik pemerintah militer Jepang. Pemerintah Jepang juga menempatkan pesawat radio umum pada tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul, atau pada persimpangan jalan yang strategis di kota-kota. Di tempat semacam itu selalu terdapat apa yang di sebut sebagai *radio to*, ialah kotak bertonggak untuk meletakkan pesawat radio umum itu.⁹² Siaran yang dipancarkan oleh Pontianak Hosokyoku adalah berita atau siaran yang telah diperiksa oleh pemerintah militer Jepang, yang tentu isinya mendukung atau tidak merugikan Jepang. Pontianak Hosokyoku ini dipimpin oleh Mayor Matsuda yang dibantu oleh Sin Meo dan Unno, serta pegawai lainnya bangsa Indonesia. Kemudian jabatan Kepala

92. Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo (ed.), *op. cit.*, hlm. 77.

diganti oleh Mitsu, lulusan Universitas Jerman.⁹³

Kecuali siaran radio, media komunikasi lain yang diawasi pemerintah militer Jepang adalah sebuah koran lokal, yang dinamakan *Borneo Shimbun*. Surat kabar ini seakan-akan merupakan kelanjutan dari surat kabar yang telah ada di Kalimantan Barat menjelang jatuhnya pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu surat kabar Borneo Bergerak.⁹⁴

Rakyat juga diharuskan memberi hormat kepada semua orang Jepang, dan juga ada beberapa tempat tertentu di dalam kota. Di Sambas, setiap orang termasuk anak sekolah harus melakukan *seikeirei* (memberi hormat dengan membungkukkan badan ke arah timur laut) terhadap *Yasukuni Jinja* yang merupakan tempat abu tentara Jepang yang meninggal dalam peperangan.⁹⁵ Rakyat juga harus memberikan penghormatan kepada para *heitaisan* (serdadu) Jepang di mana saja mereka berada termasuk di gardu-gardu penjagaan. Bahkan jika di gardu jaga tidak ada serdadunya, rakyat juga harus memberikan hormat. Bagi yang tidak melakukan penghormatan akan mendapatkan pukulan dan tendangan dari

93. Ja' Achmad, *Kalimantan Barat Dibawah Pendudukan Tentara Jepang* (Pontianak: Proyek Rehabilitasi Dan Perluasan Museum Kalimantan Barat, 1977/1978), hlm. 13.

94. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono, *op. cit.*, hlm. 24.

95. Wawancara dengan Munawar Kalahan di Pontianak, tanggal 23-7-1995. Wawancara dengan M. Yanis di Pontianak, tanggal 21-7-1995.

serdadu Jepang.

Di pedesaan, pemerintah militer Jepang mengumumkan larangan menyimpan senjata. Dengan demikian, penduduk dilarang memiliki senjata untuk berburu dan senjata-senjata lainnya. Padahal berburu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan dan tidak sekadar penyaluran minat atau hiburan saja. Sejak saat itu praktis penduduk pedalaman tidak dapat lagi berburu, dan masyarakat pedalaman tidak senang dengan larangan tersebut. Namun secara sembunyi-sembunyi masih terdapat orang-orang yang menyimpan senjata, dengan resiko dapat dihukum mati kalau diketahui oleh tentara Jepang. Selain itu, rakyat juga dilarang mengadakan pesta perkawinan ataupun kenduri. Alasan pemerintah militer Jepang, karena kenduri atau pesta perkawinan tidak ekonomis. Dan juga rakyat dituduh hanya membuang waktu, yang sebenarnya dapat digunakan untuk *kinrohoshi* (kerja bakti).

Walaupun demikian dari sisi pandangan yang lain, pemerintah militer Jepang sangat menyenangi penuda-penuda pelajar, dan hal ini sangatlah berbeda dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jikalau pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk dapat masuk sekolah adalah suatu kebutuhan yang begitu langka, justru pada masa pemerintahan militer Jepang sebaliknya.

Di kota Pontianak terdapat Sekolah Menengah yang bernama *Futzu Cuugakko*. Kepala sekolah yang pertama adalah

orang Jepang yang bernama Prof. Murakawa.⁹⁶ Sedangkan sekolah-sekolah yang sederajat dengan *Vervolgschool* (Sekolah Pribumi Lanjutan), yaitu: *Hollands Inlandsche School* (Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda), *Hollands Chinese School* (Sekolah Cina Berbahasa Belanda), *Europesche Lagere School* (Sekolah Rendah Belanda) diintergrasikan menjadi satu Sekolah Rendah, yaitu *Kokumin Gakko* (Sekolah Rakyat). Sekolah Desa menjadi Sekolah Pertama. Oleh karena itu terdapat Sekolah Rakyat 6 tahun termasuk Sekolah Pertama. Di setiap ibukota kabupaten terdapat Sekolah Rakyat atau Sekolah Pertama, seperti di Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, dan Ketapang.⁹⁷

Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang pendidikan tingkat dasar dijadikan satu macam saja yakni Sekolah Dasar 6 tahun. Sebenarnya pemerintah militer Jepang mengadakan penyeragaman itu adalah hanya untuk memudahkan pengawasan sekolah-sekolah tersebut, baik dalam isi maupun dalam penyelenggaraannya. Ternyata kemudian bahwa penyeragaman tersebut menguntungkan bangsa Indonesia, terutama dilihat dari segi pendidikan itu sendiri yakni menghilangkan diskriminasi.

Selain itu pemerintah militer Jepang juga membuka sekolah lanjutan, antara lain: *Syoto Chugakko* (Sekolah

96.M. Soenyata Kartadarmadja dan Sutrisno Kutoyo (Penyunting), *op. cit.*, hlm. 57.

97.*Ibid.*, hlm. 57-58.

Menengah Pertama), *Sinamakoo Kiyooiin Yousaizyo* (Pendidikan Guru Sekolah Negeri, dan *Normaal School* yang diubah menjadi *Sihang Chugakko*.⁹⁸ Di kota Pontianak, pada waktu di buka pendaftaran bagi calon guru berjumlah kurang lebih 101 orang, dan mereka pada umumnya diasramakan (Gereja Katedral sekarang). Di samping itu, dibuka juga Sekolah Tehnik (*Kogyo Gakko*), Sekolah Dagang Kecil (*Syogo Gakko*), dan Sekolah Pertanian (*Nogyo Gakko*) serta Sekolah Pertukangan (*Syokko Gakko*).⁹⁹

Sebelum memulai pelajaran, para murid diharuskan mengikuti serangkaian upacara seperti: upacara bendera, upacara menghormat *Tenno Heika*, upacara mengheningkan cipta, upacara sumpah pelajar, dan selanjutnya melakukan *taiso* (senam pagi).¹⁰⁰ Sebagian besar murid-murid diberi latihan militer (*kyoren*) dan kerja bakti (*kinrohoshi*) serta diajarkan lagu-lagu Jepang seperti *Kimigayo* lagu kebangsaan Jepang yang hanya boleh dinyanyikan dalam upacara resmi dan lagu setengah resmi lainnya seperti: *Umiyu Kabu* dan *Mita Mi Ware*. Selain itu untuk anak-anak

98. Team Penyusun Monografi Daerah Kalimantan Barat, *Monografi Daerah Kalimantan Barat* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1976), hlm. 49.

99. Wawancara dengan H.M. Ali As di Pontianak, tanggal 21-7-1995. Wawancara dengan H.M. Baroamas Jabannng Balunus di Pontianak, tanggal 20-7-1995.

100. Wawancara dengan Stephanus Ngo Lahay di Pontianak, tanggal 23-7-1995. Wawancara dengan Hamdy Moursal di Pontianak, tanggal 23-7-1995.

diciptakan lagu-lagu seperti: *Heitaisan, Hamabe no uta, Haha no uta, Sino no Yoru*, bahkan lagu yang sifatnya menghina musuh juga diciptakan seperti lagu *Warera no Teki* (musuh kita).¹⁰¹ Murid-murid digembleng sedemikian rupa agar mereka "bersemangat Jepang" (*Nippon Seishin*).

Pelajaran bahasa Jepang secara intensif diberikan kepada guru, siswa, dan para pegawai, karena kemahiran berbahasa Jepang menjadi ukuran bagi seseorang untuk dianggap bersimpatik kepada pemerintah pendudukan Jepang. Kemahiran berbahasa Jepang dikaitkan dengan kenaikan tingkat, jabatan dan gaji, bahkan mereka yang berhasil lulus menempuh suatu tingkatan dari bahasa Jepang akan memperoleh tunjangan ekstra setiap bulannya. Kepada pegawai negeri yang lulus ujian bahasa Jepangnya akan diberikan tambahan gaji sebesar Rp. 5,- untuk setiap tingkatan.¹⁰² Tujuan Jepang adalah untuk menjepangkan seluruh penduduk Kalimantan Barat melalui bahasa Jepang.

Pemerintah pendudukan Jepang tidak membeda-bedakan golongan dalam memberikan kesempatan untuk menerima pendidikan, walaupun sekolah yang ada sangat terbatas. Bahkan guru-guru yang tidak bisa mengajar di ELS dan HIS, pada pemerintahan pendudukan Jepang bisa mengajar di semua Sekolah Rakyat sehingga menambah kepercayaan diri sendiri

101. Ja' Achmad, *op. cit.*, hlm. 10.

102. *Ibid.*, hlm. 11. Lihat juga Asmadi, *Pelajar Pejuang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 30.

dan tidak ada diskriminasi.

Selain dalam bidang pendidikan, pemerintah pendudukan Jepang juga memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menjadi *Kaigun Heiho* (Prajurit Pembantu pada Angkatan Laut). Ada pula barisan yang dinamakan *Booi Tei Sin Tai* (senacam pasukan berani mati). Mereka dilatih baris berbaris dan diberi senapan kayu yang dibawa kemana mereka pergi, yang bertujuan untuk berjaga-jaga terhadap serangan Sekutu.¹⁰³ Penguasa Jepang juga membentuk *Seinendan* (Barisan Pemuda), yang mana setiap Bunken Kanrikan diharuskan mengirimkan pemuda-pemuda ke Pontianak untuk dilatih kemiliteran. Dari Landak yang mengikuti latihan tersebut antara lain: Gusti A. Hamid, Abdulhamid Mersib, Hasan Basri serta 2 pemuda Cina. Latihan kemiliteran dipimpin oleh pensiunan Perwira Jepang bernama Norio Tsuchimochi.¹⁰⁴

Selanjutnya di Ngabang dibentuk pasukan *Seinendan* sebanyak 3 *buntai* (peleton), yaitu:

1. Dai Ichi Buntai dipimpin oleh G. Lagum (Dancho);
2. Dai Ni Buntai dipimpin oleh Digul Kadarudin (Dancho);
3. Dai Sam Buntai dipimpin oleh Sa' aman (Dancho).

103. Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949 Djilid Pertama* (Bandjarmasin: Jajasan Lektur Lambung Mangkurat, 1961), hlm. 59.

104. Ya' Syarif Umar dan Gusti Abdul Hamid, *Sejarah Singkat Perjuangan Rakyat Landak* (Pontianak, 1988), hlm. 15.

Sedangkan Dancho untuk Bunken Karikan Landak dipimpin oleh Gusti A. Hamid dibantu oleh 2 orang wakil, yaitu: A. Hamid Mersib dan Hasan Basri.¹⁰⁵

C. Keadaan Ekonomi

Pada permulaan pendudukan balatentara Jepang di Kalimantan Barat, di bawah Angkatan Darat perdagangan tidak diganggu. Angkatan Darat tidak melarang terjadinya transaksi perdagangan antara penduduk dan pedagang. Namun kemudian, pada masa pemerintahan Angkatan Laut perdagangan dilarang, baik perdagangan antar *syu* maupun perdagangan antar pulau. Bahkan jika ada pedagang yang menjual barang dagangannya kepada penduduk dapat ditangkap oleh tentara Jepang.

Pengawasan perdagangan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang berakibat macetnya perdagangan, terutama pelayaran baik antar daerah maupun antar pulau. Pesawat dan kapal pengintai Angkatan Laut Jepang selalu siap menghancurkan setiap kapal yang melakukan pelayaran tanpa seijin tentara Jepang. Kalau ada kapal motor yang berlayar, biasanya milik pemerintah pendudukan Jepang.

Bahan-bahan pokok dikuasai oleh pemerintah pendudukan Jepang. Rakyat mengusahakan sendiri bahan makanannya karena bahan-bahan pokok dari luar daerah tidak dapat dimasukkan. Sama sekali tidak ada usaha untuk menjual

105. *Ibid.*

kebutuhan hidup sehari-hari kepada orang lain, karena hasil yang ada hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, bahkan kurang. Rakyat pada umumnya makan "berandau", yakni nasi dicampur dengan ubi atau talas.¹⁰⁶ Tidak hanya rakyat biasa yang makan "berandau" ini, kalangan bangsawan pun ada yang makan makanan ini. Rakyat dapat memperoleh bahan makanan kalau antri itupun terbatas, sisa dari kebutuhan tentara Jepang. Untuk itulah pemerintah pendudukan Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan "Kumiai", yaitu suatu badan yang menyelenggarakan pembagian bahan makanan baik untuk para pegawai maupun untuk tentara Jepang sendiri.¹⁰⁷ Namun "Kumiai" inipun mendapat pengawasan dari pemerintah pendudukan Jepang, kalau badan ini dalam menyelenggarakan pembagian bahan-bahan makanan dan pakaian bertentangan dengan kebijakan dan kemauan Jepang, badan ini dapat dibubarkan.

Perkebunan karet dan kelapa, pada masa pendudukan Jepang banyak yang ditebang oleh penduduk karena hasilnya hampir tidak laku untuk dijual. Kalaupun ada, hanya sedikit karena tidak boleh dibawa keluar daerah, sehingga kedua hasil perkebunan tersebut tidak bermanfaat. Demikian

106. Wawancara dengan Ja' Achmad di Pontianak, tanggal 19-7-1996. Wawancara dengan Jimmi Mohammad Ibrahim di Pontianak, tanggal 20-7-1995.

107. Kementerian Penerangan (ed.), *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan* (Djakarta, 1953), hlm. 178.

pula perkebunan-perkebunan karet di pedalaman hampir semuanya ditutup. Padi dan jagung hasil usaha petani juga harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Petani yang sebelumnya bebas menanam apa saja di tanah garapannya, harus menanam tanaman yang sesuai dengan ketetapan penguasa Jepang, dan hasilnya harus diserahkan untuk kepentingan peperangan.

Pemerintah pendudukan Jepang juga meminta kepada penduduk untuk menyumbangkan perhiasannya berupa logam mulia atau emas, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan. Dengan demikian, kemenangan akhir perang Asia Timur Raya bisa dipercepat. Banyak penduduk di desa maupun di kota yang percaya pada bujukan pemerintah pendudukan Jepang, bahkan ada yang memandang Jepang dengan kekaguman. Hal itu tidaklah mengherankan, karena penduduk dapat ditangkap jika mempunyai perhiasan, tetapi tidak menyerahkannya kepada Jepang. Perhiasan di istana pun tidak luput dari "perhatian" Jepang, terutama di Sambas dan Pontianak, yang semuanya demi kepentingan perang.¹⁰⁸

Pemerintah pendudukan Jepang membutuhkan tenaga rakyat untuk menunjang keperluan perangnya. Kepada setiap penduduk diwajibkan melakukan *kinrohoshi* (kerja bakti) untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan Jepang, seperti: membersihkan got, memperbaiki jembatan,

108. Wawancara dengan Syf. Chalijah Alkadrie di Pontianak, tanggal 18-7-1995. Wawancara dengan Ya' Syarif Umar di Pontianak, tanggal 12-7-1995.

membantu pembuatan lapangan terbang dan sebagainya. Perusahaan Jepang seperti Nomura, Sumitomo banyak mempekerjakan tenaga rakyat secara paksa. Tenaga rakyat dikerahkan untuk membuat lapangan udara Sungai Durian (sekarang Supadio). Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan tiap sekolah lanjutan yang ada di kota Pontianak diatur secara bergiliran untuk melakukan *kinrohoshi* di sungai Durian, kadang-kadang setengah bulan sekali atau seminggu sekali.¹⁰⁹ Perusahaan Nomura juga mengusahakan penambangan intan di desa Pantek sekitar Ngabang, yang mengerahkan tenaga rakyat tanpa memperhatikan kesehatan tenaga yang dikerahkan. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang berhasil mencetak bangsa kuli tanpa dibayar di Kalimantan Barat.

D. Keadaan Politik

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Kalimantan Barat terdapat perkumpulan pemuda dan organisasi yang cukup menonjol dan berpengaruh dalam masyarakat. Diantaranya, seperti: Partai Indonesia Raya (Parindra), Muhammadiyah, Persatuan Anak Borneo, Surya Wirawan, Hizbul Wathon. Tetapi pada masa pendudukan balatentara Jepang organisasi politik dan perkumpulan pemuda tersebut dibubarkan, dan selanjutnya segala kegiatan organisasi politik dalam bentuk apapun dilarang.

109. Ja' Achmad., *op. cit.*, hlm. 12.

Pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 20 Maret 1942 mengumumkan Undang-Undang No. 3 yang melarang segala macam bentuk pertemuan, pergerakan anjuran atau propaganda yang menyangkut hal-hal yang mengenai peraturan dan susunan negara. Undang-undang tersebut diberi penjelasan antara lain menyatakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk sementara waktu, untuk mencegah timbulnya kekuatan politik di Indonesia, dan agar rakyat memikirkan sedalam-dalamnya bagaimana cara bekerjasama dengan pemerintah pendudukan. Disebutkan pula bahwa pemerintah Jepang tidak mempunyai niat untuk memperbudak rakyat Indonesia seperti yang dilakukan Belanda.¹¹⁰ Maksud Jepang adalah untuk menyadarkan atau menghidupkan kemakmuran rakyat. Tentu saja hal ini dilakukan Jepang untuk mendapat simpati dari rakyat.

Adanya larangan tersebut tidak membuat para pemimpin pergerakan di Kalimantan Barat kehilangan akal mencari jalan supaya untuk tetap melanjutkan perjuangan. Dipelopori Notosoedjono bekas Ketua Komisariat Parindra Kalimantan Barat dan Dokter Roebini pada tanggal 24 Mei 1942, mereka membentuk *Nissinkai* yang artinya Badan Pembina Pemuda dan Masyarakat. Pembentukan perkumpulan tersebut direstui oleh Komandan Teritorial Angkatan Laut

110. Arniati Prasedyawati Herkusumo, *loc. cit.* Lihat juga Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 121.

Letnan Kolonel Yama Kawa dan Perwira Senior Kempetai yang paling berpengaruh dan ditakuti, seperti: Kapten Yamamoto, Letnan Nagatani, dan Letnan Hayashi.¹¹¹

Dalam kegiatannya *Nissinkai* mendapat bantuan dan fasilitas yang penuh dari pemerintah pendudukan Jepang. Dengan adanya *Nissinkai*, maka pemerintah pendudukan Jepang mengharapkan organisasi tersebut dapat mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuda untuk dipersenjatai dan dimanfaatkan untuk mencapai kemenangan perang. Sebagian dari mereka dilatih menjadi Heiho namun tidak banyak dari mereka yang dipilih mejadi tentara Jepang.

Melihat kekejaman Pemerintah Militer Angkatan Laut Jepang, maka beberapa tokoh pergerakan dan para pemuda mulai mengadakan pergerakan menentang pemerintah militer Jepang. Untuk selanjutnya marilah kita memasuki Bab V yang menguraikan perjuangan rakyat Kalimantan Barat menentang pendudukan Jepang.

111.Mawardi Rivai, *op. cit.*, hlm. 42. Ja' Achmad, *op. cit.*, hlm. 21. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono, *op. cit.*, hlm. 37.

BAB V

USAHA RAKYAT KALIMANTAN BARAT

MENENTANG PENDUDUKAN JEPANG

A. Peristiwa Mandor merupakan perwujudan perlawanan rakyat Kalimantan Barat terhadap Jepang.

Melihat kekejaman Pemerintah Angkatan Laut Jepang terutama penindasan, penganiayaan dan kerja paksa yang sangat berat, maka beberapa tokoh pemuda dan pimpinan pergerakan secara diam-diam mengadakan perundingan rahasia mencari jalan bagaimana caranya memanfaatkan Organisasi *Nissinkai* untuk meneruskan perjuangan. Kemudian diadakan "gerakan bawah tanah" yang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas *Nissinkai* karena yang menjadi anggota gerakan bawah ini juga anggota *Nissinkai*. Tujuan gerakan bawah tanah tersebut, untuk mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuda agar memelihara dan memupuk semangat perjuangan, dan mengusir bala tentara Jepang dari Kalimantan Barat.

Namun Penguasa Jepang sudah mulai mencurigai setiap gerak gerik masyarakat Kalimantan Barat, terutama kaum pelajar, raja-raja, melalui berbagai informasi yang didapat dari kaki tangannya, tentang adanya aksi-aksi gelap yang merugikan pemerintah militer Jepang. Kecurigaan itu dikuatkan pula dengan adanya hubungan kaum pergerakan yang hendak membantu pihak Sekutu. Maka pada bulan Oktober 1942 *Nissinkai* dibubarkan oleh Pemerintah

Angkatan Laut Jepang, sebab pemerintah militer Jepang sudah mencurigai Nissinkai yang telah berpura-pura pro Jepang padahal menggalang perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Sejak Nissinkai dibubarkan para tokoh pergerakan memanfaatkan organisasi Pemuda Muhammadiyah yang bersifat keagamaan, sebagai wadah untuk melanjutkan perjuangan melawan pemerintah Jepang.¹¹²

Gerakan bawah tanah itu dalam usaha menentang pemerintah militer Jepang, berjumlah enam puluh sembilan orang, karena itu dinamai Gerakan Enam Sembilan.¹¹³ Gerakan bawah tanah itu di pelopori oleh J.E. Pattisiana bekerjasama dengan Pangeran Adipati (putra mahkota Kesultanan Pontianak), serta Ng Nyiap Soen yang senantiasa menunggu kesempatan untuk mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan bawah tanah ini memakai sandi "Dum Spiro-Spiro" yang artinya bergerak selagi bernafas.¹¹⁴ Pada bulan Desember 1942, J.E. Pattisiana, Panangian Harahap, Pangeran Adipati bermaksud akan mengangkat senjata melawan Jepang, namun maksud tersebut tidak mendapat dukungan dari orang-orang Cina. Rencana tersebut pun dibatalkan. Orang Cina tidak mau mendukung sepenuh

112. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op.cit.*, hlm. 92. Machroes Effendy, *op.cit.*, hlm. 67.

113. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail dan Wijoso Tjitrodarjono, *op.cit.*, hlm. 38. Lihat juga *Majalah Gatra*, tanggal 22 Juli 1995, hlm. 51.

114. Mawardi Rifai, *op.cit.*, hlm. 51. Lihat juga *Majalah Sarinah*, tanggal 2 September 1985, hlm.12.

hati karena mereka menunggu situasi yang menguntungkan mereka.

Pada tanggal 7 Mei 1942, Jepang terpukul di dalam pertempuran laut Karang dalam usahanya menguasai Australia. Pertempuran tersebut ternyata merupakan titik balik bagi panah penyerbuan Jepang yang semula dengan cepat meluncur dari busurnya. Sejak itu, panah tersebut berbalik kembali ke utara. Orang-orang Cina di Kalimantan Barat pun tiba-tiba menyatakan mendukung dan ikut dalam usaha merencanakan perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Pada permulaan tahun 1943 datang di Pontianak rombongan dari Bajarmasin antara lain dokter Susilo dan Ir. Makaliway, untuk mengadakan pertemuan dengan dokter Roebini dan tokoh pergerakan lainnya untuk menyatukan tekad bekerjasama mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Mereka merupakan utusan dari mantan Gubernur Pemerintah Hindia Belanda Kalimantan Selatan yaitu Dr. B.J. Haga, yang menyatakan bahwa perlawanan bersenjata di Kalimantan Selatan telah siap di laksanakan.¹¹⁵ Kedatangan Dr Susilo dan Ir. Makaliway sangat berpengaruh dikalangan rakyat Kalimantan Barat, untuk berjuang menentang pemerintah militer Jepang dan menuntut kemerdekaan.

Pada akhir Maret 1943 Sultan Pontianak Muhammad Alkadrie sangat terkejut mendengar rencana kaum pejuang

115.Machroes Effendy, *op.cit.*, hlm. 57

yang sangat ekstrim, yang bermaksud menghapus 12 Kesultanan dan Panembahan apabila Kalimantan Barat merdeka. Oleh karena itu, Sultan Pontianak menyatakan akan turut ambil bagian dalam usaha menentang pemerintah Jepang. Pada awal April 1943, Sultan Muhammad Alqadrie mengundang para sultan dan panembahan yang ada di Kalimantan Barat untuk mengadakan pertemuan agar mengambil bagian dalam rencana menentang pemerintahan Jepang. Undangan tersebut disetujui para sultan dan panembahan. Sementara itu, J.E. Pattisiana mempergunakan kesempatan tersebut untuk bertemu dengan para sultan dan panembahan. Pertemuan tersebut di maksudkan untuk membuat anggaran dasar dari "Negeri Rakyat Kalimantan Barat (NRKB)", dan rencana perlawanan terhadap pemerintah Jepang telah disiapkan, serta mereka berjanji akan mengangkat senjata melawan Jepang.¹¹⁶

Gerakan bawah tanah itu kemudian meningkat lagi dengan rencana mendirikan pemerintahan sendiri yakni "Negeri Rakyat Kalimantan Barat" yang bertujuan, akan membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, tak terkecuali penjajah Hindia Belanda. Dari hasil pertemuan rahasia yang diselenggarakan di beberapa tempat, di putuskan untuk membentuk kabinet dengan mengangkat Pangeran Adipati sebagai Presiden dan J.E.Pattisiana

116. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op.cit.*, hlm. 94

sebagai Wakil Presiden serta dibantu oleh 18 orang menteri. Di antara golongan Cina pun ikut ambil bagian seperti Ng Nyiap Sun di tunjuk sebagai bendahara dibantu oleh Kei Kiang Kie, Ng Nyiap Khan, Ong Cu Kei, Ng Nung Khoi dan Theng Sha Teng.¹¹⁷

Pada tanggal 14 April 1943 pemerintah pendudukan Jepang mengadakan rapat kerja yang pertama sejak Jepang berkuasa di Kalimantan Barat. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 12 Sultan dan Panembahan serta segenap pejabat tinggi dilingkungan *Syuyutizico*. Rapat tersebut membahas masalah keamanan, sehubungan dengan timbulnya berbagai macam keributan yang terjadi di dalam masyarakat di beberapa tempat, yang bertujuan mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah militer Jepang di Kalimantan Barat. Namun sebenarnya, pertemuan itu diadakan semata-mata merupakan siasat pemerintah militer Jepang untuk menangkap para tersangka. Hal tersebut terbukti, ketika pada tanggal 23 April 1943 para sultan dan panembahan ditangkap dan ditahan di Markas Besar Kempetai di Pontianak. Bahkan beberapa tokoh lainnya ikut diamankan.¹¹⁸ Tetapi tidak ada penduduk yang berani menanyakan kepada pemerintah militer Jepang, karena Jepang tetap menunjukkan sikap yang bersahabat terhadap keluarga

117. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm. 94.

118. *Ibid.*, hlm. 57. Gatra, *op. cit.*, hlm. 54.

keraton Kadariyah Pontianak maupun masyarakat.

Pada pertengahan bulan Mei 1943, tokoh-tokoh pergerakan di Kalimantan Barat dikejutkan dengan berita bahwa, banyak pengikut Dr. B.J. Haga yang telah ditangkap pemerintah Jepang di Banjarmasin. Bahkan Dr. B.J. Haga sendiri telah meninggal sebelumnya, karena penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Para tokoh pergerakan segera mengadakan pertemuan untuk melakukan tindakan yang lebih sungguh-sungguh dan berani, yakni mengangkat senjata menentang pemerintah militer Jepang di Kalimantan Barat. Gerakan perjuangan semakin meningkat, yang mana pada bulan Juni 1943 dibentuk perkumpulan rahasia yang dinamakan *Suka Rela (Pasukan Penyerbu Bersenjata)*.¹¹⁹

Dalam rapat pada awal bulan Desember 1943, pada malam hari para tokoh pergerakan yang berjumlah 69 orang mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat di Pontianak. Rapat memutuskan untuk mengangkat senjata menentang pemerintah militer Jepang pada tanggal 8 Desember 1943 pada pukul 02.30 pagi hari, dengan rencana menyerang dan menduduki kantor Kempetai, membunuh peninpin-pemimpin tentara Jepang, menduduki tempat-tempat strategis di dalam kota, menyerang rumah *Syutizico* dan pegawai-pegawai pemerintahan Jepang, dan membunuh anggota maskapai Jepang. Selain itu, direncanakan pula akan

119. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm. 65. Machroes Effendy, *op. cit.*, hlm. 69.

mengirinkan utusan ke Amerika Serikat dan Inggris setelah "negeri baru" terbentuk, dan rencana mengadakan perayaan kemenangan kalau Jepang dapat dikalahkan.¹²⁰ Namun sangat disayangkan, rencana yang telah disusun rapi tersebut tercium juga oleh pemerintah militer Jepang sebelum sempat dilaksanakan. Pada saat itu juga, tentara Jepang melakukan penangkapan terhadap para tokoh pergerakan, seperti: J.E. Pattisiana, Pangeran Adipati, dan Ng Nyiap Sun.

Para tokoh pergerakan yang luput dari penangkapan, berkumpul di keraton Kadariyah Pontianak dan di rumah dr. Roebini, guna membicarakan tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Mereka merencanakan untuk menbinasakan pejabat-pejabat tinggi Jepang baik sipil maupun militer, merebut senjata dan kekuasaan, mempersiapkan tentara rakyat yang terdiri dari Kaigun Heiho dan penuda suku Dayak yang terkenal keberaniannya, dan akhirnya memproklamkan kemerdekaan Kalimantan Barat. Rencana tersebut akan dijalankan, yaitu dengan mengadakan "konferensi kerja sama" dengan pemerintah militer Jepang, yang akan mengundang seluruh pejabat tinggi Jepang baik dari sipil maupun dari kalangan Angkatan Laut. Para tokoh pergerakan juga merencanakan untuk meracuni setiap orang Jepang yang hadir dalam konferensi tersebut.

120. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *loc. cit.*

Kesempatan menjalankan rencana yang telah disusun tiba, ketika pada tanggal 24 Mei 1944 pemerintah militer Jepang mengundang semua tokoh pergerakan termasuk para sultan dan panembahan yang ada di Kalimantan Barat untuk mengadakan rapat di Pontianak. Konferensi pada umumnya dihadiri oleh kaum wanita sebagai "pelayan" yang akan menjalankan peran penting dalam usaha meracuni semua peserta konferensi terutama orang Jepang. Tetapi rencana yang telah disusun, dan tinggal dilaksanakan tidak berhasil dijalankan. Karena ketika beberapa opsir Jepang yang telah lebih dahulu menikmati minuman dan makanan yang dihidangkan tersebut, muntah-muntah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Siasat tersebut diketahui tentara Jepang, disertai rasa curiga yang semakin dalam terhadap gerakan yang dilakukan rakyat Kalimantan Barat. Dengan serta merta beberapa tentara Jepang melakukan tembakan ke udara disertai ancaman dengan senjata dan sanurai. Tidak seorangpun yang diperkenankan bergerak dari tempat duduk yang berada di dalam Gedung Medan Sepakat, tempat konferensi dilaksanakan. Semua orang digeledah, dan akhirnya semua peserta konferensi diangkut dengan berpuluh-puluh truk ke luar kota, dan dimasukkan dalam kamp tawanan yang sudah disediakan.¹²¹

121. *Ibid.*, hlm. 96. Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hlm. 110-111. Machroes Effendy, *op. cit.*, hlm 59-60. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono (Penyunting), *op. cit.*, hlm. 40-41.

Pada tanggal 28 Juni 1944, merupakan hari yang menyeramkan bagi rakyat Kalimantan Barat. Pada waktu itu dilakukan pengadilan kilat terhadap 48 tokoh pergerakan. Pada saat itu juga, para tokoh pergerakan di vonis hukuman mati, dan langsung ditembak. Tawanan yang lain berjumlah kurang lebih 1000 orang, dipancung dengan samurai tanpa diadili.¹²² Surat kabar Jepang yang terbit di Pontianak "Borneo Shimbun" menyebutkan sederetan nama-nama pemuka masyarakat, cerdas pandai, para sultan dan panembahan, yang dikatakan akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah militer Jepang di Kalimantan Barat, dan akan mendirikan Negeri Borneo Barat yang bebas dari penjajahan. Ke-48 tokoh pergerakan yang dihukum mati tersebut, antara lain: J.E. Pattisiana (51 tahun); Syarif Muhammad Alkadrie (74 tahun, Sultan Pontianak); Pangeran Adipati (31 tahun, putra Sultan Pontianak); Pangeran Agung (26 tahun, Sekretaris Istana); Ng Nyiap Sun (40 tahun, pengusaha hasil bumi); Lumba Pea (43 tahun); R. Muslimun Nalaprana (43 tahun); Kei Liang Kei (54 tahun); Ng Nyap Kha (35 tahun); Panangian Harahap (48 tahun); Notosoedjono (42 tahun); F.J. Loway Paath (44 tahun); C.W. Octavianus Lucas (42 tahun); Ong Tjoe Kie (52 tahun); Uray Aliudin (33 tahun); Gusti Saunan (44 tahun, Panembahan Ketapang); Muhamad Ibrahim Tsafiudin (40 tahun, Sultan Sambas); Sawong Wongso Utomo (45 tahun); Dr. Suharyo Martawardoyo

122. Majalah Gatra, *loc. cit.*

(33 tahun, Kepala Rumah Sakit Gila Pontianak); Muhamad Yatin (38 tahun); Raden Mas Soedijono (31 tahun); Nazaruddin (35 tahun); Soedarnadi (30 tahun); Tambunan (29 tahun); Tji Bun Lie (42 tahun); Naasrun Sultan Pangeran (31 tahun); E. Londok Kawengsian (44 tahun); W.E.F. Tewu (51 tahun); Wagimun Bin Wongso Semito (27 tahun); Ng Lung Khoi (45 tahun); Theng Swa Teng (47 tahun, eks Kapiten Cina Singkawang); Dr. Achmad Diponegoro (40 tahun, dokter Rumah Sakit Pontianak); Dr. Ismail (34 tahun, Kepala Rumah Sakit Singkawang); Achmad Maidin (33 tahun); Nurlela Panangian (45 tahun); Tengku Idris (43 tahun, Panembahan Sukadana); Gusti Mesir (43 tahun, Panembahan simpang); Syarif Saleh (63 tahun, Panembahan Kubu); Gusti Abdul hamid (63 tahun, Panembahan Ngabang); Ade Muhammad Arief (40 tahun, Panembahan Sanggau); Gusti Muhammad Kelip (41 tahun, Panembahan Sekadau); Muhammad Taufik (63 tahun, Panembahan Mempawah); A.T.P. Lontang (46 tahun); Ahmad Maidin (40 tahun); Gusti Djafar (52 tahun, Panembahan Tayan); Raden Abdul Bahry Danu Perdana (41 tahun, Panembahan Sintang); Dr. Roebini (39 tahun, Kepala Rumah Sakit Pontianak); Amaliah Roebini (33 tahun).¹²³

Dengan penangkapan dan pembunuhan tersebut membuktikan pemerintahan militer pendudukan Jepang sangat kejam, dan

123. *Borneo Shimbun*, No. 216, Taheon ke II, Selasa Sitji Gatsoe 2604 "Komplotan Kaoem Penghianat Melawan Nippon Soedah Dibongkar Sampai Keakar-akarnya. Sekalian Kepala-Kepala Penghianat Soedah Ditembak Mati".

akan menindas setiap gerakan perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Barat.

Penangkapan dan teror juga dilakukan di Singkawang pada bulan Agustus 1944, di sini kurang lebih 130 orang Cina ditangkap semuanya, kecuali 10 orang, dengan ataupun tanpa proses, dihukum mati. Alasan penangkapan, karena orang-orang Cina tersebut pada umumnya kaya, dan memiliki uang kertas Hindia Belanda.¹²⁴

Tindakan selanjutnya dari pemerintah militer Jepang ialah melarang berkumpul lebih dari 2 orang. Jam malam diadakan dengan keras.¹²⁵ Penangkapan terus dilaksanakan, siapa saja yang dicurigai ditangkap dan dibunuh. Tindakan Jepang tersebut menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi seluruh rakyat Kalimantan Barat. Aksi pembersihan oleh pemerintah militer Jepang tidak pernah dilakukan pada siang hari melainkan pada waktu malam hari. Akan tetapi jika ada penangkapan, lebih dahulu diberi tanda pada waktu siang dengan menggerakkan tanknya di depan rumah orang yang akan dibunuhnya atau di tiang rumahnya diberi gambar "jangkar" lambang Angkatan Laut.¹²⁶ Cara yang lain digunakan, ialah rumah orang yang akan ditangkap diberi

124. Arifin Bey (Penyunting), *Pendudukan Jepang Di Indonesia: Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Belanda* (Jakarta: Kesaint Blanc, 1987), hlm. 90-91.

125. Kementerian Penerangan, *loc. cit.*

126. Wawancara dengan Sy. Yusuf Usman Alkadrie di Pontianak, tanggal 11-7-1995. Wawancara dengan Aspan Tiong, di Mandor, tanggal 26-7-1995.

tanda dengan huruf kanji yang berbunyi *warui hito* yang artinya orang jahat. Rumah yang diberi tanda tersebut tidak akan mendapat kunjungan dari siapapun. Karena orang yang berkunjung ke rumah tersebut akan dicap penjahat, dan akan ditangkap.¹²⁷

Korban yang ditangkap, kepalanya disungkup dengan karung goni atau kain yang telah disediakan. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sebuah truk yang telah siap menunggu, yang terkenal dengan sebutan mobil sungkup.¹²⁸ Mobil sungkup tersebut menyerupai kereta jenazah dan ditutup dengan kain terpal warna hitam. Tiap penangkapan selalu diiringi dengan perampasan harta milik korbannya. Tempat pembunuhan yang dilakukan Jepang terjadi di beberapa tempat di Kalimantan Barat, tetapi yang terbesar di desa Kopyang di dekat Mandor, kurang lebih 80 km dari kota Pontianak. Korban pembunuhan itu diperkirakan berjumlah 21.037 orang.¹²⁹

Keadaan yang demikian menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Untuk menghilangkan dan meredakan suasana, pemerintah militer Jepang mengumunkan latar belakang mereka mengadakan pembersihan dan pembunuhan tersebut,

127.Sagimun MD, *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 77.

128.Mawardi Rivai, *op. cit.*, hlm. 66. Ja' Achmad, *op. cit.*, hlm. 23. Machroes Effendy, *op. cit.*, hlm. 58.

129.Jumlah 21.037 orang merupakan angka resmi yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

karena diantara tokoh pergerakan yang ditangkap telah ditemukan suatu dokumen yang lengkap dan berkhianat kepada pemerintah militer Jepang. Pemerintah militer Jepang menyebutkan, bahwa pembunuhan yang dilakukan merupakan balasan yang setimpal karena sikap mereka yang berdosa dan berkhianat dan menjadi mata-mata musuh dari tentara Sekutu.¹³⁰

B. Perlawanan Rakyat Dayak Kalimantan Barat Terhadap Jepang

Pemerintah militer Jepang beranggapan bahwa dengan pembantaian dan penyembelihan massal yang praktis melenyapkan satu generasi, rakyat Kalimantan Barat sudah tidak memiliki keberanian menentang Jepang. Namun anggapan Jepang tersebut ternyata keliru. Tindakan-tindakan kejam tentara Jepang telah menimbulkan perlawanan dari suku Dayak di Kalimantan Barat. Perlawanan rakyat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: karena rakyat sangat benci kepada kerja paksa yang dibebankan kepada mereka, dan tindakan tentara Jepang yang sewenang-wenang terhadap kaum wanita.

Casus bellinya adalah masalah anak perempuan dari Pang Linggan, yang ingin diambil isteri oleh seorang mandor Jepang bernama Kusaki, pimpinan perusahaan

130. Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hlm. 111-112.

pengolahan kayu di Nitinan Kampung Labea Sekucing, Benua Labai Kecamatan Meliau. Namun perkawinan tersebut, tidak disetujui oleh Pang Linggan. Pada pertengahan bulan Pebruari 1945, dengan dipimpin oleh Pang Suma dan Pang Linggan mereka membunuh mandor Jepang tersebut. Kemudian mereka pulang ke kampungnya, dan melaporkan pembunuhan itu kepada *Temenggungnya* yang bernama Pang Dadan supaya bersiap-siap apabila Jepang akan menyerang. Beberapa hari kemudian diketemukan pula pimpinan perusahaan kayu Niciran di Pulau Jambu, Kecamatan Tayan yang bernama Sutsu Gisan telah terbunuh dengan lehernya dipenggal.¹³¹

Kedua peristiwa itu merupakan awal perjuangan rakyat Dayak Kalimantan Barat bangkit, melawan pemerintah Jepang. Dengan demikian pemuka Suku dan Panglima Perang Suku Dayak di Kalimantan Barat, mulai mempersatukan rakyatnya menentang tentara Jepang, yang dibagi dalam sektor tempur, yaitu :

1. Sektor Timur (dari Nanga Ketungau sampai Semitau) di pimpin oleh Temenggung Budit, dibantu oleh : Patih Tingum, Patih Gunung, Patih Megong, Patih Ukang, Patih Empadik, Patih Budit, Patih Sedong, Patih Geruntang;

131.H.M. Baroamas Jabang Balunus, *Penjelasan-Penjelasan Singkat Tentang Pemberontakan Suku Dayak Terhadap Pemerintah Fasis Jepang Tahun 1944-1945* (tidak diterbitkan), hlm. 12. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op. cit.*, hlm. 109. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail dan Wijoso Tjtrodarjono (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 28. Majalah Sarinah, *op.cit.*, hlm. 118.

2. Sektor Tengah (dari Ngabang sampai Sekadau): dipimpin oleh Tumenggung Mandi alias Tumenggung Apang Dandan atau Pangdandan, dibantu oleh Panglima Kilat, Panglima Yap, Panglima Gagak, Panglima Busu, Panglima Taan, Panglima Suma, Pang Linggan, Panglima Timbang bin Purung, Panglima Batu dan Panglima Solang;
3. Sektor Barat dan Selatan (dari Pontianak sampai Ketapang): dipimpin oleh Panglima Burung;
4. Sektor Utara (dari Sambas sampai Sungai Duri): dipimpin oleh Panglima Jaya, dibantu oleh : Panglima Libau, Panglima Giri, Panglima Dagang, Panglima Salang, Panglima Tedung dan Panglima Siri.¹³²

Menerima kabar tentang pembunuhan terhadap kedua pimpinan perusahaan pengolahan kayu tersebut, pimpinan tentara Jepang di Pontianak mengirimkan ekspedisi ke Meliau. Ekspedisi tentara Jepang ini dipimpin oleh Letnan Kaisu Nagatani dibantu oleh Letnan Nakamura, Yamamoto dan Yamanami.¹³³ Ketika itu di Tayan memerintah sebagai Bunken adalah Bunken Miagi dan di Meliau adalah Demang Amat Dogum. Setelah menginap dipasar Meliau di rumah seorang Cina bernama Kiung Tjiu Siong, rombongan Nagatani berangkat menuju hulu Sungai Embuan menuju kampung Kunyil, dengan dibantu oleh polisi desa Pak Eyeb. Akhirnya Nagatani berhasil menguasai desa Kunyil dengan kekerasan.

132.H.M. Baraomas Jabang Balunus, *loc.cit.*

133.*Ibid.* Machrous Effendy, *op.cit.*, hlm. 75.

Pasukan Nagatani memerintahkan agar Tumenggung Kunyil yang bernama Mauidi alias Pangdandan yang sedang bertapa di bukit Sekuyau, agar berpihak kepada Jepang untuk menghancurkan Pangsuma. Bahkan Nagatani menangkap anak dan istri Pangdandan dan menyiksanya. Tindakan Nagatani semakin membangkitkan amarah rakyat dan menguatkan tekad rakyat menentang Jepang. Sehingga pada suatu malam beredarlah "*Mangkok Merah*" atau "*Mangkok Patuwong*" dikalangan Suku Dayak di Kunyil dan Labai, dan akhirnya "*Mangkok Merah*" sampai ditangan Pang Suma sebagai pimpinan perjuangan. "*Mangkok Merah*" berisi darah ayam atau darah binatang, bulu ayam serta puntung kayu yang ada apinya, untuk pengerahan rakyat Dayak secara umum melawan tentera Jepang.

Malam itu juga rakyat Kunyil dan sekitarnya bersatu padu untuk melawan pasukan Nagatani. Pagi harinya Pangsuma dengan beberapa Panglima Perang lainnya seperti Panglinggan dan Pang Solang bersama puluhan pasukan menyerbu markas Nagatani. Pasukan Jepang yang diserang secara mendadak tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti. Seluruh pasukan Nagatani tewas, dan Nagatani sendiri dipancung kepalanya dan hatinya diambil sebagai tumbal.¹³⁴

Pemerintah Militer Jepang di Pontianak sangat

134. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op.cit.*, hlm. 110-111. Pasifikus Ahok, Slamet Ismail dan Wijoso Tjitrodarjono (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 29.

terkejut menerima kabar tewasnya Nagatani. Mereka tidak mengira rakyat pedalaman yang tidak mengerti akan tehnik dan peralatan perang modern dapat mengalahkan tentara Jepang yang memiliki peralatan perang yang modern. Oleh karena itu Pemerintah Jepang mengirim bala bantuan ke Meliau. Tentara Jepang menangkapi rakyat dan pimpinan daerah sekitar Meliau seperti Sulaiman, Abang Syahdansyah, Kiayi Husein, Darmawan, dan lain-lain, selanjutnya dipenjarakan di Tayan dan sebagian dibunuh tentara Jepang.

Sementara itu Pang Suma pun memperkuat pasukannya dan meneruskan perjuangan bahkan menguasai kantor camat Meliau. Perjuangan Pang Suma mendapat dukungan dari rakyat Melalay, di bawah Pimpinan Raden Iting pewaris Kerajaan Meliau yang mendirikan markasnya di kampung Rambai. Dengan demikian seluruh kekuatan rakyat Meliau siap melawan tentara Jepang. Pada tanggal 5 Mei 1945, pasukan Majang Desa yang dipimpin Pang Suma, Panglinggan dan Pang Solong melakukan pengepungan dari 4 jurusan terhadap kekuatan Jepang di Meliau. Ternyata pertahanan kota Meliau sangat kuat. Namun demikian, pasukan Majang Desa bertekad membebaskan Meliau dari tangan Jepang. Sebagian pasukan Pang Suma dikerahkan menjaga jalan masuk ke Pulau Belungai, untuk menghambat datangnya bala bantuan Jepang dari Pontianak. Pertempuran antar kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan, pasukan Jepang dapat dipukul mundur sampai ke Sanggau. Kekosongan Pemerintahan di Meliau memberi kesempatan kepada pasukan Majang Desa untuk

mengisi Pemerintahan, dengan menempatkan Panglima Burung sebagai *Guntcoyo* (Asisten Wedana). Jatuhnya Meliau di tangan pasukan Majang Desa menimbulkan kegelisahan dan kemarahan bagi Ken Karikan Sanggau. Bahkan pasukan Majang Desa yang berhasil menguasai Meliau menuntut pula penyerahan Sanggau.¹³⁵

Pada tanggal 14 Mei 1945, bantuan tentara Jepang tiba di Meliau dengan menggunakan kapal perang dan motor boat. Pasukan Jepang berhenti ditengah-tengah Sungai Tayan di mana telah siap pasukan Pang Suna dan Raden Iting. Jepang menembaki pertahanan pasukan Majang Desa dan mendaratkan pasukannya menyerbu ke darat. Dalam pertempuran tersebut, tentara Jepang berhasil menduduki kantor Demang, Pos Polisi, Pasar dan tempat strategis lainnya di Meliau. Selama kurang lebih 10 jam berlangsungnya pertempuran, pihak Jepang hanya menderita kerugian sebanyak 16 orang tentara tewas dan puluhan "Heiho" mati tenggelam di Sungai Kapuas akibat tembakan dari pasukan Majang Desa, sedangkan di pihak Majang Desa, gugur Pang Suna dan Pang Linggan serta beberapa pimpinan pasukan Majang Desa lainnya. Ketika itu, 4 buah truk tentara Jepang dari Pontianak yang menuju Batang Tarang - Tayan untuk membantu penyerbuan di Meliau, di hadang oleh pasukan yang di pimpin oleh Panglima Busu mulai dari Sosok - Batang Tarang. Truk-truk tersebut akhirnya kembali ke Pontinak, salah satu truk

135. Machrous Effendy, *op.cit.*, hlm. 85-86

berhasil di hancurkan oleh pasukan Panglima Batu di sepanjang jalan antara Ngabang - Pahauman - Gunung Sehak. 136

Gugurnya Pang Suma dan Pang Linggan tidak membuat perlawanan rakyat Majang Desa surut, mereka mundur ke hutan untuk menyusun kekuatan guna merebut kembali Meliau. Pimpinan perjuangan diambil alih oleh Panglima Burung dan Pangdandan. Pangdandan memimpin sisa-sisa pasukan Pang Suma untuk menyerang dan menenggelamkan kapal motor dari mana saja datangnya yang berisi orang-orang Jepang dan kaki tanganya dari Pontianak - Putussibau. 137

Pada pertengahan bulan Mei 1945 kedudukan Jepang diserang kembali, dan dalam pertempuran yang sengit, akhirnya Meliau jatuh ketangan pasukan Majang Desa. Pasukan Jepang mundur lagi ke Sanggau. Panglima Burung memberikan ultimatum kepada Kan Karikan Sanggau untuk menyerahkan Sanggau, tetapi Kan Karikan menolak perintah tersebut dengan harapan bala bantuan dari Pontianak segera tiba. Namun pasukan Majang Desa berusaha menghalangi datangnya bantuan dari Pontianak dengan cara menghancurkan semua jembatan yang menghubungkan Pontianak - Sanggau yang jaraknya 400 km. Sedangkan di sepanjang Sungai Kapuas ditempati barisan rakyat, terutama di Desa Sungai

136. Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, *op.cit.*, hlm. 112-113. H.M. Baroamas Jabang Balunus, *loc.cit.*

137. *Ibid*

Belungai. Bahkan pasukan Majang Desa merencanakan untuk merebut Ngabang, Tayan dan Sosok.

Jatuhnya kota Meliau ketangan pasukan Majang Desa semakin menambah semangat rakyat menentang Jepang. Bahkan Pasukan Majang Desa mendapat bantuan dari Panglima Suku Melayu, yaitu : Gusti Ismail dan Gusti Sohor. Kemudian di atur pembagian tugas: daerah Kota Tayan dipimpin oleh Panglima Kilat; Ngabang dan Landak di pimpin oleh Panglima Batu; Sosok dan sekitarnya dipimpin oleh Panglima Jauhari; daerah sepanjang Sungai Sekayam dan Sanggau dipercayakan kepada Gusti Ismail dan Gusti Sohor. Dengan dibentuknya barisan rakyat tersebut, maka seluruh kekuatan diarahkan untuk merebut Sanggau. Serangan mulai dilancarkan kembali, sehingga dengan mudah beberapa desa direbut dan dikuasai pasukan Majang Desa. Mulai dari Desa Batang Tarang-Sosok-Bonti-Kembayan-Balai Sabut dan Balai Karangan yang berbatasan dengan Sarawak. Penyerangan terhadap kota Tayan untuk sementara ditangguhkan, karena kota Tayan dipertahankan oleh banyak pasukan Jepang terutama Heiho. Tetapi Landak dan Sekadau sudah ditinggalkan Jepang karena tidak mampu menahan serangan dari pasukan Majang Desa.¹³⁸

Pada tanggal 17 Mei 1945 pasukan Jepang kembali melancarkan serangan balasan terhadap benteng-benteng pertahanan pasukan Majang Desa di Meliau dan Sosok dengan mempergunakan kapal perang kecil dan kapal motor di

138.Machroes Effendy, *op. cit.*, hlm 87.

sepanjang Sungai Sekayan. Serangan dilakukan juga lewat darat dengan menggunakan sepeda. Serangan balasan Jepang tersebut berhasil memporak porandakan pasukan Majang Desa dan kota Meliau akhirnya jatuh ketangan Jepang. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Majang Desa kehilangan beberapa pimpinan seperti Pangdandan. Bahkan pada pertengahan Juli 1945 pasukan Jepang melakukan penyerangan secara besar-besaran di daerah Tayan - Meliau dan Sanggau serta Sekadau dengan tujuan menadamkan pemberontakan masyarakat pedalaman Kalimantan Barat. Namun pasukan Jepang tidak dapat menumpas seluruhnya pasukan Majang Desa karena beratnya medan yang harus dilalui.

Pada tanggal 3 Agustus 1945, pasukan Majang Desa yang terdesak memasuki pedalaman Kota Sanggau, mendekati kedudukan di KM IX. Di tempat tersebut, pasukan Majang Desa yang dipimpin Panglima Burung, Pang Solang, Panglima Pasukan Melayu membuat berikade dan benteng pertahanan guna menghambat gerak maju pasukan Jepang. Pada tanggal 4 Agustus 1945 sepasukan tentara Jepang mendekati KM IX, dan pertempuran tidak dapat dihindari kedua belah pihak. Selama 7 jam berlangsungnya pertempuran, pasukan Jepang mengalami kekalahan, dan pasukan Jepang kembali ke Sanggau guna menyusun kekuatan untuk menumpas perlawanan rakyat pedalaman.

Kemenangan yang direbut dalam pertempuran di KM IX, membuat pasukan Majang Desa bertambah yakin bahwa Jepang dapat dikalahkan, walaupun peralatan pasukan Jepang lebih

modern dan Sanggau dapat direbut. Pada tanggal 10 Agustus 1945, rapat para Temenggung memutuskan untuk menyerang Sanggau. Penyerbuan ini dipimpin oleh Panglima Melayu yaitu: Gusti Ismail, Gusti Ali Akbar dan Gusti Sohor. Penyerbuan secara besar-besaran pasukan Majang Desa membuat pertahanan Jepang kocar-kacir, sehingga Sanggau dapat direbut. Kekosongan pemerintahan di Sanggau membuat perpecahan dalam sebagian pasukan Majang Desa pimpinan Gusti Ismail. Karena antara Gusti Ismail dan Gusti Ali Akbar ingin menjadi Bunken Kankarikan Sanggau. Perpecahan tersebut mengecewakan pimpinan pasukan Majang Desa seperti Panglima Burung dan Pang Solang, yang kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan Sanggau. Keadaan tersebut di manfaatkan sisa-sisa pasukan Jepang untuk menyerbu Sanggau, dan Sanggau kembali diduduki Jepang. Dalam pertempuran tersebut gugur Panglima Adung dan beberapa orang Cina seperti Mangku Sam, Panglima Kim Seng, Jauhari dan Panglima Tjam yang ikut serta menentang Jepang.¹³⁹

Pada tanggal 10 September 1945, pasukan Panglima Burung memasuki kota Pontianak dari arah Tayan (sebagian pasukan ke Ketapang) untuk menyerang tentara Jepang. Hampir bersamaan, telah datang pula sejumlah pasukan rakyat pedalaman dari arah Sosok dan Ngabang yang dipimpin oleh Panglima Busu dan Panglima Kilat, untuk bergabung

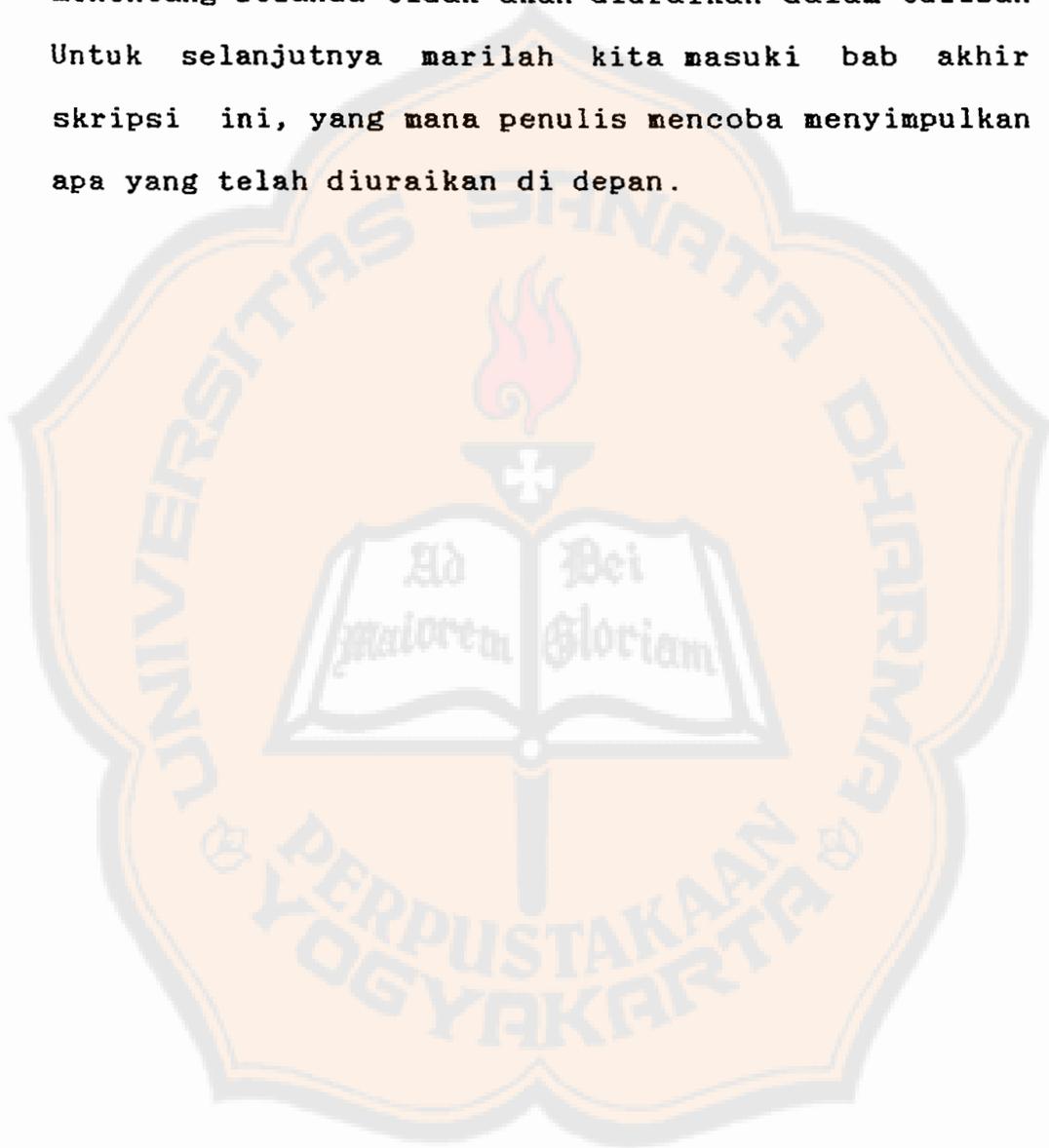
139. *Ibid*, hlm. 95.

dengan pasukan Panglima Burung.¹⁴⁰ Kedatangan pasukan Panglima Burung, Panglima Busu, dan Panglima Kilat disambut gembira oleh penduduk yang hidup dalam ketakutan akibat kekejaman pemerintah militer Jepang. Penuka-pemuka masyarakat Cina yang bergabung dalam "*Po An Tui*" atau *Penjaga Keamanan Oemoem (PKO)*, segera mengajak bekerja sama dalam menentang Jepang. Pasukan Majang Desa di tempatkan dalam bangunan-bangunan besar seperti : N.V. Khoon Hoa Dock, Firma Fuk Sen, N.V. Hok Tong dan Firma Kong Sun.

Pada tanggal 25 September 1945 para tokoh PKO dan pimpinan pasukan Majang Desa mengadakan rapat di Siantan untuk menyerang pasukan Jepang yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum rencana tersebut dilaksanakan, pada siang harinya berlabuh 4 buah kapal motor Tentara Sekutu yang diwakili Tentara Australia di Sungai Kapuas dari Kucing (Serawak) untuk menawan dan melucuti tentara Jepang yang ada di Kalimantan Barat. Pada saat itulah, secara resmi baru diketahui jikalau tentara Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Selanjutnya pada tanggal 7 dan 14 Oktober 1945, datang Tentara Australia Divisi ke-9 dari Kucing ke Pontianak untuk mengawasi tawanan-tawanan perang Jepang

140.H.M. Baraomas Jabang Balunus, *op.cit.*, hlm. 13. Hasan Basry, *op.cit.*, hlm. 69.

dan memulihkan keamanan.¹⁴¹ Kedatangan tentara Australia tersebut diikuti oleh NICA, untuk berkuasa kembali di Kalimantan Barat. Namun perjuangan rakyat Kalimantan Barat menentang Belanda tidak akan diuraikan dalam tulisan ini. Untuk selanjutnya marilah kita masuki bab akhir dari skripsi ini, yang mana penulis mencoba menyimpulkan dari apa yang telah diuraikan di depan.



141.H.M. Baroamas Jabang Balunus, *loc. cit.* Pasifikus Ahok, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono (Penyunting), *op. cit.*, hlm. 47.

BAB VI

KESIMPULAN

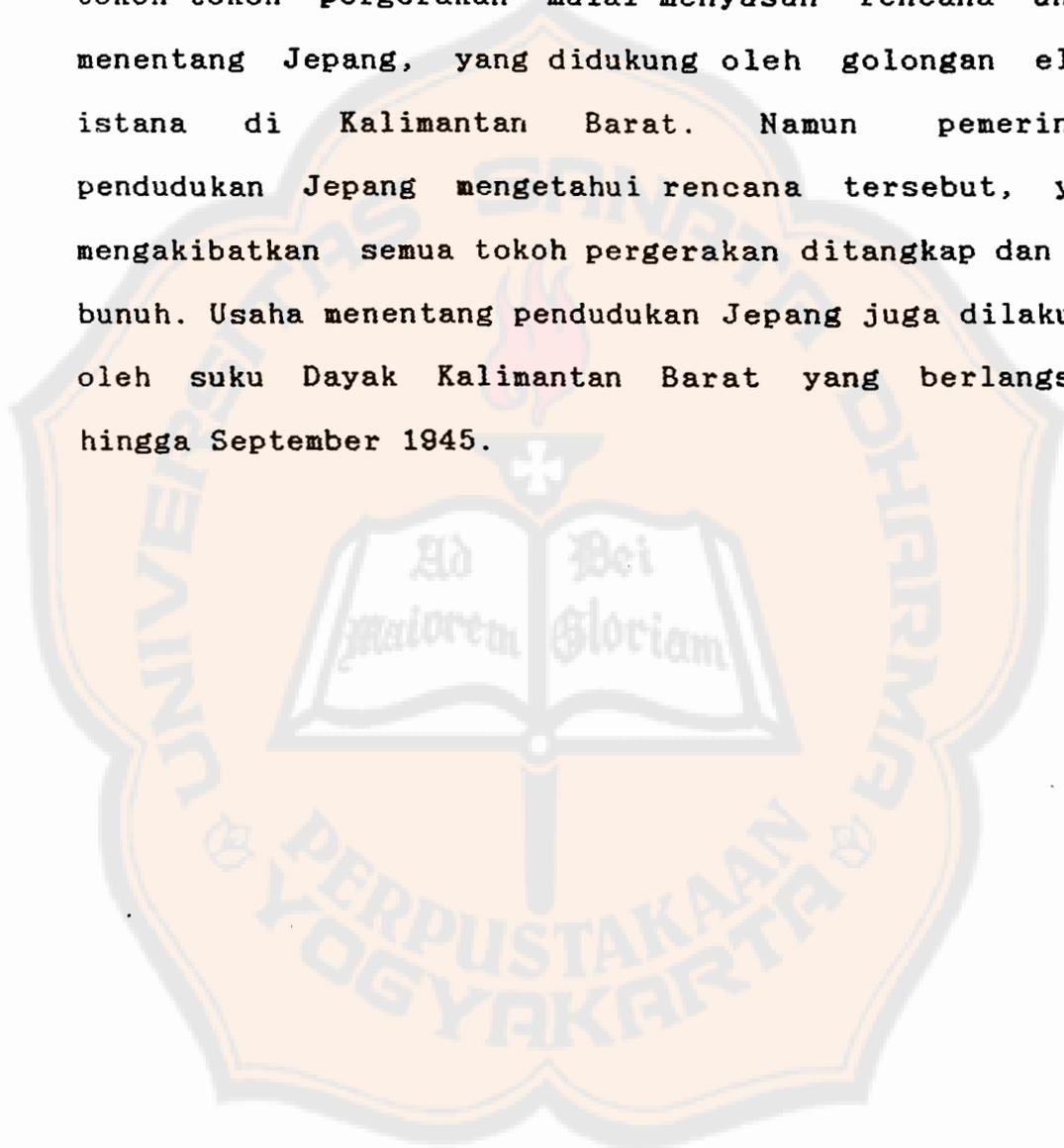
Dalam bab terakhir dari pembahasan ini, penulis akan menyimpulkan hal-hal pokok yang telah penulis uraikan dalam pembahasan terdahulu. Dari pembahasan-pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan masyarakat Kalimantan Barat menjelang Perang Dunia II sebenarnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Memang setelah tahun 1930-an telah tampak berbagai kemajuan dan perubahan, baik di bidang pendidikan, perekonomian, kerohanian atau penyebaran agama maupun politik, tetapi perubahan tersebut hanya bisa dilihat dan dinikmati oleh penghuni kota maupun masyarakat yang hidup dalam jangkauan jaringan komunikasi. Kemajuan dan perubahan tersebut terutama dinikmati oleh golongan Cina, Arab, maupun golongan elite bangsawan dan kaum kerabatnya, serta mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Kalimantan Barat. Sedangkan rakyat biasa tetap hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Keadaan tersebut berlangsung sampai kedatangan balatentara Jepang di Kalimantan Barat.
2. Usaha Jepang merebut Kalimantan Barat dari Belanda dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain dengan kegiatan mata-mata (spionase). Kegiatan mata-mata tersebut dilakukan orang-orang Jepang dengan membuka

perusahaan pengolahan kayu, pengolahan pertambangan dan lain sebagainya. Bahkan Sumotomo Kabushiki Kaisya, perusahaan pengolahan kayu terbesar yang dipimpin oleh Nagaishi, menyediakan gadis-gadis Jepang untuk diambil sebagai gundik oleh golongan elite Kalimantan Barat. Tujuan yang ingin dicapai yakni menjalin hubungan yang baik dengan semua golongan yang ada di Kalimantan Barat. Informasi yang di dapat dari kegiatan mata-mata memudahkan Jepang melakukan penyerbuan terhadap Belanda yang menguasai Kalimantan Barat. Tanpa perlawanan yang berarti dari tentara Belanda, akhirnya Kalimantan Barat jatuh ketangan Jepang pada tanggal 2 Pebruari 1942. Para kepala swapraja Kalimantan Barat segera menyatakan tunduk dan setia kepada balatentara Jepang.

3. Dari tanggal 2 Pebruari 1942 sampai 15 Juli 1942 pemerintahan di Kalimantan Barat dibawah kekuasaan Angkatan Darat. Namun setelah pertengahan Juli 1942, tentara Angkatan Darat Jepang diganti oleh Angkatan Laut. Pada mulanya rakyat Kalimantan Barat menyambut gembira kedatangan tentara Jepang, hal itu disebabkan budi baik Jepang pada masa malaise. Pada saat itu harga barang-barang buatan Jepang sangat murah dan melimpah. Namun pada kenyataannya, pemerintah pendudukan Jepang mengontrol semua bidang kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Rakyat Kalimantan Barat diharuskan mendukung setiap usaha Jepang dalam mencapai kemenangan perang Jepang.

4. Kekejaman dan penindasan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang, menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat Kalimantan Barat. Hal tersebut mengakibatkan tokoh-tokoh pergerakan mulai menyusun rencana untuk menentang Jepang, yang didukung oleh golongan elite istana di Kalimantan Barat. Namun pemerintah pendudukan Jepang mengetahui rencana tersebut, yang mengakibatkan semua tokoh pergerakan ditangkap dan di bunuh. Usaha menentang pendudukan Jepang juga dilakukan oleh suku Dayak Kalimantan Barat yang berlangsung hingga September 1945.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahok, Pasifikus, Slamet Ismail, dan Wijoso Tjitrodarjono
1992/1996 *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Barat, Pontianak, Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat.*
- Ansar Rachman, Achmad Mansyur, Salijo dan Staf Sendam
XIII/Tanjungpura
1970 *Tanjungpura Berjuang: Sedjarah KODAM XII/Tanjungpura Kalimantan Barat, Pontianak, Sendam XII/Tanjungpura*
- Arifin Bey (Penyunting)
1987 *Pendudukan Jepang Di Indonesia : Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Belanda, Jakarta, Kesaint Blanc.*
- Arniati Prasetywati Herkusumo
1984 *Chuo Sang-in, Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang, Jakarta, Rosda Putra Jaya*
- Asnadi
1985 *Pelajar Pejuang, Jakarta, Sinar Harapan.*
- Awjong Peng Koen
1962 *Perang Pasifik 1941-1945, Djakarta, PT Kinta.*
- Baroanas Jabang Balunus, H. M.
TT *Penjelasan-Penjelasan Singkat Tentang Pemberontakan Suku Dayak Terhadap Pemerintah Fasis Jepang Tahun 1944-1945 (Tidak diterbitkan), Pontianak.*
- Current, R. N.
1976 *The Essential of Amerikan History, New Yor, Alfred A. Knof.*
- Dasuki, A.
TT *Sedjarah Djepang Djilid II, Bandung, Sumber Djaya.*
- Djajusman
1978 *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL), Bandung, Angkasa.*
- Gottschalk, Louis
1975 *Mengerti Sejarah (Terjemahan), Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.*
- Hall, D.G.E.
1986 *Sejarah Asia Tenggara, Surabaya, Usaha Nasional.*
- Hasan Basry
1961 *Kisah Gerilya Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949, Bandjarmasin, Jajasan Lektur Lambung Mangkurat.*

- Hasan Shadily
1986 *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, Ihtisar Baru.
- Hitipeuw, Frans dan Sutrisno Kutoyo (ed.)
1978/1979 *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*, Pontianak, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Pusat Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Humas Pemda Tk II Pontianak
1986 *Makna Makam Juang Mandor: Korban Agresi Jepang Tahun 1942-1944*, Pontianak.
- Ishii, Ryosuke
1988 *Sejarah Institusi Politik Jepang*, Jakarta, Gramedia.
- Ja' Achmad
1977/1978 *Kalimantan Barat Di Bawah Pendudukan Tentara Jepang*, Pontianak, Proyek Rehabilitasi Museum Kalimantan Barat.
- Kementerian Penerangan (ed.)
1953 *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*, Djakarta.
- Lontaan, J.U.
1975 *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pontianak, Pemda Tk.I
- Machroes Effendy
1982 *Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat*, Jakarta.
- Mark Gayu, J.
1941 *The Flight for the Pacific*, New York, William Morrow.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto
1992 *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Mawardi Rivai
1978 *Peristiwa Mandor*, Jakarta, Pustaka Antara.
- Mayor Polak, J.B.A.F.
1975 *Sejarah Dunia Modern: Suatu Pembahasan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung.
- Moedjanto, G.
1988 *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, Yogyakarta, Kanisius.
- Nasution, A.H.
1977 *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I: Proklamasi*, Bandung, Angkasa.

- Nazir, M.
1985 *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nio Joe Lan
1962 *Djepang Sepanjang Masa*, Djakarta, PT Kinta.
- Nugroho Notosusanto
1979 *Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan Jepang Di Indonesia*, Jakarta.
- Onghokham
1987 *Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta, Gramedia.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
1991 *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*, Pontianak.
- Pluvier, J.M.
TT *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Di Indonesia Tahun 1930-1942 (Terjemahan)*.
- Ricklefs, M.C.
1991 *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Rosihan Anwar
1985 *Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950*, Jakarta, Inti Idayu Press.
- Sagimun MD
1985 *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*, Jakarta, Inti Idayu Press.
- Sakamoto, Taro
1982 *Jepang Dulu Dan Sekarang*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Sartono Kartodirdjo
1970 *"Lembaran Sejarah No. 6"*, Yogyakarta, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada.
- 1982 *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif*, Jakarta, Gramedia.
- 1990 *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta, Gramedia.
- Sayidiman Suryohadiprojo
1987 *Belajar Dari Jepang: Manusia Dan Masyarakat Jepang Dalam Perjoangan Hidup*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

- Soemargono (ed.)
 1982 *Profil Propinsi Republik Indonesia: Kalimantan Barat*, Jakarta, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Soenyata Kartadarmadja, M. dan Sutrisno Kutoyo (Penyunting)
 1980/1981 *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Barat*, Pontianak, Proyek inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional.
- Suhartono
 1994 *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Syarif Ibrahim Alqadrie dan Pandil Sastrowardoyo
 1984 *Sejarah Sosial Daerah Kotanadya Pontianak*, Jakarta, Depdikbud Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Team Penyusun Monografi Daerah Kalimantan Barat
 1976 *Monografi Daerah Kalimantan Barat*, Jakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Vlekke, Bernard H.M.
 1967 *Nusantara (Sejarah Indonesia)*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Winarno Surachmad
 1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung, Tarsito.
- Yanis, M.
 1983 *Kapal Terbang Sembilan: Kisah Pendudukan Jepang Di Kalimantan Barat*, Pontianak, Yayasan Perguruan Panca Bhakti.
- Ya' Syarif Umar dan Gusti Abdul Hamid
 1988 *Sejarah Singkat Perjuangan Rakyat Landak*, Pontianak.

Harian Dan Majalah

- Harian Nusantara* tanggal 13 Oktober, "Memoir Jenderal Tanaka Kepada Kaisar Jepang".
- Borneo Shimbun* No. 216, Tahoen ke II, Selasa 4 Sitji Gatsoe 2604, "Komplotan Kaoem Penghianat Melawan NIPPON Soedah Dibongkar Sampai Keakar-akarnya. Sekalian kepala-kepala penghianat soedah di tembak mati".

Majalah Gatra, tanggal 22 Juli 1995.

Majalah Sarinah, tanggal 2 September 1985.



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Syf. Chalijah Alkadrie.
Umur : 87 tahun.
Jabatan : Anak dari Almarhum Sultan Mohammad Alkadrie.
Alamat : Kraton Kadriah Pontianak.
Tempat : Pontianak, 18-7-1995.
2. Nama : Sy. Yusuf Usman Alkadrie.
Umur : 52 tahun.
Jabatan : Eks. Pegawai Negeri Pemda Tk II Pontinak.
Alamat : Komplek Kraton Kadriah.
Tempat : Pontianak, 11-7-1995.
3. Nama : Ya' Syarif Umar.
Umur : 71 tahun.
Jabatan : Sekretaris Korps Cacat Veteran Republik
Indonesia Kalimantan Barat.
Alamat : Jl. Pak Kasih No. 66 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 12-7-1995.
4. Nama : Machroes Effendy.
Umur : 78 tahun.
Jabatan : Pensiunan Departemen Dalam Negeri.
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 81 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 12-7-1995.

5. Nama : H. Aliaswat Saleh.
Umur : 55 tahun.
Jabatan : Anggota MPR RI, Swasta.
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 19-7-1995.
6. Nama : H. Ja' Achmad.
Umur : 70 tahun.
Jabatan : Pensiunan Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan.
Alamat : Jl. Gusti Hamzah No. 15 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 19-7-1995.
7. Nama : H. Ibrahim Saleh.
Umur : 65 tahun.
Jabatan : Ketua Umum DND Angkatan 45.
Dirut PT. Muara Bidara.
Alamat : Jl. M.T. Haryono No. 5 Pontianak.
Jl. Pak Kasih No. 42 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 20-7-1995.
8. Nama : Drs. H. Jimmi Mohamad Ibrahim.
Umur : 62 tahun.
Jabatan : Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat.
Alamat : Jl. M.T. Haryono No. 21 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 20-7-1995.

9. Nama : H.M. Baroamas J. Balunus.

Umur : 64 tahun.

Jabatan : Veteran NPV. 14.004.303.

Alamat : Jl. Sultan Abdurrahman No. 92 Pontianak.

Tempat : Pontianak, 20-7-1995.

10. Nama : H. Mawardi Rivai.

Umur : 53 tahun.

Jabatan : Ketua Umum Khazanah Persatuan Penulis
Kalimantan Barat KHATULISTIWA.

Alamat : Jl. H.A. Rais Abdurrahman Gg. Tiungkandang
II/32 Pontianak.

Tempat : Pontianak, 21-7-1995.

11. Nama : H.M. Ali As, SH.

Umur : 67 tahun

Jabatan : Pensiunan PNSD.

Alamat : Jl. Pulau We No. 6 Pontianak.

Tempat : Pontianak, 21-7-1995.

12. Nama : M. Yanis.

Umur : 75 tahun.

Jabatan : Pensiunan PNS (ex. Sekwilda Tk I Kalimantan
Barat).

Alamat : Jl. Sulawesi No. 20 Pontianak.

Tempat : Pontianak, 21-7-1995.

13. Nama : Urai Aliudin Yusba.
Umur : 68 tahun.
Jabatan : Pensiunan Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan.
Alamat : Jl. Sultan Abdurrahman No. 8 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 23-7-1995.
14. Nama : Stephanus Ngo Lahay.
Umur : 61 tahun.
Jabatan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Purnama Gg. Perintis III No. 1 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 23-7-1995.
15. Nama : H. Munawar Kalahan.
Umur : 60 tahun.
Jabatan : Mantan Wakil Ketua DPRD Tk I Kalimantan
Barat.
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 24 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 23-7-7-1995.
16. Nama : Marpaung.
Umur : 77 tahun.
Jabatan : Swasta.
Alamat : Jl. Tamara No. 7 Pontianak.
Tempat : Pontianak, 22-7-1995.

17. Nama : H. Handy Moursal.

Umur : 76 tahun.

Jabatan : Swasta.

Alamat : Jl. Wan Soleh No. 1 Pontianak.

Tempat : Pontianak, 23-7-1995.

18. Nama : H.G. Apandi.

Umur : 86 tahun.

Jabatan : Pensiunan Pamongpraja.

Alamat : Jl. Sidas No. 10 Pontianak.

Tempat : Pontianak, 24-7-1995.

19. Nama : G.A. Sani Effendi.

Umur : 59 tahun.

Jabatan : Swasta.

Alamat : Jl. Sidas No. 10 Pontianak.

Tempat : Pontianak, 24-7-1995.

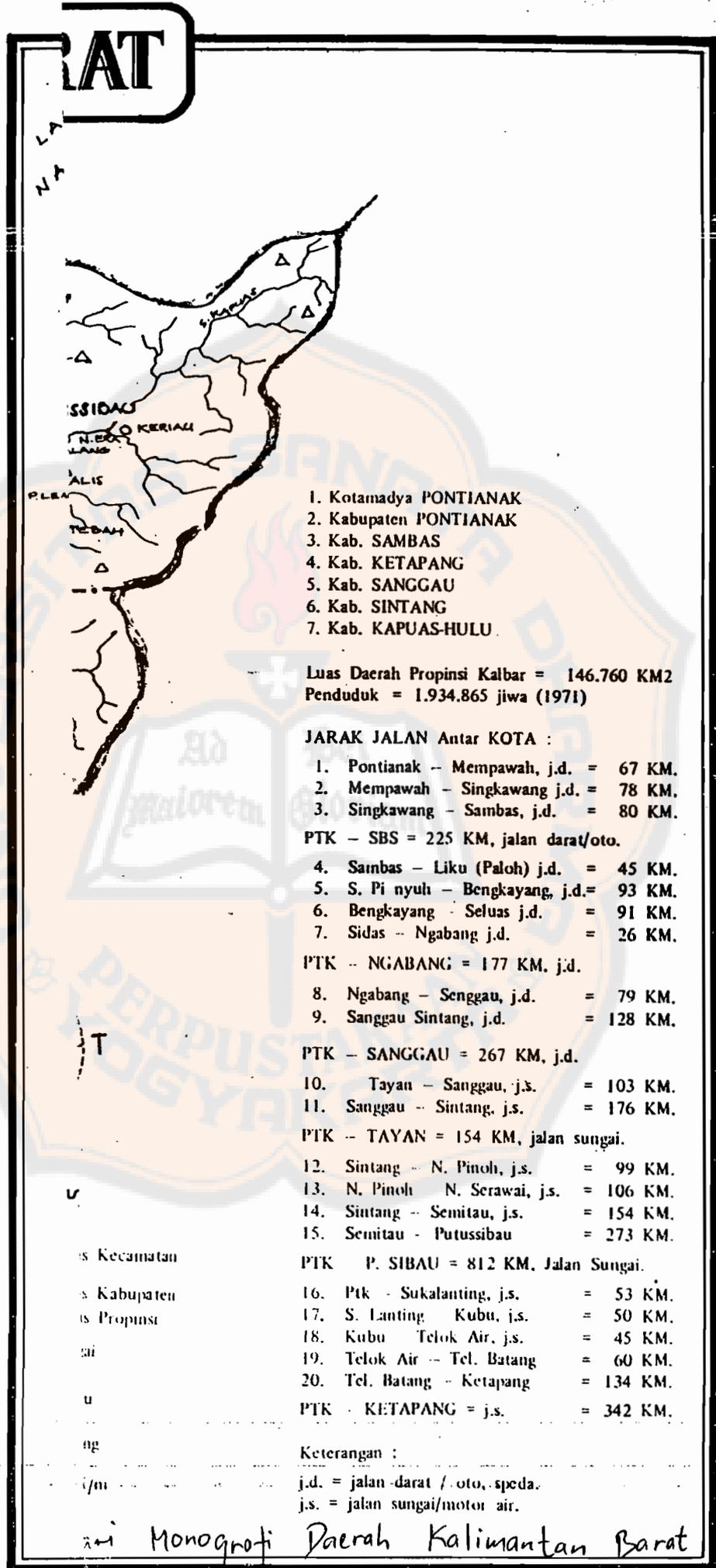
20. Nama : Aspan Tiong.

Umur : 68 tahun.

Jabatan : Mantan Anggota DPRD Tk. II Kabupaten
Pontianak.

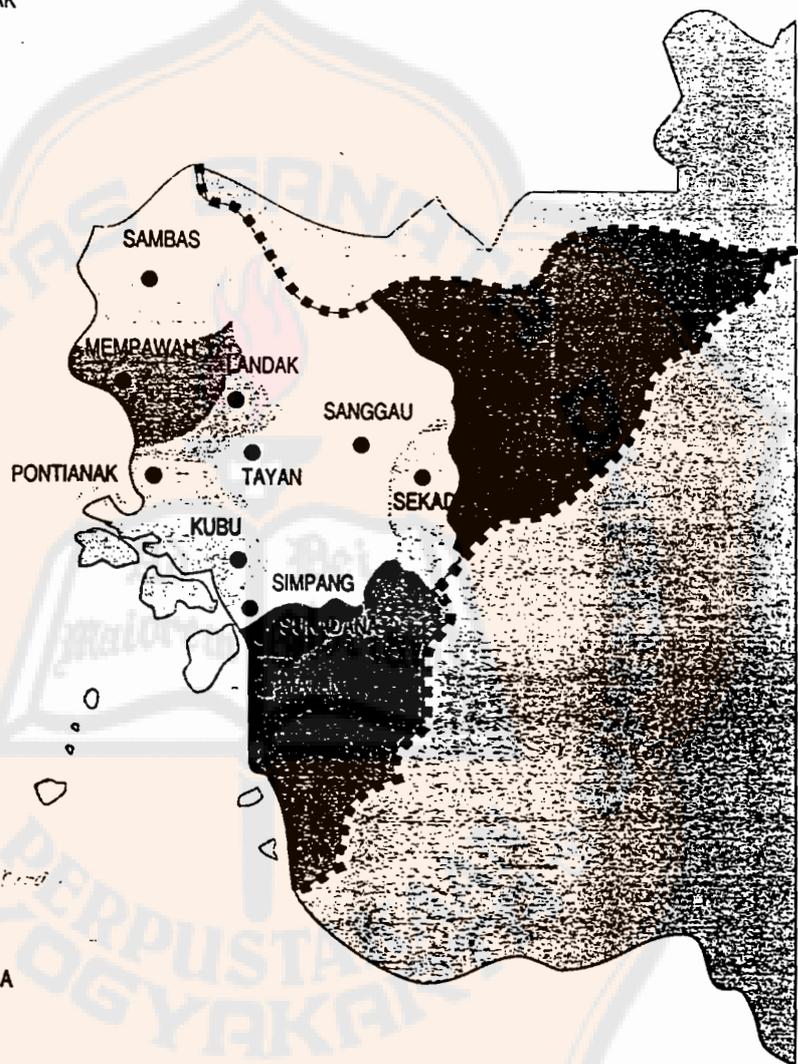
Alamat : Jl. Raya Mandor No. 18 Mandor.

Tempat : Mandor, 26-7-1995.



PETA WILAYAH PEMERINTAH TRADISIONAL
1540

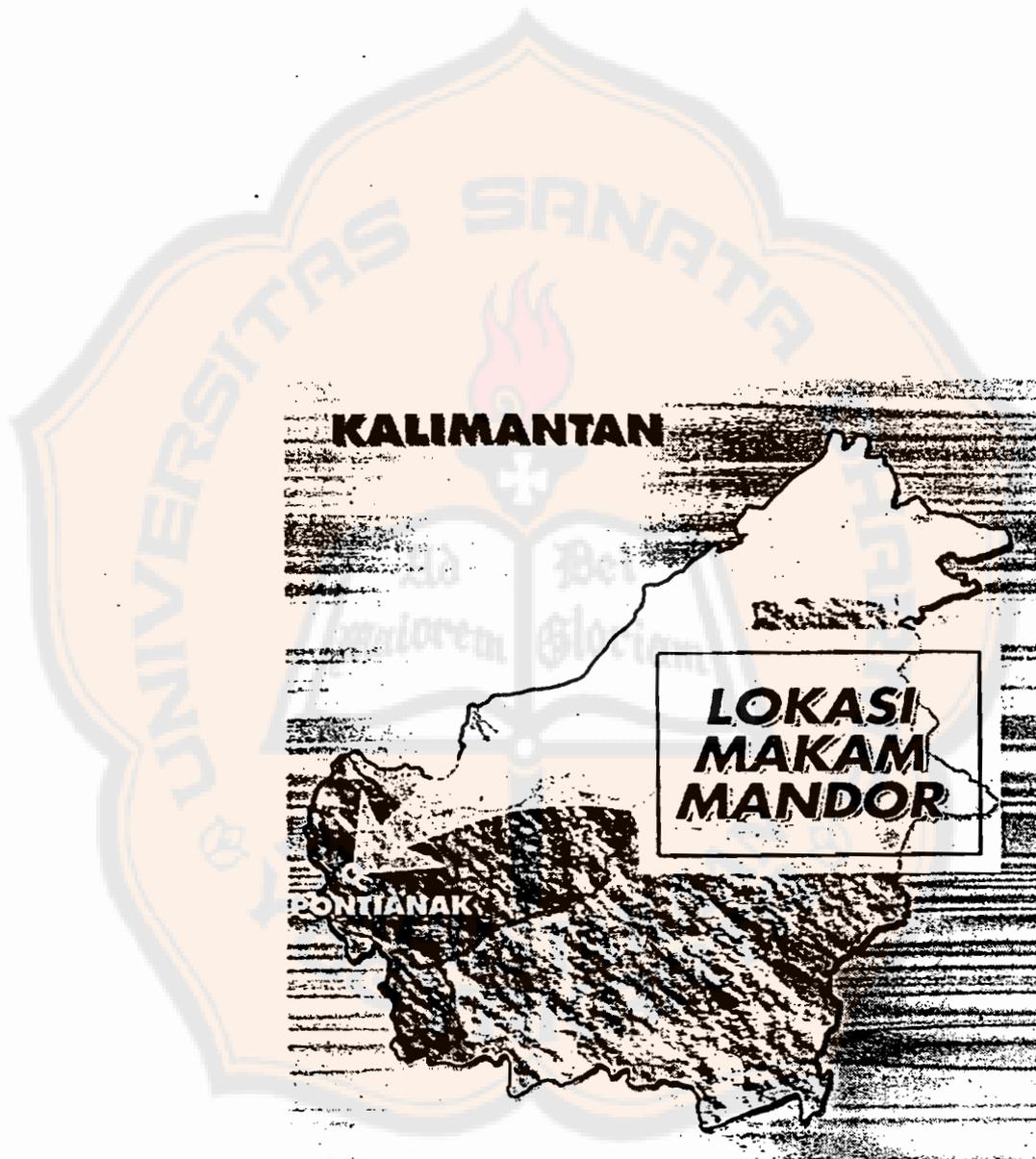
-  SAMBAS
-  SANGGAU
-  MEMPAWAH
-  LANDAK
-  PONTIANAK
-  KUBU



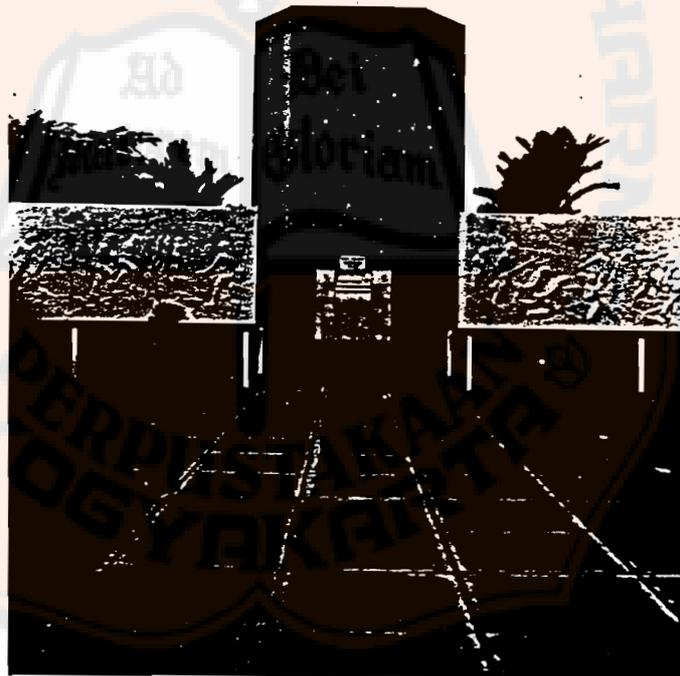
-  SIMPANG
-  TAYAN
-  SUKADANA
-  MATAN
-  SEKADAU
-  SINTANG

Gambar 2. Peta wilayah pemerintahan tradisional.

Sumber : repro dari buku *Profil Propinsi Republik Indonesia : Kalimantan Barat.*



Gambar 4. Lokasi Makam Mandor.
Sumber : repro dari Majalah Gatra.



Gambar 5. Monumen Makam Juang Mandor.
Sumber : koleksi pribadi Kornelius Tony.



Gambar 6. Kuburan korban kekejaman pendudukan Jepang tahun 1942-1945 di Kalimantan Barat.

Sumber : koleksi pribadi Kornelius Tony.



Gambar 7. Tempat pembantaian massal yang dilakukan Jepang terhadap tokoh pergerakan Kalimantan Barat.

Sumber : repro dari majalah Gatra.



Gambar 8. Salah satu makam massal korban pembantaian Jepang.
Sumber : repro dari majalah Gatra.



Gambar 9. Makam massal No. 10 korban pembantaian Jepang.
Sumber : repro dari majalah Gatra.



Gambar 10. Relief yang menggambarkan kekejaman Jepang terhadap rakyat termasuk kaum wanita di Kalimantan Barat
Sumber : repro dari buku Peristiwa Mandor.



Gambar 11. Relief yang menggambarkan tokoh-tokoh pergerakan sedang merencanakan perlawanan terhadap Jepang di Kalimantan Barat.

Sumber : repro dari buku *Peristiwa Mandor*.



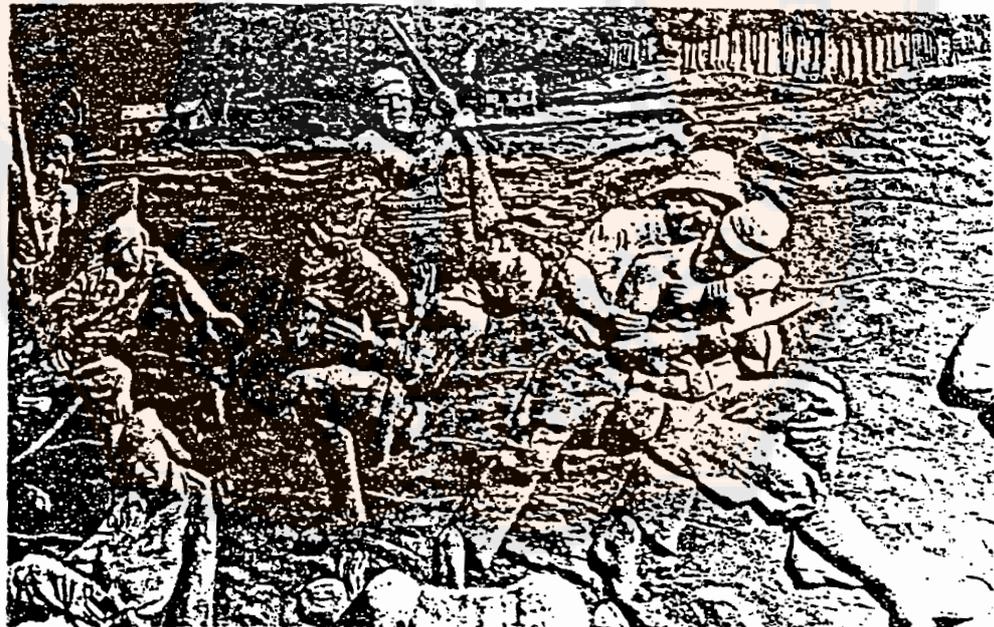
Gambar 12. Relief yang menggambarkan penangkapan secara besar-besaran oleh Jepang terhadap tokoh-tokoh pergerakan di Kalimantan Barat.

Sumber : repro dari buku *Peristiwa Mandor*.



Gambar 13. Relief yang menggambarkan penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan Jepang terhadap tokoh-tokoh pergerakan di Kalimantan Barat.

Sumber : repro dari buku *Peristiwa Mandor*.



Gambar 14. Relief yang menggambarkan perlawanan rakyat Kalimantan Barat terhadap Jepang.

Sumber : repro dari buku *Peristiwa Mandor*.